PENCEGAHAN PERCERAIAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN MELALUI PROGRAM *GEMBOK KATRESNAN* DI DESA BRINGINAN JAMBON: ANALISIS FUNGSIONALISME STRUKTURAL

TESIS

Oleh :

NURUL FADILAH
NIM: 503240004

PROGAM MAGISTER
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2026

PENCEGAHAN PERCERAIAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN MELALUI PROGRAM *GEMBOK KATRESNAN* DI DESA BRINGINAN JAMBON: ANALISIS FUNGSIONALISME STRUKTURAL

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S-2) Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

NURUL FADILAH
NIM: 503240004

PROGAM MAGISTER
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, Nurul Fadilah, NIM 503240004, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **Pencegahan Perceraian Keluarga Pekerja Migran melalui program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan Jambon: Analisis Fungsionalisme Struktural** , merupakan hasil karya mandiri yang saya usahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk, di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 5 April 2026
Pembuat Penyatakan,

Nurul Fadilah
NIM. 503240004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Nurul Fadilah**, **NIM 503240004** dengan judul: ***"Pencegahan Perceraian Keluarga Pekerja Migran Melalui Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan Jambon: Analisis Fungsionalisme Struktural"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian Tesis pada sidang Majelis Munaqoshah Tesis.

Ponorogo, 5 April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.	**Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I.**
NIP. 197207142000031005	NIP. 197511102003121003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Dr. Ridho Rokamah, M.Si.
NIP. 197412111999032002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI P ONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul SK BAN-PT Nomor: 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: https: uinponorogo.ac.id Email: pascasarjana@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis Nurul Fadilah ,NIM. 503240004, Progam Magister Progam Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Pencegahan Perceraian Keluarga Pekerja Migran melalui Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan Jambon: Analisis Fungsionalisme Struktural"***, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqosah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari, Jum'at tanggal 12 Juni 2026 .dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

No.	Ketua Sidang	Tanda Tangan	Tanggal
1.	**Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.Si.** NIP. 197202111999032003. Ketua Sidang		22/6-'26
2	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.** 197602292008011008 Penguji Utama		22 Juni 2026
3.	**Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.** NIP. 197207142000031005 Penguji 2/Pembimbing 1		22/2026/06
4.	**Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I.** NIP. 197511102003121003 Sekretaris Sidang/Pembimbing 2		23/26 6

Ponorogo, 22 Juni 2026
Direktur Pascasarjaana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurul Fadilah
NIM	:	503240004
Fakultas	:	Pascasarjana
Progam Studi	:	Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	**Pencegahan Perceraian Keluarga Pekerja Migran melalui program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan Jambon: Analisis Fungsionalisme Struktural**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 April 2026
Penulis,

Nurul Fadilah
NIM. 503240004

PENCEGAHAN PERCERAIAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN MELALUI PROGRAM GEMBOK KATRESNAN DI DESA BRINGINAN JAMBON: ANALISIS FUNGSIONALISME STRUKTURAL

ABSTRAK

Fenomena perceraian di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada disfungsi struktur keluarga. Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo hadir sebagai inovasi kebijakan lokal untuk menekan angka perceraian melalui simbolisasi komitmen yang kuat. Desa Bringinan merupakan salah satu desa di Ponorogo yang secara proaktif mengonversi keprihatinan sosial menjadi produk hukum formal guna melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Penerapan program ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat desa melalui penguatan nilai-nilai kasih sayang dan kesetiaan.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Bringinan, Jambon, Ponorogo. Analisis data dilakukan dengan pendekatan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Hasil dari analisis data tersebut disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas struktur sosial desa dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap keluarga migran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya Desa Bringinan dalam mengurangi angka perceraian PMI melalui Program *Gembok Katresnan*, menganalisis faktor-faktor struktural yang memengaruhi keberhasilan program tersebut, serta mendeskripsikan pengaruh struktur sosial desa terhadap ketahanan keluarga pekerja migran.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Program *Gembok Katresnan* mentransformasi nilai agama dan budaya ke dalam instrumen hukum yaitu Perdes tahun 2019 dan Perkades tahun 2023 melalui mekanisme peringatan dini dan pendampingan administratif. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat pemerintah Desa. 2) Keberhasilan program didukung oleh empat fungsi sistem sosial (AGIL) meliputi, adaptasi terhadap kebijakan dan ekonomi mandiri, pencapaian tujuan dalam mobilisasi sumber daya, integrasi dengan lintas sektor, dan pemeliharaan pola pada internalisasi nilai melalui simbolisme gembok. 3) Program ini berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang menyediakan ruang mediasi (*ishlah*) dan pemberdayaan ekonomi. Program ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan keutuhan perkawinan dalam kondisi yang merusak martabat seperti dalam kasus kekerasan atau pelanggaran hak berat.

Kata Kunci: *Gembok Katresnan*, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Perceraian, Fungsionalisme Struktural, Ketahanan Keluarga.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena perceraian di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan persoalan sosial yang semakin memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI yang tersebar di berbagai negara per tahun 2022 mencapai lebih dari 4,6 juta orang, dengan sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan, termasuk Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah kantong PMI terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 22.000 warganya bekerja di luar negeri, terutama di sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan perawat lansia di Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap perkembangan anak, kestabilan psikologis keluarga, dan tatanan sosial secara umum. Dalam konteks teori fungsionalisme struktural, keluarga merupakan lembaga sosial yang menjalankan fungsi vital, seperti sosialisasi anak, kontrol sosial, dan pemeliharaan kasih sayang. Apabila terjadi keretakan dalam lembaga keluarga, maka akan muncul disfungsi sosial yang memengaruhi struktur masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga membutuhkan intervensi sosial dari lingkungan dan lembaga desa.[2]

Salah satu tantangan besar yang dihadapi keluarga PMI adalah masalah perceraian. Jarak geografis dan ketidakhadiran pasangan dalam jangka waktu panjang seringkali menimbulkan kerenggangan emosional, menurunnya kualitas komunikasi, hingga munculnya masalah kepercayaan dalam

[2] "Kp2mi | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," Kp2mi, Diakses 19 September 2025, Https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-Penempatan.

rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang dilaporkan terjadi karena tekanan psikologis, ekonomi, dan sosial akibat perpisahan fisik yang berkepanjangan. Selain itu, anak-anak dari keluarga PMI sering mengalami kerentanan dalam hal pengasuhan dan perhatian emosional, yang dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka.[3]

Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu desa yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap persoalan tersebut dengan meluncurkan sebuah program unggulan yang dikenal sebagai "*Gembok Katresnan*". Program ini merupakan bentuk inovasi lokal yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga para PMI dengan cara memperkuat komunikasi pasangan, memberikan bimbingan pranikah, mengadakan forum konsultasi keluarga, serta menyisipkan nilai-nilai keagamaan dalam pembinaan keluarga. Melalui pendekatan kultural dan religius, program ini mampu menjadi wadah mediasi sosial yang melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan keluarga PMI secara langsung.

Tingginya angka migrasi ini diikuti pula oleh meningkatnya persoalan sosial di tingkat lokal, salah satunya adalah perceraian dalam rumah tangga PMI. Menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, dalam kurun waktu 2019–2022, tercatat lebih dari 1.300 kasus perceraian yang melibatkan pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya adalah PMI.[4] Sebagian besar kasus disebabkan oleh faktor komunikasi yang renggang akibat jarak geografis, perselingkuhan, tekanan ekonomi, serta kurangnya penguatan nilai-nilai spiritual dan ketahanan keluarga.

Perceraian dalam keluarga PMI tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang mengalami krisis psikologis, gangguan perkembangan sosial, dan kurangnya pengawasan dalam pendidikan serta moralitas. Selain itu, perceraian berdampak pada struktur sosial masyarakat,

---

[3] Robby Darwis Nasution, "Pemetaan Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 1 (2019): 31–40, https://doi.org/10.31105/jpks.v18i1.1610.

[4] Antaranews.Com, "Di Ponorogo Jatim Kasus Perceraian Didominasi Pasangan Muda," Antara News, 7 Januari 2023, Https://Www.Antaranews.Com/Berita/3339780/Di-Ponorogo-Jatim-Kasus-Perceraian-Didominasi-Pasangan-Muda.

mengingat keluarga merupakan lembaga sosial dasar yang menjalankan fungsi reproduksi nilai, sosialisasi, dan kontrol sosial.[5] Dalam kerangka Teori Fungsionalisme Struktural yang dipelopori oleh Talcott Parsons dan Emile Durkheim, keretakan dalam keluarga akan menimbulkan disfungsi sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat secara keseluruhan.[6]

Keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Di dalamnya berlangsung proses pewarisan nilai, sosialisasi, dan kontrol sosial yang menjadi fondasi stabilitas sosial. Namun, dinamika globalisasi dan migrasi tenaga kerja telah menghadirkan tantangan serius terhadap ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan keluarga PMI tidak hanya merusak relasi pasangan, tetapi juga berdampak luas terhadap perkembangan anak, struktur sosial, dan tatanan nilai masyarakat. Dalam menghadapi persoalan tersebut, berbagai pihak dituntut untuk merumuskan solusi yang berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Merespons kondisi tersebut, Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, meluncurkan sebuah program inovatif bernama *"Gembok Katresnan"* sejak tahun 2023. Program ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga PMI dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah Desa, Tokoh Agama, serta para Keluarganya. Adapun bentuk kegiatannya meliputi: bimbingan pranikah, forum komunikasi pasangan jarak jauh, edukasi digital, pembinaan agama, dan mediasi konflik. Hingga tahun 2023, menurut data dari Pemerintah Desa Bringinan, program ini berhasil menurunkan angka perceraian lokal hingga 30%, dari 40 kasus menjadi 28 kasus dalam setahun.[7]

---

[5] Hadi Santoso, "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 111–18, https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1664.

[6] "Mengenal Konsep Fungsionalisme Struktural dalam Pemikiran Talcott Parsons Halamanall-Kompasiana.com,"diakses5November2025.

[7] Jatimnow.Com, "'*Gembok Katresnan*', Inovasi Desa Bringinan Ponorogo Tekan Angka Perceraian Pmi," Jatimnow.Com - Berita Dan Informasi Jawa Timur Terkini, 12 Juni 2025, Https://Jatimnow.Com/Baca-77133-Gembok-Katresnan-Inovasi-Desa-Bringinan-Ponorogo-Tekan-Angka-Perceraian-Pmi.

Teori Fungsionalisme Struktural, sebagaimana dipelopori oleh Talcott Parsons dan Emile Durkheim, memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun dari berbagai elemen atau institusi yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, setiap institusi-seperti keluarga, pendidikan, agama, hukum, dan ekonomi, memiliki peran spesifik yang mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan.

Keluarga, dalam pandangan teori ini, merupakan salah satu lembaga sosial paling mendasar. Fungsinya mencakup sosialisasi nilai dan norma, kontrol sosial, reproduksi, afeksi, serta perlindungan emosional. Oleh karena itu, ketika fungsi keluarga terganggu, seperti dalam kasus perceraian, maka terjadi apa yang disebut disfungsi sosial. Disfungsi ini tidak hanya berdampak pada individu (pasangan dan anak), tetapi juga memengaruhi kohesi sosial, keseimbangan moral masyarakat, dan bahkan meningkatkan potensi masalah sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya solidaritas sosial.[8]

Dalam konteks ini, program "*Gembok Katresnan*" dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi lembaga keluarga yang sempat terganggu akibat dampak negatif migrasi kerja luar negeri. Dengan melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh agama, pemerintah desa, KUA, hingga mantan PMI, program ini memperkuat kembali sistem pendukung keluarga.

Program "*Gembok Katresnan*" merupakan inisiatif sosial yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang rentan mengalami perceraian akibat tekanan ekonomi, jarak geografis, serta lemahnya komunikasi. Dalam perspektif hukum, program ini dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari upaya menjaga stabilitas lembaga keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang

[8] Marhamah Ika Putri, "Teori Fungsionalisme Dalam Sosiologi: Pengertian dan Asalnya," tirto.id, diakses 5 November 2025, https://tirto.id/apa-pengertian-teori-fungsionalisme-dalam-sosiologi-gikG.

Nomor 16 Tahun 2019.[9] UU tersebut menekankan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewajibkan suami istri untuk saling setia, membantu, dan menghormati satu sama lain.

Selanjutnya, program ini memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa perlindungan PMI tidak hanya menyangkut aspek hukum dan ketenagakerjaan, tetapi juga aspek sosial dan keluarga. Pasal 92 dan 93.[10] secara eksplisit memberi tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk memberikan informasi, edukasi, dan pembinaan kepada calon dan mantan PMI, termasuk keluarganya. Oleh karena itu, keberadaan *"Gembok Katresnan"* merupakan implementasi langsung dari mandat perlindungan sosial terhadap keluarga PMI.

Dalam konteks hukum Islam, program ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80 yang menyebutkan kewajiban suami istri untuk saling mencintai dan menjaga keutuhan rumah tangga. Program ini, dengan melibatkan tokoh agama dan lembaga seperti KUA, menekankan pentingnya membangun komunikasi harmonis serta nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendekatan preventif dalam KHI.[11] yang memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang harus dihindari apabila masih memungkinkan dilakukan mediasi dan pembinaan.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam program ini seperti tokoh agama, perangkat desa, Keluarga PMI dan Komunitas PMI menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menguatkan kembali sistem pendukung keluarga. Sinergi ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang diakui dalam pendekatan fungsionalisme struktural,

---

[9] "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 September 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[10] "UU No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 September 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

[11] "UU No. 18 Tahun 2017," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 September 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017.

yang memandang bahwa lembaga sosial seperti keluarga harus tetap menjalankan fungsinya demi menjaga stabilitas masyarakat secara luas. Ketika keluarga terganggu akibat migrasi luar negeri.[12] Program seperti "*Gembok Katresnan*" hadir sebagai mekanisme adaptif untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.[13]

Dengan demikian, program *"Gembok Katresnan"* tidak hanya menjadi solusi lokal terhadap persoalan sosial di kalangan PMI, tetapi juga dapat dikaji sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai hukum nasional yang tertuang dalam berbagai regulasi. Dari sisi hukum positif, program ini sesuai dengan amanat UU Perkawinan dan UU PMI; dari sisi hukum Islam, program ini mencerminkan usaha menjaga sakralitas dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, program ini patut dijadikan contoh praktik baik (best practice) kolaboratif antara hukum, agama, dan masyarakat dalam menangani kompleksitas masalah sosial akibat migrasi kerja.[14]

Tindakan kolektif ini mencerminkan dua fungsi utama menurut Parsons, yaitu: Adaptasi di mana masyarakat merespons tantangan eksternal (dalam hal ini perceraian karena migrasi) dengan menyesuaikan norma dan menciptakan program baru dan Integrasi merupakan upaya memperkuat hubungan antar anggota masyarakat untuk menciptakan solidaritas dan kohesi sosial melalui forum komunikasi, mediasi konflik, dan pembinaan agama.[15]

Melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi keluarga PMI dan inovasi yang telah dilakukan oleh Desa Bringinan, maka penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas program *Gembok Katresnan* dalam menekan angka perceraian PMI. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam kajian

---

[12] Universitas Lampung Dkk., "Penguatan Peran Pemerintah melalui Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia," *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 20, No. 2 (30 September 2018): 95–111, Https://Doi.Org/10.23960/Sosiologi.V20i2.10.

[13] "Desa di Ponorogo Punya Gembok Cinta untuk Tekan Angka Perceraian Pekerja Migran Indonesia,"diakses5November2025,https://surabaya.kompas.com/read/2025/06/11/224207078/desa-di-ponorogo-punya-gembok-cinta-untuk-tekan-angka-perceraian-pekerja.

[14] "Desa di Ponorogo Punya Gembok Cinta untuk Tekan Angka Perceraian Pekerja Migran Indonesia."

[15] "Dari Sosiologi untuk Indonesia," Dari Sosiologi untuk Indonesia, diakses 5 November 2025, https://www.sosiologiku.com/.

akademik, tetapi juga dapat menjadi model praktik baik (best practice) bagi desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa. Oleh karena itu, studi ini akan pendekatan: Teori Fungsionalisme Struktural, untuk melihat peran program desa sebagai bagian dari sistem sosial yang menjaga stabilitas masyarakat.

Fenomena ini menuntut perhatian bukan hanya dari sisi sosiologis, tetapi juga dari perspektif hukum dan keagamaan. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang tidak hanya melibatkan hubungan antar manusia, tetapi juga perjanjian spiritual di hadapan Tuhan. Maka, menjaga keutuhan rumah tangga menjadi bagian dari amanah moral dan sosial yang harus dijaga oleh individu maupun komunitas. Melihat urgensi tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam terhadap upaya-upaya komunitas lokal dalam merespons tantangan sosial ini, seperti program "*Gembok Katresnan*" di Desa Bringinan yang muncul sebagai bentuk inovasi sosial berbasis nilai-nilai lokal dan religius.[16]

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memainkan peranan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas kerja lintas negara, keluarga-keluarga Indonesia, khususnya yang salah satu anggotanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), menghadapi tantangan baru yang kompleks. Jarak geografis, tekanan ekonomi, serta kurangnya interaksi emosional antar pasangan menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Salah satu konsekuensi yang sering kali muncul adalah meningkatnya angka perceraian, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong pengirim PMI seperti Kabupaten Ponorogo.[17]

Ketika salah satu fungsi tersebut terganggu, misalnya karena perceraian, maka timbul disfungsi sosial yang mengancam keseimbangan sistem masyarakat. Oleh karena itu, intervensi sosial seperti program *Gembok*

---

[16] *Desa Bringinan Luncurkan "Gembok Katresnan" untuk Tekan Angka Perceraian PMI*, 12 Juni 2025, https://www.metrowilis.com/2025/06/desa-bringinan-luncurkan-gembok.html.

[17] Charolin Pebrianti, "Kasus Perceraian di Ponorogo Capai 1.990, Didominasi Para TKW," detiknews, diakses 5 November 2025, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1-990-didominasi-para-tkw.

Katresnan berfungsi untuk mengembalikan peran institusi keluarga sebagai penopang tatanan sosial yang stabil.

Dalam memahami fenomena perceraian di kalangan PMI, pendekatan teori fungsionalisme struktural memberikan landasan penting. Talcott Parsons berpendapat bahwa setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas sistem masyarakat secara keseluruhan. Keluarga, dalam pandangan ini, berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai dan norma, tempat perlindungan emosional, serta kontrol sosial primer. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "***Upaya Desa Bringinan Jambon dalam Mengurangi Angka Perceraian Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program Gembok Katresnan : Pendekatan Teori Fungsionalisme Struktural***."

B. Fokus Penelitian

Peneliian ini berfokus untuk mendeskripsikan secara komprehensif implementasi program *Gembok Katresnan* dalam upaya menekan angka perceraian keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Beringin melalui pendekatan Teori Fungsionalisme Struktural. Fokus penelitian dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program terhadap stabilitas struktur keluarga. Aspek perencanaan mencakup strategi pemerintah desa, perumusan kebijakan, dan pemetaan fungsi keluarga dalam mencegah disintegritas; aspek pelaksanaan meliputi berbagai bentuk intervensi sosial seperti konseling pranikah/keberangkatan, mediasi konflik keluarga, penguatan nilai kesetiaan (*katresnan*), dan pengawasan sosial berbasis komunitas; sedangkan aspek dampak berfokus pada pemeliharaan keseimbangan (*equilibrium*) keluarga, penurunan angka gugat cerai, serta optimalisasi kembali fungsi-fungsi keluarga yang sempat mengalami disfungsi.

Subjek penelitian meliputi perangkat Desa Beringin, pengelola program *Gembok Katresnan*, pasangan PMI, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam penguatan ketahanan keluarga. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian,

penelitian ini secara spesifik menyoroti efektivitas program *Gembok Katresnan* sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menjaga keutuhan institusi keluarga PMI, serta menganalisis bagaimana sistem sosial di perdesaan beradaptasi terhadap tantangan migrasi internasional guna menemukan pola penanganan konflik keluarga yang efektif dalam kerangka fungsionalisme struktural.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan?
2. Bagaimana fungsi-fungsi sosial dalam skema AGIL bekerja dalam pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan?
3. Bagaimana kontribusi program *Gembok Katresnan* terhadap pencegahan konflik keluarga dan perceraian pekerja migran di Desa Bringinan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahu desain, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan?
2. Untuk menganalisis fungsi-fungsi sosial dalam skema AGIL bekerja dalam pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan?
3. Untuk mengidentifikasi kontribusi program *Gembok Katresnan* terhadap pencegahan konflik keluarga dan perceraian pekerja migran di Desa Bringinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoretis maupun praktis dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a. Terhadap Pengembangan Kajian Ilmu Hukum Keluarga Islam:

Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang bagaimana hukum keluarga Islam diaplikasikan dalam konteks keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini memperlihatkan bahwa norma-norma hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban suami-istri, kesetiaan, dan perlindungan keluarga, dihadapkan pada tantangan nyata berupa migrasi tenaga kerja.

b. Terhadap Penerapan Teori Fungsionalisme Struktural

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori fungsionalisme struktural dengan menunjukkan bagaimana institusi desa, tokoh agama, dan komunitas lokal berfungsi menjaga stabilitas sosial dalam menghadapi disrupsi yang ditimbulkan migrasi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi ilmiah yang relevan dalam mengaitkan teori dengan praktik sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa**:**

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan sosial yang lebih adaptif, khususnya terkait dengan pembinaan dan perlindungan keluarga PMI. Dengan adanya rekomendasi yang berbasis data empiris, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam mencegah perceraian serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun strategi dakwah, bimbingan, maupun kegiatan sosial yang lebih relevan dengan permasalahan keluarga PMI. Tokoh agama dapat mengedepankan pendekatan moral dan spiritual untuk memperkuat ketahanan keluarga.

c. Bagi Desa-desa lain

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan model yang dapat diadaptasi oleh desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Program berbasis kearifan lokal, seperti *Gembok Katresnan*, dapat dijadikan

contoh bagaimana inovasi sosial mampu menekan angka perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian Penelitian terhadap perceraian pekerja migran Indonesia (PMI) telah banyak dilakukan, dengan fokus utama pada dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Namun, sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada masalah perceraian sebagai dampak dari ketidakhadiran salah satu pasangan yang bekerja di luar negeri, tanpa mengeksplorasi lebih jauh solusi praktis atau intervensi sosial yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perceraian tersebut. Sebagian besar studi tersebut menggunakan pendekatan kulitatif untuk mengukur angka perceraian atau menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya dan struktur sosial desa yang lebih luas.

1. Penelitian tentang Pekerja Migran dan Perceraian

   Sebagian besar penelitian yang dilakukan terkait pekerja migran Indonesia (PMI) berfokus pada ketahanan fisik dan ketahanan non-fisik. Ketahanan fisik meliputi kemampuan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Misalnya, penelitian oleh Niroini Primasari , tesis yang berjudul *"Islam dan Ketahanan Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Trenggalek"*, dalam Tesisnya ia membahas Selain fisik dan non fisik ini membuktikan bahwa tidak semua keluarga buruh migran berakhir pada perceraian, melainkan justru mampu membangun ketahanan kuat berlandaskan nilai agama dan komunikasi terbuka.[18] Selanjutnya Penelitian jamila, jurnal yang berjudul *"Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran mengenai relasi suami istri"* dalam karyanya dia membahas konteks keluarga buruh migran di Desa Patokpicis, Malang, dalam penelitian ini lebih kepada menekankan fisik

[18] Niroini Primasari, "islam dan ketahanan keluarga buruh migran di kabupaten trenggalek." (universitas islam negeri sunan kalijaga, 2021), 12.

dan non fisik sehingga dalam penelitian ini lebih menekankan aspek fisik dan non fisik. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma-norma agama dan sosial dengan realitas ekonomi yang dialami keluarga buruh migran, serta menjadi refleksi penting dalam upaya menafsirkan kembali konsep kepala keluarga dalam perspektif hukum Islam kontemporer

Namun penelitian ini lebih condong dari aspek fisik sekaligus dari aspek relasi keluarga sehingga dalam aspek keduanya perlu perhatian secara khusus untuk menjadi penelitian lebih lanjut dan menjadi sedikit perhatian antara aspek fisik dan non fisik sekaligus relasi keluarga.

2. Studi tentang Program Pengurangan Perceraian dan Keluarga Pekerja Migran

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Mohammad Ilham Nurrochman, Muhammad Bukhori, dan Siti Rochmah, membahas berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Sebagian besar program tersebut berfokus pada pendekatan psikologis dan pendidikan keluarga, seperti konseling keluarga berbasis nilai moral dan spiritual, pelatihan literasi ekonomi dan digital, serta pembinaan komunikasi antar pasangan. Penelitian oleh Mohammad Ilham Nurrochman, Tesis yang berjudul *"Peran pekerja Migran dalam membentuk Ketahanan Keluarga (studi kasus di desa tobai timur, kecamatan sokobanah, kabupaten sampang)"* menyoroti bahwa tingkat ketahanan keluarga PMI sebagian besar berada pada kategori sedang dalam hal literasi ekonomi dan digital, dan kedua aspek tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap ketahanan keluarga pekerja migran. Ia menyimpulkan bahwa program pemberdayaan dan pendidikan keluarga berbasis pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah efektif dalam meningkatkan ketahanan keluarga PMI melalui komunikasi, pendidikan nilai, dan kerja sama antara suami-istri meskipun dalam hubungan jarak

jauh.[19] Penelitian Muhammad Bukhari, Tesis yang berjudul *"strategi koping, komunikasi keluarga, dukungan sosial dan kualitas perkawinan pada keluaraga pekerja migran indonesia"* juga menegaskan bahwa kualitas perkawinan keluarga PMI sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta strategi koping yang digunakan oleh istri; dukungan sosial dari tetangga dan keluarga besar berperan besar dalam menjaga ketahanan keluarga meskipun terjadi perpisahan fisik.[20] Adapun penelitian oleh Wahyu Utamidewi, Deddy Mulyana ,dan Edwin Rizal, Jurnal yang berjudul *" pengalaman komunikasi keluarga pada mantan buruh migran perempuan"* mengungkapkan bahwa keluarga migran tidak hanya membangun komunikasi untuk menjaga hubungan, tetapi juga menginternalisasi nilai agama dan kasih sayang sebagai motivasi utama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.[21]

Namun demikian, meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang ketahanan keluarga pekerja migran, sebagian besar masih berfokus pada aspek psikologis dan hubungan interpersonal dalam lingkup keluarga. Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah kurangnya perhatian terhadap pengaruh norma sosial dan struktur komunitas desa yang dapat mendukung atau justru menghambat keberhasilan program-program pemberdayaan keluarga. Pendekatan yang digunakan masih berpusat pada dinamika internal keluarga, tanpa banyak menyoroti peran sosial masyarakat sekitar serta bagaimana struktur sosial di desa dapat

---

[19] Mohammad ilham nurrochman, "Peran pekerja Migran dalam membentuk Ketahanan Keluarga (studi kasus di desa tobai timur, kecamatan sokobanah, kabupaten sampang)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024), 137.

[20] Muh Bukhari, "Strategi Koping, Komunikasi Keluarga, Dukungan Sosial dan Kualitas Perkawinan pada Keluarga Pekerja Migran Indonesi (PMI)." (Thesis, IPB University, 2020), 12, http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103399.

[21] Wahyu Utamidewi dkk., "PENGALAMAN KOMUNIKASI KELUARGA PADA MANTAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN," *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 69–80, https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.7901.

berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program peningkatan ketahanan keluarga PMI.

3. Teori Fungsionalisme Struktural dan Penerapannya dalam Penelitian Sosial

Sebagian besar penelitian sosial yang menggunakan teori fungsionalisme struktural, seperti yang dilakukan oleh Akhmad Maimun dan Hasbi Ash Shiddiqi serta Aisa Kartika Puspita Dewi, Nita Puspita Dewi, dan Dina Rizqayanti, lebih berfokus pada analisis peran lembaga sosial seperti pendidikan, agama, dan keluarga dalam menjaga keseimbangan serta stabilitas sosial. Penelitian oleh Akhmad Maimun dan Hasbi Ash Shiddiqi, Jurnal yang berjudul *"Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural"* menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi penting sebagai institusi pengendali sosial yang menjaga keteraturan masyarakat melalui regulasi pernikahan dan program penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini. Dalam kerangka teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, KUA berperan sebagai bagian dari sistem sosial yang bertugas menjaga stabilitas sosial dengan mendorong masyarakat untuk menunda usia perkawinan.[22]

Sementara itu, penelitian oleh Aisa Kartika Puspita Dewi, Nita Puspita Dewi, dan Dina Rizqayanti, Jurnal yang berjudul *"Perceraian Berdasarkan Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme dan Teori Konflik Sosiologi Modern"* menyoroti bagaimana teori fungsionalisme struktural dan teori konflik dapat menjelaskan dinamika hubungan keluarga dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki fungsi sosial tertentu untuk menjaga keseimbangan hubungan, dan kedewasaan emosional pasangan berperan

[22] Akhmad Maimun dan Hasbi Ash Shiddiqi, "Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2024): 77–87, https://doi.org/10.32528/faj.v22i2.23950.

penting dalam mempertahankan keutuhan keluarga meskipun menghadapi persoalan rumah tangga.[23]

Namun, meskipun teori fungsionalisme struktural telah banyak digunakan untuk menjelaskan peran lembaga sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat, penerapannya dalam konteks program sosial yang bertujuan mengurangi perceraian pekerja migran masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana teori ini dapat diimplementasikan dalam program berbasis komunitas seperti *Gembok Katresnan* yang dijalankan di tingkat desa. Padahal, program seperti ini yang memanfaatkan simbolisme budaya dan nilai-nilai lokal berpotensi besar menjadi strategi inovatif dalam memperkuat komitmen pernikahan serta mengurangi angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran.

4. Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Dari kajian terdahulu dapat diidentifikasi adanya beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Sebagai contoh:

a) Pertama, masih sangat sedikit penelitian yang membahas secara mendalam tentang program sosial berbasis desa yang dirancang untuk mengurangi perceraian di kalangan keluarga pekerja migran Indonesia, khususnya program yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan norma sosial masyarakat seperti Program *Gembok Katresnan*.
b) Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis ketahanan keluarga atau perceraian pekerja migran dari perspektif individual dan psikologis, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan struktur sosial yang lebih luas, termasuk peran komunitas desa, lembaga sosial, serta pengaruh norma dan nilai budaya setempat.

[23] Rr. Aisa Kartika Puspita Dewi dkk., *Perceraian Berdasarkan Perspektif Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosiologi Modern*, Zenodo, 8 Juni 2023, 319, https://doi.org/10.5281/ZENODO.8016382.

c) Ketiga, penerapan teori fungsionalisme struktural dalam mengkaji efektivitas program sosial di tingkat desa masih sangat terbatas, padahal teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana setiap elemen dalam struktur sosial, seperti lembaga agama, pemerintah desa, dan masyarakat, berfungsi secara bersama-sama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan program-program sosial seperti *Gembok Katresnan* dalam memperkuat ketahanan keluarga pekerja migran.

5. Penelitian ini Bertujuan untuk Mengisi Kesenjangan

penelitian dengan mengkaji secara mendalam pengaruh struktur sosial desa terhadap keberhasilan Program *Gembok Katresnan* dalam mengurangi angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsionalisme struktural, penelitian ini akan menganalisis bagaimana elemen-elemen sosial di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon seperti norma sosial, nilai budaya lokal, kebijakan pemerintah desa, serta peran lembaga sosial dan komunitas berfungsi secara bersama-sama dalam mendukung stabilitas keluarga dan efektivitas program tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan program sosial berbasis komunitas yang berorientasi pada ketahanan keluarga pekerja migran, sekaligus memperkaya pemahaman tentang bagaimana struktur sosial lokal berperan penting dalam menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di tingkat desa.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan dinamika sosial yang terjadi dalam program *Gembok Katresnan* secara mendalam

dan kontekstual. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara holistik implementasi program, perspektif masyarakat, serta peran berbagai aktor sosial dan keagamaan dalam menanggulangi perceraian di kalangan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pendekatan ini juga cocok digunakan dalam mengkaji dua perspektif utama dalam penelitian, yaitu Pendekatan Teori Fungsionalisme Struktural, karena berkaitan erat dengan norma sosial, nilai budaya, dan struktur masyarakat yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau data kuantitatif. Fokus utama pendekatan ini adalah pada pemahaman mendalam (verstehen), bukan generalisasi statistik.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.[24] Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan dalam konteks alami. Dalam konteks ini, penelitian studi kasus dipilih karena fokus pada analisis mendalam terhadap fenomena sosial tertentu, yaitu program "*Gembok Katresnan*" di Desa Bringinan, yang menjadi upaya menekan angka perceraian pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara detail implementasi program, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dalam konteks hukum Islam dan teori sosiologis. Dengan jenis ini, peneliti dapat menggali makna, nilai, dan pengalaman para pelaku serta tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung.

[24] "Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo," Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, diakses 23 September 2025, https://www.bringinan.desa.id/.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (key instrument) yang secara langsung terlibat dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Kehadiran peneliti di lapangan dilakukan secara aktif dengan pendekatan partisipatif dan observatif.

Peneliti akan turun langsung ke Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, untuk melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Komunitas PMI di Desa Bringinan, Tokoh Masyarakat, serta keluarga PMI yang terlibat dalam program *Gembok Katresnan*. Selama proses ini, peneliti akan menjaga netralitas dan objektivitas, serta menjalin hubungan yang baik dengan informan agar data yang diperoleh bersifat natural dan valid. Kehadiran peneliti di lapangan juga bertujuan untuk memahami konteks sosial dan budaya secara langsung, serta menangkap nuansa nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin kedalaman data (depth of understanding) dalam pendekatan kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, yang dikenal sebagai salah satu daerah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur. Banyak warga desa ini yang bekerja ke luar negeri, terutama ke negara-negara Asia dan Timur Tengah, sehingga dinamika sosial keluarga migran menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat.

Desa Bringinan juga menjadi lokasi pelaksanaan program *Gembok Katresnan*, sebuah inisiatif lokal yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga PMI dan menekan angka perceraian. Keunikan program ini terletak pada keterlibatan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah Kepala Desa Perangkat Desa,

Ketua Komunitas PMI di Desa Bringinan dan, dalam membangun ketahanan keluarga berbasis nilai lokal dan keagamaan. Oleh karena itu, desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai representatif dan relevan untuk memahami implementasi program tersebut secara langsung dalam konteks sosial yang nyata.

Berdasarkan perbedaan kontekstual tersebut, pemilihan studi multi situs di kedua lokasi ini dimaksudkan untuk melihat secara komparatif bagaimana lembaga pendidikan formal dan lembaga berbasis keagamaan berupaya menginternalisasikan nilai religius melalui program keagamaan yang di kedua tempat merupakan program unggulan wajib. Secara spesifik, perbandingan ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis strategi internalisasi nilai religius yang paling efektif dan mengukur bagaimana program-program keagamaan di tiap situs berkorelasi langsung dengan peningkatan kecerdasan spiritual bagi peserta didik, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dalam pembentukan karakter.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang memiliki peran strategis serta pengalaman langsung terkait program *Gembok Katresnan* Informan tersebut terdiri dari Kepala Desa menjelaskan program program *Gembok Katresnan* adaalah upaya Desa Bringinan Jambon dalam menjaga keharmonisan keluarga pekerja migran Indonesia, agar mereka tidak hanya sukses ekonomi, tetapi juga kuat dalam ikatan sosial keluarga. Perangkat Desa yang menjelaskan latar belakang sosial masyarakat serta kebijakan desa dalam mendukung ketahanan keluarga PMI. Ketua Komunitas PMI di Desa Bringinan menjelaskan karena banyak warga desa bringinan yang menjadi pekerja migran Indonesia sehingga

diperlukan wadah untuk menjaga hubungan antar keluarga, memberikan dukungan, serta mencegah masalah-masalah sosial seperti perceraian. Tokoh Agama turut diwawancarai untuk memberikan pandangan dari sisi keagamaan, khususnya dalam membina keluarga dan menyelesaikan konflik rumah tangga.[25]

b. Data sekunder

penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kegiatan program, data statistik perceraian di desa setempat, arsip dari Balai Desa, serta literatur terkait kebijakan perlindungan keluarga PMI dan konsep ketahanan keluarga. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan lapangan dan memberikan konteks teoritis serta historis terhadap pelaksanaan program *Gembok Katresnan*. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai dampak sosial dan keagamaan dari program tersebut dalam menekan angka perceraian di kalangan keluarga migran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui suatu pengamatan. Kegiatan pengumpulan data mencakup pencatatan terhadap suat fenomena yang terjadi disertai keadaan dengan perilaku objek sasaran. Sedadngkan orang yang melakukan observasi disebut dengan pengobsevasi (observer) dan pihak yang diobservasi (observe).[26]

---

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6–7.

[26] Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[27] Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.[28] Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.[29]

Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung di lapangan, terutama tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti pertemuan kelompok keluarga, pembinaan rohani, dan sosialisasi dari pihak desa atau. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung interaksi sosial, respon masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bringinan.[30].

b. Wawancara

Dalam buku yang ditulis Sugiyono, Esterberg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang saling bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar bisa menemukan permasalahan yang akan hendak diteliti.[31] Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam dari para

---

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 136.

[28] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasrama, 2002), 11.

[29] Singarimbun Masri and Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

[30] Virginia Braun Dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis In Psychology," *Qualitative Research In Psychology* 3, No. 2 (Januari 2006): 77–101, Https://Doi.Org/10.1191/1478088706qp063oa.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

informan kunci. Wawancara ini memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian data, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan.[32] sehingga diperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai pelaksanaan dan dampak program *Gembok Katresnan*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar maupun arkeologis. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber nominasi yang terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumentasi hanyalah sebuah analisis tulisan atau analisis isi visual dari suatu dokumen.[33] Dalam penelitian ini, bukti foto termasuk pada dokumentasi karena dapat menjadi data tambahan yang berbentuk visual. Dalam pencarian data dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[34] Proses analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Lebih lanjut bahwa, proses analisis data kualitatif telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,

---

[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

[33] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 175–76.

[34] Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 200–201.

sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data jadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounde.[35]

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifiying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Menurut Milles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[36] Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana akan diterapkan sebagaimana berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

   Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, terutama analisisnya tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation)*

   Miles dan Huberman dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan 70 lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut[37]:

---

[35] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 89–90.
[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 133.
[37] Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldaña., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).

1) Pemilihan (*Selecting*)

Menurut Miles dan Huberman peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensidimensi mana yang lebih penting, hubunganhubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

2) Pengerucutan (*Focusing*)

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

3) Peringkasan (*Abstracting*)

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data.

4) Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying dan Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menarasikan data.

Pada tahap ini peneliti akan mereduksi narasi sesuai dengan fokus penelitian menggunakan coding, rumusan data 1, rumusan data 2, dan rumusan data 3, sehingga akan ditemukan domain.

a. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Penyajian data yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan lain sebagainya. Model teknik analisis data yang paling banyak digunakan adalah dengan teks yang bersifat narasi.

b. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh agen travel Our Trip1st pada wisatawan mancanegara berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.[38] Dari penyajian data di atas kemudian peneliti dapat merumuskan kesimpulan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai strategi utama dalam menguji kredibilitas temuan. Triangulasi merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data

[38] Miles, Huberman, and Saldaña.

yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas yang ada dan tidak bersifat subjektif semata.[39]

Pertama, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan. Misalnya, informasi yang diberikan oleh perangkat desa dibandingkan dengan keterangan dari Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun keluarga PMI. dengan cara ini, peneliti dapat menilai konsistensi dan validitas data dari sudut pandang yang berbeda.

Kedua, digunakan triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil yang diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh informan (wawancara), apa yang terjadi di lapangan (observasi), dan apa yang tercatat secara administratif atau historis (dokumentasi).

Ketiga, peneliti juga menggunakan triangulasi teori, dengan mengkaji fenomena yang ditemukan menggunakan dua pendekatan teori, yaitu Pendekatan Teori Fungsionalisme Struktural. Pendekatan ganda ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara lebih kaya, baik dari sisi normatif keagamaan maupun dari dimensi struktur sosial masyarakat.[40] Dengan menerapkan ketiga bentuk triangulasi tersebut, diharapkan data yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

8. Tahapan Penelitian

Penelitian ini meliputi tiga tahapan hingga tahap terakhir. Tahapan tersebut adalah tahap pralapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

a. Tahap Pra lapangan

---

[39] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 330–331.

[40] . Lexy J.Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2019), 330-331.

Tahap pra lapangan meliputi kegiatan penyusunan rancangan awal penelitian, pengurusan izin penelitian, penjajagan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, memilih dan menentukan informan, serta mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan meliputi kegiatan memahami keadaan atau latar penelitian, memilih informan yang dianggap sebagai pusat perhatian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data sesuai dengan tema penelitian serta mencatatnya kedalam catatan lapangan sampai penelitian selesai.

c. Tahap analisis data

Tahap analisis data meliputi menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen secara sistematis.

d. Tahap penulisan laporan

Tahap penulisan laporan ini meliputi melakukan kegiatan observasi, selanjutnya menulis kerangka laporan, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

BAB II
TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

A. Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural yang dipelopori oleh Émile Durkheim dan dikembangkan lebih lanjut oleh Talcott Parsons berangkat dari pandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta keteraturan sosial. Setiap elemen sosial-seperti keluarga, lembaga agama, pendidikan, dan pemerintahan-memiliki fungsi spesifik yang mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam pandangan Durkheim, disfungsi pada salah satu elemen sosial dapat mengganggu stabilitas masyarakat, sementara Parsons menekankan pentingnya *fungsi adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan,* dan *pemeliharaan pola* (AGIL) agar sistem sosial tetap berjalan harmonis.[1]

Penjelasan mengenai cara kerja masing-masing fungsi dapat dijabarkan secara terperinci melalui poin-poin berikut:

1. Adaptasi

   Talcott Parsons menegaskan bahwa adaptasi merupakan prasyarat fungsional yang mewajibkan sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan realitas lingkungan luar.[2] Melalui sub-sistem ekonomi, masyarakat dituntut terampil dalam memproduksi sekaligus mendistribusikan sumber

[1] Herman Arisandi, *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Sosiologi Terkemuka Sepanjang Masa* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2025.), 167–68.

[2] Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe: The Free Press, 1951), 22.

daya material demi keberlanjutan hidup seluruh komponen. Kemampuan adaptasi yang dinamis ini menjadi tameng utama bagi masyarakat agar tidak mengalami kepunahan struktural akibat kegagalan merespons tuntutan zaman. Penyesuaian terhadap gerak lingkungan fisik ini, menurut Saifuddin, tidak boleh bersifat pasif melainkan harus melibatkan manipulasi aktif terhadap sumber daya demi eksistensi sistem itu sendiri.[1] Kelalaian dalam mengeksekusi fungsi ini secara langsung akan memicu kelangkaan sumber daya yang berujung pada kelumpuhan sistemik.

2. Pencapaian Tujuan

Setiap struktur kemasyarakatan wajib memiliki kapasitas kolektif untuk merumuskan sekaligus menggapai sasaran utamanya secara terarah. Otoritas politik dan lembaga pemerintahan, dalam kerangka pemikiran Parsons, memegang peran krusial untuk menetapkan skala prioritas serta memobilisasi seluruh energi warga menuju cita-cita bersama.[2] Pelaksanaan fungsi ini secara konsisten dapat menjauhkan masyarakat dari kondisi anarki atau kebingungan arah. Guna menggerakkan para aktor sosial secara efektif, Happy Susanto berargumen bahwa sinkronisasi antara motivasi personal dan target besar institusi mutlak diperlukan agar sistem terbebas dari ancaman disfungsi.[3] Struktur kolektif ini pada akhirnya dapat berjalan stabil berkat adanya hukum yang mengikat gerak anggotanya.

3. Integrasi

Integrasi menempati posisi sentral sebagai prasyarat fungsional untuk mengoordinasikan hubungan antar-komponen di dalam masyarakat agar tetap padu. Institusi hukum dan komunitas sosial memegang kendali penuh dalam menyelaraskan titik temu ketiga fungsi lainnya adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola sehingga tercipta stabilitas makro. Parsons berpendapat bahwa keterpaduan sistemik ini bertumpu

---

[1] Saifuddin, *Sosiologi Kontemporer: Perkembangan Teori Dan Pemikiran Baru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 84.

[2] Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966), 18.

[3] Happy Susanto, *Pengantar Teori Sosiologi: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: CAPS, 2023), 99.

pada kemampuan regulasi dalam memitigasi potensi benturan sosial melalui penegakan norma-norma kolektif.[4] Sejalan dengan pandangan tersebut, Siahaan mengingatkan bahwa apabila fungsi integrasi ini mengalami keretakan, maka kedamaian transaksional akan goyah dan menyeret sistem ke dalam jurang disintegrasi struktural.[5] Kepatuhan warga terhadap hukum lokal menjadi kunci utama untuk meminimalkan deviasi ini.

4. Pemeliharaan Pola

Fungsi latency bekerja pada level mikro-kultural untuk menjamin nilai-nilai moral dan keyakinan religius tetap terinternalisasi dalam sanubari setiap aktor sosial. Menurut analisis dasar Parsons, fungsionalitas pemeliharaan pola bertindak sebagai penyedia energi kultural tersembunyi yang memastikan individu setia menjalankan perannya tanpa paksaan fisik.[6] Ranah internalisasi ini bertumpu sepenuhnya pada institusi keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan yang bertindak sebagai agen sosialisasi utama. Di tengah derasnya arus modernisasi, Nur Hadi menekankan pentingnya fungsi latency sebagai instrumen preventif yang sangat ampuh dalam meredam ketegangan psikologis sekaligus menjaga stabilitas nilai kemasyarakatan.[7] Pemeliharaan pola yang konsisten akan mempertahankan tatanan kebudayaan asli agar tidak tergerus jaman.

Dalam konteks sosial di pedesaan, teori fungsionalisme struktural dapat digunakan untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga sosial berperan dalam menjaga stabilitas masyarakat ketika menghadapi tantangan seperti meningkatnya angka perceraian pekerja migran. Struktur sosial desa, yang mencakup perangkat pemerintahan, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, serta norma adat dan bekerja bersama untuk menjalankan fungsi pengendalian sosial, edukasi moral, dan dukungan komunitas. Ketika terjadi disfungsi

---

[4] Talcott Parsons, *Politics and Social Structure* (New York: The Free Press, 1969), 84.

[5] Hotman Siahaan, *Strukturalisme Fungsional dalam Sosiologi Modern* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024), 76.

[6] Parsons, *The Social System*, 248.

[7] Nur Hadi, *Sosiologi Hukum Dan Dinamika Masyarakat* (Malang: Madani Media, 2022), 103.

social akibat tekanan ekonomi atau perpisahan keluarga karena migrasi, sistem sosial desa akan berupaya menyesuaikan diri agar keseimbangan dapat dipertahankan. Di sinilah nilai gotong royong, solidaritas, dan norma lokal berperan penting dalam memelihara ketahanan keluarga.

Dalam kaitannya dengan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan, teori fungsionalisme struktural memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami peran program tersebut sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keteraturan masyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan simbolik, tetapi juga menjadi instrumen integratif yang memperkuat nilai komitmen pernikahan dan solidaritas sosial di tengah maraknya perceraian pekerja migran. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat, *Gembok Katresnan* berperan seperti fungsi integrasi dalam teori Parsons yaitu menyatukan elemen-elemen sosial agar tetap harmonis dan berorientasi pada stabilitas. Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural membantu menjelaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan atau edukasi, tetapi juga pada bagaimana struktur sosial desa berfungsi secara sinergis untuk menjaga keseimbangan dan ketahanan sosial masyarakatnya.

B. Integrasi Sosial (Durkheim)

Teori Integrasi Sosial menekankan pentingnya keterikatan dan hubungan sosial antarindividu dalam menjaga keseimbangan serta stabilitas masyarakat. Émile Durkheim, sebagai salah satu tokoh utama teori ini, berpendapat bahwa integrasi sosial yang kuat yakni rasa kebersamaan, solidaritas, dan keterhubungan antar anggota masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah disintegrasi sosial, termasuk konflik dan perceraian dalam keluarga. Dalam konteks keluarga, integrasi sosial berperan sebagai perekat yang menjaga keharmonisan hubungan suami-istri serta memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga melalui nilai-nilai moral, agama, dan norma sosial yang dianut bersama.[8]

[8] Soerjono Soekanto dan Suryono Sukanto, *Sosiologi: suatu pengantar* (RajaGrafindo Persada, 2007), 404.

Dalam masyarakat pedesaan, integrasi sosial tidak hanya tercermin dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam peran komunitas yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan sosial. Ketika muncul tantangan seperti meningkatnya angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran, integrasi sosial menjadi kunci dalam membangun sistem dukungan sosial yang efektif. Keterlibatan tokoh agama, perangkat desa, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam memberikan bimbingan serta dukungan moral merupakan wujud nyata dari proses integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial masyarakat.

Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan merupakan contoh konkret penerapan prinsip integrasi sosial dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga. Program ini tidak hanya menekankan pada komitmen pasangan suami-istri melalui simbol "gembok cinta," tetapi juga membangun kembali ikatan sosial antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa. Melalui kegiatan edukatif, penyuluhan, serta nilai-nilai lokal yang diangkat dalam program ini, masyarakat diajak untuk saling mendukung dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, *Gembok Katresnan* berperan sebagai sarana integratif yang menghubungkan nilai budaya, norma sosial, dan komitmen keluarga, sehingga memperkuat hubungan sosial sekaligus menekan angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran.

C. Adaptasi dan Ketahanan Sosial

menjelaskan bagaimana suatu struktur sosial mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tekanan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam konteks desa, teori ini berfokus pada kemampuan komunitas lokal untuk mempertahankan keseimbangan sosial melalui proses penyesuaian terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan ekonomi, budaya, dan relasi sosial akibat meningkatnya jumlah pekerja migran. Ketika anggota masyarakat, khususnya laki-laki atau perempuan, bekerja ke luar negeri, desa menghadapi perubahan dalam struktur peran keluarga dan hubungan sosial. Dalam kondisi tersebut, mekanisme adaptasi sosial menjadi penting agar

nilai-nilai sosial dan sistem dukungan masyarakat tetap berfungsi secara optimal.[9]

Dalam kerangka ini, masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai aktor aktif yang membangun strategi adaptif untuk menjaga ketahanan sosial. Misalnya, munculnya peran tokoh agama, perangkat desa, dan lembaga lokal seperti majelis taklim atau kelompok perempuan menjadi bagian dari sistem penopang yang membantu keluarga migran dalam menghadapi tekanan sosial dan emosional. Melalui kegiatan sosial, pendidikan nilai, serta dukungan komunitas, desa mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial baru yang ditimbulkan oleh fenomena migrasi dan perpisahan fisik antaranggota keluarga. Proses adaptasi ini mencerminkan kemampuan sistem sosial desa dalam menyeimbangkan fungsi sosialnya agar stabilitas dan keharmonisan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, teori adaptasi dan ketahanan sosial.[10] juga relevan untuk memahami bagaimana program sosial berbasis lokal seperti *Gembok Katresnan* dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Program ini merupakan bentuk inovasi sosial yang menunjukkan respons adaptif masyarakat terhadap meningkatnya kasus perceraian akibat pekerja migran. Melalui simbolisme budaya dan nilai-nilai lokal, program ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif terhadap perceraian, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antar warga. Dengan demikian, teori adaptasi dan ketahanan sosial membantu menjelaskan bagaimana struktur sosial desa Bringinan mampu bertransformasi secara dinamis, mempertahankan nilai-nilai sosialnya, dan membangun ketahanan kolektif dalam menghadapi perubahan sosial yang komplek.

---

[9] Elok Anggraini, *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang*, 4, no. 1 (2024): 12.

[10] Theresia Martina Marwanti, "ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan sosial komunitas adat kampung pulo di kabupaten garut," *Pekerjaan Sosial* 16, no. 2 (2017): 12, https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.113.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM *GEMBOK KATRESNAN* BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DESA BRINGINAN JAMBON

A. Profil Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa

Desa Bringinan merupakan sebuah wilayah berkembang yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Menariknya, desa ini secara administratif memiliki memori kolektif terkait pemekaran wilayah; dulunya Bringinan berada di bawah naungan Kecamatan Sumoroto. Namun, karena luasnya wilayah Sumoroto saat itu, dibentuklah Kecamatan Jambon sebagai hasil pemecahan wilayah, dan Bringinan pun beralih menjadi bagian dari kecamatan baru tersebut hingga saat ini sebagai desa yang terus bersolek mengikuti zaman.

Secara geografis, desa seluas 138,77 hektar ini menempati posisi strategis sebagai lahan tadah hujan pada ketinggian sekitar 126 meter di atas permukaan laut. Kehidupan di sini berdenyut dalam ritme yang harmonis, di mana mayoritas penduduknya yang beragama Islam menggantungkan hidup sebagai penggarap sawah, pedagang, hingga abdi negara. Di tengah pemukiman ini pula berdiri kokoh SDN 1 Bringinan, sebuah institusi pendidikan yang tidak hanya menjadi satu-satunya di desa, tetapi juga menyandang status sebagai salah satu sekolah dasar tertua di seluruh wilayah Kecamatan Jambon.

Seperti halnya desa-desa di tanah Jawa yang sarat akan makna, sejarah Bringinan tidak bisa dilepaskan dari jalinan tradisi lisan dan mitos yang diwariskan turun-temurun dari mulut ke mulut. Kekuatan narasi lisan ini menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan masa kini, di mana setiap sudut desa seringkali dihubungkan dengan cerita keramat atau dongeng yang membentuk karakter khas masyarakatnya. Meskipun terkadang sulit dibuktikan secara fakta empiris karena

narasumber primer telah tiada, mitos-mitos inilah yang justru menjadi nyawa bagi identitas kultural Bringinan, memberikan rasa kepemilikan bagi setiap warga terhadap tanah kelahiran mereka yang dianggap memiliki nilai spiritual tinggi.

Meskipun bukti sejarah tertulis yang absolut sulit ditemukan, jejak langkah para leluhur tetap hidup melalui memori kolektif para sesepuh. Kisah ini bermula sekitar tahun 1700-an, ketika sekelompok pengelana dari Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, melakukan perjalanan jauh ke arah timur. Rombongan ini dipimpin oleh sosok ulama dan tokoh berpengaruh bernama Ki Ageng Kerto Muhammad, atau yang juga dikenal sebagai Mbah Pendem, yang secara silsilah merupakan cucu atau buyut dari Ki Ageng Pandanaran, Sang Bupati Semarang yang mashur.

Misi utama Ki Ageng Kerto Muhammad beserta para kerabatnya adalah membuka lahan hutan atau *babat alas* untuk dijadikan sebuah perkampungan baru yang layak huni. Proses penebangan pohon dan pembersihan semak belukar ini dimulai dari ujung paling selatan, perlahan-lahan bergerak maju secara teratur menuju arah utara. Di tengah teriknya matahari dan kerja keras membuka belantara yang rimbun, perhatian mereka tertuju pada sebatang pohon beringin yang tumbuh sangat besar dengan tajuk yang sangat rindang, seolah-olah memberikan perlindungan alami di tengah hutan.

Pohon beringin raksasa tersebut akhirnya menjadi titik sentral bagi sang tokoh. Setiap kali merasa lelah dalam proses penebangan, Ki Ageng Kerto Muhammad selalu memilih berteduh dan beristirahat di bawah naungan pohon tersebut, merasakan kesejukan yang tidak ditemukan di tempat lain.

Setelah seluruh lahan berhasil dibuka, Ki Ageng Kerto Muhammad mengumpulkan para kerabatnya untuk merundingkan nama bagi wilayah pemukiman baru tersebut agar memiliki jati diri. Awalnya, wilayah ini diberi nama "Bringinan" sebagai penghormatan terhadap pohon beringin tadi. Namun, salah satu kerabat beliau yang bernama

Nyai Rengik memberikan masukan agar nama tersebut diubah karena pengucapannya yang dianggap kurang luwes atau sulit dilafalkan oleh lisan masyarakat umum. Melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, nama tersebut akhirnya disempurnakan menjadi Bringinan, sebuah nama yang lebih mantap dan mudah diingat.

Hingga saat ini, identitas desa tersebut melekat kuat pada nama Bringinan sebagai simbol keteduhan dan tempat bernaung. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa sang pembuka wilayah, makam Ki Ageng Kerto Muhammad yang terletak di sebelah barat lapangan Desa Bringinan masih dirawat dengan penuh takzim. Makam ini tidak sekadar menjadi situs religi atau objek wisata ziarah, tetapi juga menjadi pengingat abadi bagi warga tentang akar sejarah, perjuangan, dan karakter kerja keras yang diwariskan oleh sang leluhur dari tanah Klaten tersebut.

Usai kesepakatan nama desa disetujui oleh orang bersangkutan desa berjalan sesuai ketentuan dan setelah Indonesia merdeka desa Bringinan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan yaitu :

Tabel 1

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Lengkap	Masa Jabatan	Jabatan
1.	Ki Ageng Kerto Muhammad	-	Palang
2.	Joyo Leksono	-	Palang
3.	Karso Leksono	-	Palang
4.	Soleksono	-	Palang
5.	Sarifin	- 1918	Bekel
6.	Saban	1918 – 1962	Kepala Desa
7.	Muljono	1990 – 1998	Kepala Desa
8.	Bandi	1998 – 2006	Kepala Desa
9.	Jemirin	2006 – 2007	Pj. Kepala Desa
10.	Sugiyono	2007 – 2013	Kepala Desa

11.	Barno	2013 – 2026	Kepala Desa

Sumber : monografi desa

2. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Desa Bringinan

1) Visi Desa Bringinan

Terwujudnya Guyub, Rukun, Ayem Tentrem Menuju Masyarakat Yang Cerdas, Terukur, Terkendali Dan Berprestasi

2) Misi Desa Bringinan

a) Peningkatan pelayanan masyarakat yang berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.

b) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas;

c) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive dan demokratis.

d) Peningkatan pembangunan insfrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

e) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, Pertanian, Peternakan, dan Pariwisata serta Perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.

f) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

g) Terciptanya Desa Bringinan Guyup, Rukun, Ayem Tentrem, Aman, Maju dan Indah.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Pemerintahan Desa Bringinan memiliki 8 (Delapan) agaenda utama yaitu

a) Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.

b) Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.

c) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive dan demokratais.
d) Peningkatan pembangunan insfrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
e) Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
f) Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemrintah.
g) Terciptanya kerukunan dana kedamaian serta sinergitas dan harmoisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Ponorogo.
h) Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Ponorogo melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

3. Kondisi Demografis Obyek Penelitian

a. Batas Desa

Secara administratif, Desa Bringinan merupakan wilayah berkembang yang terletak sekitar 9 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Jambon dengan luas wilayah mencapai 138,770 hektar. Desa ini memiliki batas-batas wilayah yang bersinggungan langsung dengan Desa Sendang di sebelah utara, Desa Poko di sebelah barat, serta berbatasan dengan wilayah Kecamatan Balong, yakni Desa Ngumpul di sisi selatan dan Desa Sedarat di sisi timur. Dengan total penduduk sebanyak 1.254 jiwa, tata kelola wilayah Bringinan terbagi secara efektif ke dalam 3 dusun, 6 RW, dan 3 RT. Adapun denyut nadi pemerintahan desa ini terpusat di Dukuh Dondong, tepatnya pada RT 02 RW 02, yang menempati area perkantoran strategis seluas 1.400 m2.

b. Kondisi Cuaca dan Iklim

Faktor fisik yang diperlukann untuk merencanakan area adalah Topografi, Geologi, Hidrografi dan keterbatasan fisik. Topografi adalah ilmu yag mempelajari bentuk permukaan bumi yang biasanya memperlihatkan relief permukaan. Topografi Desa Bringinan sebagian besar terdiri dari wilayah datar. Iklim adalah nilai rata-rata keadaan alam diudara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai desa di sektor pertanian, iklim memiliki pengaruh yang cukup besar, misalnya dalam menentukan masa tanam. Desa Bringinan umumnya memiliki iklim tropis, dengan ketinggian ± 126M da kisaran suhu 32º - 35º Celcius.

c. Jenis Tanah

Bentang alam Desa Bringinan didominasi oleh wilayah dataran rendah yang subur, di mana sektor agraris menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan sawah yang relatif luas untuk tanaman semusim. Berdasarkan data komoditas pertanian tahun 2019, padi menjadi primadona utama dengan luas lahan panen mencapai 88,38 hektar yang mampu menghasilkan produksi sebesar 95 kuintal dengan volume produktivitas 665 kwt/ha. Selain padi, komoditas jagung juga diusahakan secara intensif di atas lahan seluas 42,5 hektar dengan total produksi 425 kuintal. Keragaman hasil bumi desa ini juga didukung oleh penanaman kacang tanah seluas 15 hektar, kacang hijau seluas 5 hektar, serta berbagai tanaman pendukung lainnya di atas lahan seluas 15 hektar yang seluruhnya dikelola secara adaptif sesuai dengan kondisi lahan yang ada.

4. Gambaran Geografis

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Analisis profil kependudukan Desa Bringinan menurut golongan umur menunjukkan struktur masyarakat yang sangat beragam dengan total penduduk sebanyak 1.254 jiwa, yang terdiri dari 616 laki-laki dan 638 perempuan. Berdasarkan data tersebut, angkatan kerja potensial di desa ini tergolong cukup besar, di mana kelompok usia produktif antara 19 hingga 60 tahun mendominasi populasi dengan jumlah mencapai 782 jiwa, sementara kelompok lansia di atas 61 tahun tercatat sebanyak 180 jiwa. Di sisi lain, regenerasi penduduk juga terus berjalan melalui kelompok usia anak-anak dan remaja, mulai dari kategori bayi (0-12 bulan) sebanyak 71 jiwa hingga kelompok pelajar dan remaja (5-18 tahun) yang berjumlah 211 jiwa, yang secara keseluruhan memberikan gambaran komprehensif mengenai laju pertumbuhan penduduk serta potensi sumber daya manusia yang tersedia untuk pembangunan desa di masa depan.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia di Desa Bringinan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari total 1.254 jiwa penduduk, profil pendidikan masyarakat tersebar dalam berbagai jenjang dengan rincian 373 orang merupakan lulusan SD, 236 orang lulusan SLTP, dan 176 orang telah menyelesaikan jenjang SLTA/SMK. Meskipun terdapat 19 orang yang telah menempuh jalur Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan intelektual, terdapat pula kelompok sebanyak 488 jiwa yang masuk dalam kategori belum, tidak, atau sudah tidak sekolah. Data ini memberikan gambaran strategis bagi pemerintah desa dalam memetakan potensi angkatan kerja serta merancang program peningkatan literasi dan keterampilan masyarakat demi menjamin kelancaran proses pembangunan di masa depan.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Struktur ekonomi Desa Bringinan sangat bertumpu pada sektor agraris, di mana bidang pertanian memegang peranan krusial sebagai urat nadi penghidupan mayoritas masyarakatnya. Dominasi ini terlihat jelas dari jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 441 orang dan buruh tani sebanyak 250 orang, yang jika digabungkan menjadi kelompok mata pencaharian terbesar di desa tersebut. Selain sektor lahan basah, dinamika ekonomi desa juga diperkuat oleh 388 warga yang bergerak di bidang wiraswasta, 80 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyumbang devisa bagi desa, serta 50 tenaga terampil sebagai tukang batu atau kayu. Selebihnya, komposisi pekerjaan penduduk tersebar secara variatif mulai dari pedagang sebanyak 35 orang, hingga segmen kecil dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan, serta anggota TNI/Polri yang turut menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di desa.

5. Gambaran Sosial Budaya

Dinamika sosial di Desa Bringinan kini mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin terbuka, di mana masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kontestasi politik lokal maupun nasional seperti pemilihan kepala desa, Pilkada, hingga Pilpres. Perubahan sistem politik ini mendorong warga untuk menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, modernisasi politik tidak melunturkan nilai luhur yang telah mengakar sejak zaman dahulu, yakni budaya gotong-royong atau yang akrab disebut "sambatan". Tradisi ini masih terjaga kuat dalam berbagai aspek pembangunan fisik, mulai dari mendirikan rumah warga, membangun masjid, hingga perbaikan jembatan, yang semuanya dikerjakan dengan semangat kebersamaan yang tulus.

Nuansa religiusitas di Desa Bringinan menghadirkan perpaduan harmonis antara ajaran Islam dengan tradisi Jawa yang kental. Hal ini tercermin dalam penggunaan kalender Jawa-Islam sebagai acuan

berbagai ritual adat seperti *slametan*, *tahlilan*, hingga *mitoni* yang terus dilestarikan sebagai refleksi kultural masyarakat setempat. Namun, seiring dengan derasnya arus informasi global, tradisi lama ini mulai mendapatkan tafsir baru dan respons kritis dari generasi muda. Fenomena ini menandai babak baru dalam dinamika sosiokultural desa, yang di satu sisi memperkaya wacana intelektual, namun di sisi lain menuntut kearifan kolektif agar perbedaan pandangan tidak memicu kerawanan atau konflik sosial di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan identitas, Desa Bringinan memegang teguh warisan seni budaya sebagai modal dasar pembangunan dan promosi daerah di tingkat nasional. Kekayaan seni seperti Reog Ponorogo, Gajah-gajahan, dan Karawitan bukan sekadar tontonan, melainkan bagian integral dari setiap hajatan, peringatan hari besar, serta sarana pelatihan bagi warga desa. Selain kesenian, terdapat pula tradisi unik berupa ritual tabur bunga yang dilaksanakan secara rutin setahun sekali setiap tanggal 1 Sura atau Tahun Baru Hijriah. Keberagaman ekspresi budaya ini menjadi perekat sosial sekaligus identitas unik yang membedakan Desa Bringinan dengan wilayah lainnya.

B. Paparan Data Tentang Desain, Dasar Hukum, dan Mekanisme Pelaksanaan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan

Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan merupakan sebuah inovasi kebijakan lokal yang lahir dari keprihatinan terhadap tingginya potensi konflik rumah tangga pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pendekatan komprehensif yang memadukan aspek administratif, psikologis, dan spiritual. Kepala Desa Bringinan, Bapak Barno, menjelaskan bahwa program ini memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat desa guna memberikan perlindungan nyata bagi warga:

> Program Gembok Katresnan ini sebenarnya merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa tahun 2019 untuk melindungi warga kami yang menjadi pekerja migran. Alur kegiatannya kami mulai dari tahap pelaporan wajib bagi siapa pun yang hendak berangkat, dilanjutkan dengan pertemuan keluarga di kantor desa untuk penandatanganan berkas bersama pasangan. Dalam pertemuan tersebut, kami memberikan nasihat dari hati ke hati mengenai tujuan bekerja serta cara menjaga keutuhan rumah tangga, yang kemudian diakhiri dengan prosesi simbolis pemasangan gembok bersama di papan khusus sebagai pengikat batin. Melalui rangkaian kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang merantau memiliki landasan komitmen yang kuat dan perlindungan dokumen yang jelas sebelum meninggalkan keluarga di desa.[1]

Secara yuridis, program ini diperkuat melalui Peraturan Kepala Desa Bringinan Nomor 6 Tahun 2023 yang menginstruksikan kewajiban operasional bagi pasangan yang hendak menjadi PMI. Bapak Jemirin selaku Sekretaris Desa sekaligus Anggota Komunitas KOPI (Komunitas Purna PMI), menegaskan bahwa program ini telah menjadi kebijakan resmi desa yang melibatkan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

> "Desa sangat mendukung karena sudah ada aturannya (Perdes/Perkades) tentang perlindungan PMI. Jadi program ini bukan cuma seremoni saja, tapi sudah jadi kebijakan resmi yang diawasi oleh pemerintah desa dan BPD."[2]

Tahap perencanaan dimulai dari pendataan yang ketat di Balai Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas dokumen kependudukan sebelum warga berangkat ke luar negeri. Bapak Kadeni, Sekretaris Komunitas KOPI, memaparkan prosedur awal tersebut:

> "Calon PMI datang ke balai desa untuk menyerahkan surat-surat seperti KTP dan KK agar datanya bener dan nggak ada yang dipalsukan. Pas data sudah beres, dilanjutkan dengan komunikasi di ruang KOPI untuk membahas rencana cari uang di luar negeri, tujuannya biar hasilnya nanti jadi modal usaha, bukan cuma habis buat pamer atau beli mobil. Nah, buat yang sudah punya pasangan, ada acara pasang gembok bersama di papan bentuk hati di ruang Pak Lurah sebagai simbol janji setia."[3]

---

[1] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[2] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[3] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026

Proses perencanaan ini juga melibatkan bimbingan mental dan spiritual bagi pasangan yang akan menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*). Bapak Barno selaku Modin Desa Bringinan, menjelaskan filosofi di balik nama program ini:

> "Jadi begini, Program Gembok Katresnan itu sebenarnya cara kami di desa untuk menjaga supaya hubungan antar warga, terutama suami-istri dan keluarga yang ditinggal merantau mencari nafkah diluar negeri, tetap rukun dan kuat. Katresnan itu kan artinya kasih sayang, jadi kami ingin kasih sayang itu terkunci rapat dan tidak mudah lepas."[4]

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan secara masif melalui berbagai lini, baik melalui forum resmi desa maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Bapak Sarni, Ketua Komunitas KOPI, menyebutkan efektivitas komunikasi di desa:

> "Pak Barno selaku Kepala Desa selalu menyelipkan pembahasan soal KOPI dan Gembok Katresnan di setiap pertemuan besar atau musyawarah desa. Karena desa kita tidak terlalu besar, informasi jadi cepat sampai dan masyarakatnya kompak."[5]

Selain itu, pendekatan sosial budaya melalui kegiatan keagamaan menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan pemahaman program kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadeni:

> "Pak Barno (Kepala Desa) sering mensosialisasikan program ini di pertemuan warga atau acara lingkungan seperti yasinan dan arisan. Intinya, kami berusaha lewat jalur formal (kantor desa) maupun sosial supaya mereka ingat komitmen awalnya."[6]\

Penerimaan masyarakat terhadap tahap perencanaan ini tergolong sangat positif. Ibu Amin, salah satu keluarga PMI yang suaminya bekerja di Brunei Darussalam, menceritakan pengalamannya mengikuti prosedur tersebut:

> "Saya dan suami merasa sangat terbantu mengikuti program Gembok Katresnan di kantor desa sebelum beliau berangkat menjadi buruh migran ke Brunei Darussalam tiga bulan yang lalu. Sebelum keberangkatan, kami mengikuti wawancara bersama Pak Lurah dan

[4] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[5] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[6] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026

> pengurus KOPI untuk memastikan kelengkapan dokumen serta menerima arahan mengenai cara menjaga kerukunan rumah tangga selama terpisah jarak."[7]

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, adanya program Gembok Katresnan di Desa Bringinan merupakan sebuah inovasi kebijakan lokal yang lahir dari keprihatinan terhadap tingginya potensi konflik rumah tangga pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pendekatan komprehensif yang memadukan aspek administratif, psikologis, dan spiritual melalui landasan hukum Peraturan Desa tahun 2019. Alur kegiatannya dimulai dari tahap pelaporan wajib, pertemuan keluarga untuk validasi dokumen, hingga pemberian nasihat dari hati ke hati mengenai cara menjaga keutuhan rumah tangga yang diakhiri dengan prosesi simbolis pemasangan gembok di papan khusus sebagai pengikat batin. Melalui sinergi antara pemerintah desa, komunitas KOPI, dan tokoh agama, sosialisasi dilakukan secara masif baik melalui forum resmi maupun kegiatan sosial keagamaan seperti yasinan dan arisan untuk menanamkan komitmen kuat bagi warga yang hendak merantau.

Penerimaan masyarakat terhadap tahap perencanaan ini tergolong sangat positif, sebagaimana dirasakan oleh para keluarga PMI yang merasa terbantu dengan adanya arahan mengenai tata cara menjaga kerukunan selama terpisah jarak. Penetapan sasaran program Gembok Katresnan didasarkan pada pemetaan kerentanan sosial di Desa Bringinan. Target utama dari program ini adalah pasangan suami-istri yang akan menjalani hubungan jarak jauh (LDR) demi pekerjaan. Kelompok ini dipilih karena dianggap paling rawan mengalami masalah keretakan rumah tangga akibat kendala komunikasi dan jarak, sehingga melalui pendampingan ini, desa berharap tujuan warga merantau untuk menyejahterakan keluarga tidak mengorbankan keutuhan kasih sayang yang telah dikunci rapat dalam semangat Katresnan.

[7] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

Sesuai dengan Pasal 3 Bab III Perkades Nomor 6 Tahun 2023, Gembok Katresnan diwajibkan bagi pasangan suami-istri yang salah satu atau keduanya akan menjadi PMI sebagai tanda atau simbol kekuatan cinta seutuhnya. Bapak Sarni menjelaskan latar belakang pemilihan target ini Bapak Sarni selaku Ketua Komunitas KOPI menjelaskan latar belakang pemilihan target ini berdasarkan pengalaman masa lalu:

> "Target utamanya adalah keluarga PMI. Dulu kan ada kejadian warga meninggal di luar negeri, padahal sudah punya anak dengan majikannya meski belum cerai dari pasangan di sini. Akhirnya kami dari KOPI bantu urus asuransi kematian dan jaminan pendidikan anaknya sampai kuliah."[8]

Hal ini dipertegas oleh Bapak Kadeni yang menyebutkan bahwa fokus utama adalah menjaga keharmonisan komunikasi antar pasangan:

> "Targetnya ya pasangan suami-istri. Kami berikan saran-saran supaya komunikasi mereka tetap bagus meski jauh-jauhan (LDR) agar rumah tangga tetap harmonis."[9]

Bapak Darmaji, sebagai perwakilan dari keluarga PMI, juga merasakan langsung dampak dari pengarahan yang diberikan oleh perangkat desa terhadap kesiapan mental keluarga:

> "Targetnya ya calon PMI dan suami atau istri yang ditinggal di desa. Tujuannya supaya kami sepakat soal cara komunikasi, urusan kiriman uang, dan yang paling penting adalah kesetiaan. Pak Kamituwo dan Pak Kadeni dari KOPI yang langsung kasih pengarahan supaya keluarga tidak pecah."[10]

Bapak Barno selaku Modin Desa Bringinan memaparkan lebih detail mengenai kelompok sasaran ini. Beliau menekankan bahwa pemilihan kelompok migran didasarkan pada tantangan berat yang mereka hadapi di luar negeri:

> "Sasaran utama dari kegiatan Gembok Katresnan seperti bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, dan pembinaan agama adalah para warga Desa Bringinan yang tengah merantau sebagai Pekerja

[8] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[9] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[10] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026

> Migran Indonesia (PMI) beserta keluarga atau pasangan yang mereka tinggalkan di rumah. Kelompok ini dipilih secara khusus karena mereka memiliki tantangan komunikasi dan jarak yang cukup berat yang sering kali memicu keretakan rumah tangga, sehingga melalui forum komunikasi jarak jauh dan pembinaan agama, kami ingin memastikan bahwa meski jauh di luar negeri demi mencari nafkah, ikatan batin dan fondasi iman mereka tetap kuat untuk menjaga kesetiaan. Dengan membekali calon pengantin migran melalui bimbingan pranikah yang matang, desa berharap mereka memiliki kesiapan mental untuk menghadapi ujian perpisahan sementara, sehingga tujuan merantau untuk menyejahterakan keluarga tidak mengorbankan keutuhan kasih sayang yang telah dikunci rapat dalam semangat Katresnan."[11]

Selain pasangan PMI, program ini juga merangkul tokoh-tokoh kunci di masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendukung. Bapak Barno selaku Kepala Desa menjelaskan keterlibatan purna-PMI dalam pendampingan ini:

> "Target utama dari setiap kegiatan dalam Gembok Katresnan ini tentu saja pasangan suami-istri yang salah satunya akan berangkat menjadi pekerja migran, karena mereka adalah pondasi utama keluarga yang paling rentan terkena ujian jarak jauh. Kami memilih kelompok ini agar sejak awal mereka memiliki kesiapan mental, kelengkapan dokumen yang sah, serta komitmen yang kuat melalui bimbingan agama dan arahan dari desa. Selain itu, kami juga merangkul para purna-pekerja migran dan tokoh masyarakat sebagai pendamping agar mereka bisa ikut mengawasi serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemilihan ini bertujuan supaya ada kerja sama yang rukun di lingkungan desa dalam menjaga keutuhan rumah tangga warga kami, sehingga keberangkatan ke luar negeri dapat membawa kesejahteraan tanpa merusak keharmonisan keluarga."[12]

Penetapan sasaran program Gembok Katresnan didasarkan pada pemetaan kerentanan sosial yang mendalam di Desa Bringinan, di mana target utamanya adalah pasangan suami-istri yang akan menjalani hubungan jarak jauh (LDR). Fokus pada kelompok ini dipicu oleh pengalaman masa lalu terkait konflik rumah tangga dan tantangan komunikasi berat yang sering kali berujung pada keretakan keluarga. Melalui bimbingan pranikah, penguatan mental, serta pembinaan agama, desa berupaya membekali calon pekerja migran dan pasangan yang ditinggalkan agar memiliki kesepakatan

[11] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[12] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

yang jelas mengenai pola komunikasi, pengelolaan keuangan, dan komitmen kesetiaan. Hal ini bertujuan agar misi ekonomi di luar negeri dapat berjalan selaras dengan keutuhan kasih sayang yang telah dikunci rapat dalam semangat Katresnan tanpa harus mengorbankan keharmonisan keluarga.

Selain menyasar pasangan PMI, program ini juga merangkul para purna-pekerja migran dan tokoh masyarakat sebagai pendamping untuk memberikan dukungan moral serta pengawasan di lingkungan desa. Dalam pelaksanaan program Gembok Katresnan, koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas purna-migran (KOPI) menjadi kunci keberhasilan. Sinergi ini menciptakan ekosistem pendukung yang kuat, di mana tokoh agama berperan dalam penguatan fondasi iman, sementara komunitas KOPI dan perangkat desa hadir menyediakan ruang mediasi serta pendampingan dokumen yang sah. Kerja sama yang rukun antar berbagai elemen ini memastikan bahwa setiap keluarga PMI mendapatkan perlindungan sosial dan batin yang menyeluruh guna menjaga stabilitas serta kerukunan di tingkat desa. Bapak Barno (Modin) menjelaskan peran strategis tokoh agama sebagai penjaga moral:

> "Tokoh Agama dan perangkat desa berperan sebagai penjaga sekaligus penengah, di mana Tokoh Agama rutin memberikan bimbingan mengenai pentingnya menjaga amanah dan kesetiaan sebagai ibadah bagi warga yang merantau. Sementara itu, perangkat desa hadir menyediakan ruang mediasi kekeluargaan jika terjadi kesalahpahaman jarak jauh, guna memastikan bahwa hubungan antara PMI di luar negeri dan keluarga di Desa Bringinan tetap rukun serta terlindungi secara sosial."[13]

Peran aktif Kepala Desa sebagai motivator juga dirasakan sangat kuat oleh para keluarga yang ditinggalkan. Bapak Barno (Kepala Desa) selalu mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas desa melalui kerukunan keluarga:

> "Intinya, kami ingin menunjukkan kalau desa itu peduli. Saya dan teman-teman perangkat sering kasih motivasi. Kami ingatkan terus, sesibuk apa pun di sana, keluarga di rumah jangan sampai dilupakan.

[13] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

> Kita jaga bareng-bareng biar stabilitas desa juga tetap tenang dan rukun."[14]

Ibu Amin menambahkan bahwa peran tokoh agama dan pengurus desa memberikan rasa aman dan penguatan mental bagi dirinya yang harus menjalani hubungan jarak jauh:

> "Selain kami, pengurus desa, komunitas KOPI dan tokoh agama juga dilibatkan untuk memberikan pembinaan agar komitmen kesetiaan dapat terjaga demi keutuhan keluarga. Tokoh tersebut dipilih agar ada kerja dalam memastikan bahwa keberangkatan suami ke luar negeri tidak hanya membawa pulang rezeki, tetapi juga tetap menjaga kerukunan rumah tangga kami di desa."[15]

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, sinergi peran strategis antara tokoh agama, perangkat desa, dan komunitas KOPI dalam program Gembok Katresnan berfungsi sebagai penjaga moral dan mediator yang memberikan rasa aman serta penguatan mental bagi keluarga PMI. Penggunaan simbol gembok dalam program ini bukan sekadar aksesoris, melainkan memiliki kedalaman makna sebagai representasi kesetiaan dan pengikat batin yang memastikan adanya bimbingan spiritual mengenai amanah, penyediaan ruang mediasi kekeluargaan, serta motivasi berkelanjutan dari pemerintah desa guna menjaga kerukunan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat Desa Bringinan.. Bapak Sarni menjelaskan bahwa gembok melambangkan kunci keberhasilan dalam berumah tangga:

> "Gembok itu simbol kunci supaya ikatan cinta mereka tetap kuat dan melekat sebagai kunci kebersamaan. Kunci sukses berkeluarga itu dipegang oleh masing-masing pasangan. Katresnan itu sendiri adalah lambang kasih sayang. Nyatanya, dengan adanya simbolis ini, angka perceraian memang berkurang."[16]

Makna visual dari dua gembok yang dikaitkan pada papan berbentuk hati juga diuraikan oleh Bapak Kadeni sebagai simbol penyatuan dua hati yang tidak terpisahkan oleh jarak:

---

[14] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[15] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[16] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026

> "Gembok itu artinya mengikat, sementara Katresnan itu rasa cinta dan kesetiaan. Jadi, dua gembok yang dikaitkan itu simbol bahwa hubungan suami-istri harus tetap nyambung dan utuh. Papan berbentuk 'waru' tempat gembok itu juga melambangkan kasih sayang."[17]

Bagi warga yang menjalani, seperti Bapak Darmaji, simbol ini menjadi pengingat harian akan janji suci yang telah diucapkan di hadapan perangkat desa:

> "Bagi saya, tujuannya ya cari rejeki buat keluarga karena sudah sah jadi suami-istri. Meskipun istri jauh di sana, kami harus ingat janji seperti simbol gembok itu. Apalagi di sini hampir 70% warganya jadi PMI, semua tujuannya sama, cari nafkah."[18]

Bapak Barno (Modin) memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai etimologi dan fungsi psikologis dari simbol tersebut bagi para pekerja migran:

> "Makna filosofis Gembok Katresnan terletak pada kata Gembok sebagai perlambang untuk mengunci rapat kesetiaan agar tidak tergoda pihak lain, dan Katresnan yang berarti kasih sayang tulus yang menjadi pengikat meski terpisah jarak. Simbol ini secara nyata bagi keluarga PMI dilakukan melalui prosesi penguncian gembok nama pasangan di desa sebelum berangkat merantau, yang berfungsi sebagai komitmen bahwa di mana pun mereka bekerja, hati mereka telah terkunci dan tertinggal di rumah demi kesejahteraan keluarga di Desa Bringinan."[19]

Ibu Amin juga menambahkan bahwa keberadaan gembok tersebut di kantor desa menciptakan ikatan batin yang kuat, sehingga pasangan merasa "diawasi" oleh komitmennya sendiri:

> "Bagi saya, gembok itu ya simbol supaya hubungan kami tetap langgeng. Jadi pas suami di Brunei, dia ingat kalau ada 'gembok cinta' di kantor desa yang harus dijaga. Ini semacam pengingat batin biar nggak macam-macam di sana. Program ini bukan sekadar adat-adatan saja, tapi memang sudah diatur resmi lewat Peraturan Kepala Desa. Jadi pemerintah desa memang serius mau melindungi keluarga para pekerja migran di sini."[20]

Dalam konteks administratif, Pasal 4 Perkades Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemasangan gembok dilakukan setelah adanya

---

[17] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[18] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[19] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[20] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

wawancara dan penandatanganan surat izin suami atau istri dihadapan Pemerintah Desa. Bapak Sarni menyebutkan bahwa data perubahan kondisi rumah tangga telah terdokumentasi di desa:

> "Sudah ada datanya di desa. Sebelum ada program ini, angka perceraian cukup diperhatikan, tapi sekarang penurunannya luar biasa bagus. Program ini dibuat memang supaya masyarakat sadar dan bisa menjaga keutuhan rumah tangga."[21]

Bapak Kadeni menjelaskan bahwa pencatatan ini juga berkaitan dengan sistem mediasi yang wajib dilalui warga di tingkat desa sebelum menempuh jalur hukum formal:

> "Sekarang kalau ada yang mau cerai, mereka harus lewat desa dulu untuk dimediasi dan dipanggil masing-masing pihak agar tidak langsung ke pengadilan atau pengacara."[22]

Dukungan data administratif ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Barno (Modin). Beliau menyebutkan bahwa perangkat desa secara rutin mencatat laporan kependudukan di buku besar desa:

> "Tentu, mengenai data tersebut, perangkat desa memang mencatat laporan kependudukan di buku besar desa, termasuk perubahan status perkeluargaan warga yang merantau. Sejak program Gembok Katresnan berjalan, kami melihat adanya kecenderungan penurunan angka perselisihan dan perceraian keluarga PMI yang cukup baik, di mana sebelumnya kasus perceraian sering dipicu oleh kurangnya komunikasi jarak jauh dan masalah pengelolaan kiriman uang."[23]

Hal senada disampaikan oleh Ibu Amin yang mengetahui adanya pencatatan rutin terhadap kejadian-kejadian di lingkungan desa, termasuk status pernikahan:

> "Mengenai data pastinya, pihak kantor desa dan pengurus KOPI memang selalu mencatat setiap kejadian di lingkungan kami, termasuk angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran. Setahu saya dari penjelasan Pak Lurah saat pertemuan warga, sejak program Gembok Katresnan ini dijalankan, angka perceraian di desa kami memang mengalami penurunan."[24]

---

[21] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[22] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[23] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[24] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

Terakhir, Bapak Barno selaku Kepala Desa menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki basis data untuk memantau perubahan status warga sejak diberlakukannya regulasi desa tahun 2019:

> "Kami di pemerintah desa memang selalu mencatat data setiap perubahan status warga, termasuk laporan dari pengurus KOPI mengenai kondisi rumah tangga para pekerja migran di Desa Bringinan. Sejak Perdes tahun 2019 dan program Gembok Katresnan ini kami jalankan, kami melihat adanya penurunan angka perceraian yang cukup membanggakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya."[25]

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Gembok Katresnan memiliki kekuatan pada aspek simbolis dan administratif yang saling berintegrasi dalam menjaga keutuhan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Secara filosofis, penggunaan gembok dan papan berbentuk hati (waru) bukan sekadar simbol visual, melainkan sebuah instrumen psikologis yang merepresentasikan komitmen, kesetiaan, dan kasih sayang yang "terkunci" rapat meskipun pasangan terpisah jarak. Secara administratif, kekuatan program ini didukung oleh sistem pencatatan kependudukan yang sistematis dan egulasi resmi melalui Peraturan Desa tahun 2019, yang mewajibkan adanya proses mediasi di tingkat desa sebelum warga menempuh jalur hukum formal. Sinergi antara penguatan batin melalui simbol Katresnan dan pengawasan data yang ketat di buku besar desa terbukti memberikan beban moral positif bagi para migran, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka perselisihan serta perceraian di Desa Bringinan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, paparan data ini menunjukkan bahwa struktur Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan dibangun atas integrasi antara regulasi legal-formal, pendampingan moral-spiritual, serta penguatan simbolis yang menyasar kerentanan sosial keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas KOPI, program ini menjalankan sistem perlindungan

[25] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

yang memadukan prosedur administratif melalui pendataan dan kewajiban mediasi dengan pembangunan benteng psikologis bagi pasangan suami-istri melalui filosofi gembok sebagai pengikat batin. Transformasi nilai-nilai Katresnan ke dalam bentuk kebijakan operasional dan simbol budaya ini menjadi instrumen desa dalam menanamkan komitmen kesetiaan serta tanggung jawab moral bagi setiap warga yang merantau agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

C. Analsisis Hasil Tentang Desain, Dasar Hukum, dan Mekanisme Pelaksanaan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan

Keberhasilan Desa Bringinan dalam menekan angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran diawali dengan mentransformasikan keprihatinan sosial menjadi instrumen hukum yang mengikat. Program Gembok Katresnan merupakan perwujudan dari kehadiran negara dalam unit terkecil masyarakat untuk memberikan perlindungan nyata. Hal ini sejalan dengan teori integrasi sosial yang menekankan pentingnya institusi sosial dalam menjaga masyarakat.[26] Dalam konteks ini, Bapak Barno selaku Kepala Desa Bringinan menegaskan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa tahun 2019 untuk melindungi warga yang menjadi pekerja migran.[27] Alur kegiatannya dimulai dari pelaporan wajib, penandatanganan berkas bersama pasangan di kantor desa, hingga pemberian nasihat mendalam mengenai tujuan bekerja dan cara menjaga keutuhan rumah tangga.

Integrasi sosial secara sosiologis tercipta melalui konsensus nilai-nilai yang kemudian dituangkan ke dalam norma hukum di tingkat desa. Perlindungan hukum keluarga, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, memandang bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan bagian dari *maqaṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) yaitu melindungi

[26] S Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Alfabeta, 2023), 118.

[27] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

keturunan dan kehormatan.[28] Upaya preventif yang dilakukan pemerintah desa melalui Perkades Nomor 6 Tahun 2023, mencerminkan pemikiran bahwa hukum harus bersifat proaktif dalam memitigasi risiko sosial yang timbul akibat migrasi internasional. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap keluarga migran merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh kepastian status hukum dan keharmonisan rumah tangga.[29] Dengan adanya landasan hukum yang kuat, setiap tindakan pendampingan memiliki legitimasi operasional yang jelas. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Jemirin, Sekretaris Desa, yang menyatakan bahwa program ini telah menjadi kebijakan resmi yang diawasi oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga bukan hanya sekadar seremoni belaka.[30]

Tahap perencanaan Program Gembok Katresnan menitikberatkan pada ketegasan administrasi sebagai instrumen kontrol sosial. Sebelum seorang warga berangkat ke luar negeri, validasi dokumen kependudukan menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum di kemudian hari. Dalam proses ini, Bapak Kadeni (Sekretaris Komunitas KOPI) memaparkan bahwa setiap calon PMI wajib menyerahkan KTP dan KK di balai desa untuk memastikan keaslian data dan mencegah pemalsuan status.[31] Selain urusan dokumen, dilakukan pula komunikasi intensif di ruang KOPI yang membahas rencana pengelolaan keuangan agar pendapatan dari luar negeri dapat dijadikan modal usaha dan tidak habis untuk konsumsi. Prosedur ini menunjukkan adanya fungsi adaptasi sosial di mana desa berupaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan ketahanan warga.

Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) sangat bergantung pada kematangan perencanaan di tingkat awal. Landasan hukum yang digunakan Desa

---

[28] Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dan Ketahanan Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 88.

[29] Nasution, 45.

[30] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026

[31] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026

Bringinan merujuk pada kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menetapkan peraturan demi kepentingan masyarakat setempat. Hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia menekankan bahwa ketertiban administrasi pernikahan dan kependudukan adalah kunci dalam penyelesaian sengketa perdata.

Adanya kepastian hukum dalam administrasi kependudukan adalah fondasi utama bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar hak-hak perdata mereka tetap terlindungi.[32] Dengan melakukan pendataan yang ketat, Desa Bringinan sebenarnya sedang membangun sistem peringatan dini terhadap potensi konflik rumah tangga. Langkah ini diakhiri dengan prosesi simbolis di mana pasangan mengaitkan gembok bersama di papan berbentuk hati di ruang Kepala Desa sebagai representasi janji setia yang disaksikan oleh otoritas desa.

Unsur terpenting yang membuat program ini diterima secara luas oleh masyarakat adalah penggunaan pendekatan hati ke harti yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Desa Bringinan berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam prosedur birokrasi desa. Bapak Barno, dalam kapasitasnya sebagai Modin, menjelaskan filosofi di balik nama program ini, di mana *katresnan* yang berarti kasih sayang diharapkan dapat terkunci rapat dan tidak mudah lepas meski terpisah jarak.[33] Pendekatan tersebut merupakan bentuk transformasi nilai di mana norma agama ditransformasikan menjadi praktik social di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, kesadaran masyarakat yang kuat di Desa Bringinan dipicu oleh kesamaan nasib dan nilai-nilai pesantren yang masih kental.[34] Menurut pandangan Wahyudi menyatakan bahwa, integrasi sosial dalam masyarakat tetap membutuhkan jangkar nilai-nilai tradisional dan

---

[32] Zainul Arifin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dinamika Dan Regulasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 112.

[33] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

[34] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Analisis Terhadap Fungsi Dan Disintegrasi* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

agama sebagai filter terhadap disintegrasi sosial.[35] Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Ibu Amin, yang merasa sangat terbantu dengan adanya upaya Kepala Desa dan pengurus KOPI yang melakukan pengecekan untuk memastikan kelengkapan dokumen sekaligus menerima bimbingan mengenai cara menjaga kerukunan rumah tangga sebelum suaminya berangkat ke Brunei Darussalam.[36] Dengan demikian, keberhasilan perencanaan program ini terletak pada kemampuannya dalam menyatukan aspek legal dan formal dengan aspek emosional dan spiritual masyarakat.

Penetapan sasaran dalam Program Gembok Katresnan didasarkan pada pemetaan kerentanan sosial yang mendalam di Desa Bringinan. Merujuk pada Pasal 3 Bab III Perkades Nomor 6 Tahun 2023, target utama program ini adalah pasangan suami-istri yang akan menjalani hubungan jarak jauh, baik salah satu maupun keduanya yang akan menjadi PMI. Bapak Barno selaku Modin menjelaskan bahwa pemilihan kelompok ini didasarkan pada tantangan berat yang mereka hadapi di luar negeri, sehingga melalui bimbingan pranikah dan pembinaan agama, desa ingin memastikan bahwa meski jauh di luar negeri, ikatan batin dan fondasi iman mereka tetap kuat.

Hal tersebut diatas menunjukan adanya penerapan teori Adaptasi Sosial, di mana keluarga migran harus melakukan penyesuaian fungsional agar tetap utuh meskipun strukturnya berubah menjadi transnasional. Ketahanan keluarga dalam kondisi migrasi transnasional sangat bergantung pada kemampuan sistem sosial lokal dalam menyediakan mekanisme adaptasi yang mampu mengompensasi hilangnya kehadiran fisik salah satu anggota keluarga guna mencegah terjadinya anomi social.[37]

Ketahanan keluarga dalam situasi ini menuntut adanya kesepakatan yang jelas mengenai peran dan komitmen. Bapak Darmaji, sebagai perwakilan keluarga PMI, mengakui bahwa sasaran program ini memang ditujukan agar pasangan sepakat mengenai cara komunikasi, urusan kiriman

---

[35] Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern*, 89.
[36] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[37] Edi Suharto, *Ketahanan Sosial Dan Perlindungan Anak Dalam Keluarga Migran* (Jakarta: Alfabeta, 2023), 141.

uang, dan yang paling penting adalah kesetiaan. Oleh sebab itu, ketahanan keluarga migran sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam mengelola konflik jarak jauh dan menjaga komitmen finansial secara transparan.[38] Adapun dalam program ini juga merangkul para purna PMI dan tokoh masyarakat sebagai pendamping agar mereka bisa ikut mengawasi serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga tercipta kerja sama yang rukun di lingkungan desa.

Upaya pembentukan program Gembok Katresnan tidak lepas dari sinergi peran strategis antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas KOPI. Sinergi tersebut menciptakan ekosistem pendukung, di mana masing-masing menjalankan peran yang saling mengisi dalam menjaga stabilitas desa. Bapak Barno selaku Modin memaparkan bahwa tokoh agama rutin memberikan bimbingan mengenai pentingnya menjaga amanah, sementara perangkat desa menyediakan ruang mediasi kekeluargaan jika terjadi kesalahpahaman rumah tangga. Pola koordinasi yang dilakukan oleh Desa Bringinan selaras dengan teori Integrasi Sosial Durkheim, di mana solidaritas terbentuk melalui pembagian kerja yang saling bergantung demi tujuan bersama, yakni kerukunan warga.[39]

Peran aktif Kepala Desa sebagai motivator juga menjadi perekat hubungan antara warga dan pemerintah. Bapak Barno sebagai Kepala Desa senantiasa mengingatkan warganya bahwa sesibuk apa pun di luar negeri, keluarga di rumah jangan sampai dilupakan agar stabilitas desa tetap tenang dan rukun. Integrasi yang dilakukan pada dasarnya untuk memberikan rasa aman bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagaimana dirasakan Ibu Amin yang menyatakan bahwa keterlibatan tokoh agama dan pengurus desa sangat penting untuk memastikan keberangkatan suami tidak hanya membawa rezeki, tetapi juga tetap menjaga kerukunan rumah tangga.[40] Oleh sebab itu,

[38] Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dan Ketahanan Keluarga*, 78.

[39] Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society (Edisi Terjemahan Baru)* (London: Macmillan, 2023).

[40] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

koordinasi antar-lembaga lokal merupakan kunci dalam memitigasi dampak negatif migrasi terhadap struktur sosial masyarakat pedesaan.[41]

Penggunaan simbol gembok dalam program ini memiliki kedalaman makna psikologis sebagai representasi kesetiaan. Gembok sendiri dipilih sebagai media yang melambangkan janji ikatan suci pasangan. Kegiatan Gembok Katresnan dapat dilihat oleh masyarakat dan disaksikan oleh saksi, menjadikan janji tersebut bersifat publik dan mengikat secara sosial. Bapak Sarni menjelaskan bahwa gembok adalah simbol kunci agar ikatan cinta tetap kuat dan melekat sebagai kunci kebersamaan, di mana nyatanya angka perceraian memang berkurang setelah adanya simbolisasi yang dilakukan oleh keluarga PMI.[42] Dalam perspektif sosiologi, simbol berfungsi sebagai pengikat kesadaran kolektif yang memberikan beban moral bagi individu untuk tidak melanggar kesepakatan sosial.[43]

Secara filosofis adanya pemasangan dua gembok pada papan berbentuk hati (*waru*) melambangkan penyatuan dua batin yang tidak terpisahkan oleh jarak. Bapak Kadeni menguraikan bahwa dua gembok yang dikaitkan adalah simbol bahwa hubungan suami-istri harus tetap nyambung dan utuh.[44] Pemilihan lokasi kegiatan pemasangan Gembok di kantor desa memiliki tujuan sebagai efek pengawasan psikologis bagi pasangan. Ibu Amin menambahkan bahwa saat suami di luar negeri, ia akan teringat bahwa ada gembok cinta di kantor desa yang harus dijaga sebagai pengingat batin agar tidak melakukan tindakan yang merusak rumah tangga.[45] Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto, bahwa simbol-simbol sosial dalam kebudayaan lokal seringkali lebih efektif sebagai sarana kontrol sosial dibandingkan dengan sanksi hukum formal semata.[46]

---

[41] Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern*, 105.
[42] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[43] Agus Purnomo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2022).
[44] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[45] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[46] Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Analisis Terhadap Fungsi Dan Disintegrasi*, 210.

Keberhasilan Program Gembok Katresnan dalam menekan angka perceraian juga didukung oleh keberadaan infrastruktur hukum di tingkat desa yang berfungsi sebagai ruang mediasi awal (Posbakum Desa). Lembaga ini berfungsi sebagai penyaring pertama (*first-tier filtering*) bagi setiap konflik rumah tangga yang muncul, terutama pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bapak Kadeni memaparkan bahwa Posbakum di Desa Bringinan disediakan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari urusan sengketa tanah hingga mediasi rumah tangga, dengan tujuan agar permasalahan warga tidak langsung dibawa ke ranah hukum yang lebih tinggi.[47] Hingga saat ini, tercatat sekitar 11 pasangan telah melalui prosesi gembok dan mediasi di ruang Kepala Desa, yang membuktikan bahwa mekanisme ini berjalan secara aktif dan fungsional.

Dalam perspektif hukum keluarga, mediasi merupakan instrumen penting untuk mencapai perdamaian (*iṣlāḥ*) sebelum menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama. [48] Prosedur wajib lapor dan mediasi di desa ini menciptakan hambatan prosedural yang positif bagi pasangan yang ingin bercerai secara impulsif. Lebih lanjut bahwa, keberadaan lembaga mediasi di tingkat masyarakat sangat efektif dalam memberikan ruang negosiasi bagi pasangan yang sedang mengalami krisis komunikasi jarak jauh.[49] Bapak Barno selaku Kepala Desa menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat bermanfaat dalam mendeteksi masalah keluarga PMI lebih dini, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebelum terjadi keretakan yang lebih parah.[50] Hal ini memperkuat teori Integrasi Sosial di mana stabilitas komunitas dijaga melalui mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada kearifan lokal dan kepatuhan terhadap pimpinan desa.[51]

---

[47] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026

[48] Muhammad Aziz, *Hukum Keluarga Islam: Penguatan Komitmen Dan Perlindungan Perdata* (Surabaya: Bina Ilmu, 2023), 88.

[49] Arifin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dinamika Dan Regulasi*, 145.

[50] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

[51] Hendra Darmawan, *Sosiologi Masyarakat Transnasional: Adaptasi Dan Integrasi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2023).

Struktur sosial di Desa Bringinan memanfaatkan sistem administrasi kependudukan sebagai alat kontrol sosial. Pencatatan setiap perubahan status warga di dalam buku desa memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dinamika keluarga migran secara berkelanjutan. Bapak Barno selaku Modin menjelaskan bahwa perangkat desa secara rutin mencatat laporan kependudukan, termasuk kondisi rumah tangga para pekerja migran, guna mencegah perselisihan yang dipicu oleh kurangnya komunikasi atau masalah pengelolaan kiriman uang.[52] Pencatatan tersebut memberikan tekanan psikologis positif bagi PMI untuk tetap menjaga amanah dan kesetiaan karena merasa terdaftar dan terpantau oleh aparatur desa.

Integrasi antara data administratif dan pengawasan sosial merupakan ciri dari masyarakat yang memiliki kesadaran solidaritas. Ibu Amin mengakui bahwa pihak kantor desa dan pengurus KOPI memang selalu mencatat setiap kejadian di lingkungan, termasuk status pernikahan, yang secara tidak langsung membuat warga merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk mempertahankan komitmennya.[53] Selaras dengan pandangan menurut Soekanto bahwa, efektivitas kontrol sosial dalam masyarakat pedesaan seringkali bergantung pada sejauh mana pemerintah desa mampu menyatukan data administratif dengan norma-norma perilaku masyarakat.[54] Dengan data yang terdokumentasi sejak Perdes 2019 diberlakukan, pemerintah desa memiliki basis data yang kuat untuk mengevaluasi keberhasilan program secara periodik dan memastikan bahwa setiap warga yang merantau tetap terhubung dengan kehidupan sosial di desa asal.

Ketahanan keluarga migran yang terbangun di Desa Bringinan menunjukkan bahwa migrasi internasional tidak selalu berujung pada disintegrasi keluarga asalkan didampingi oleh kebijakan yang tepat. Ketahanan sosial sebuah komunitas migran diukur dari kemampuannya meminimalisir dampak negatif perpisahan fisik melalui penguatan komitmen

[52] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[53] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[54] Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Analisis Terhadap Fungsi Dan Disintegrasi*, 215.

moral dan ekonomi.[55] Bapak Barno (Kepala Desa) mengonfirmasi bahwa sejak program Gembok Katresnan dijalankan, terdapat kecenderungan penurunan angka perceraian yang membanggakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesuksesan ini mentransformasi Desa Bringinan dari desa yang rentan konflik rumah tangga menjadi desa model yang mampu melindungi martabat dan keutuhan keluarga pekerja migran melalui inovasi kebijakan yang menyentuh akar permasalahan masyarakat.[56]

D. Singkroniasai Data Tentang Desain, Dasar Hukum, dan Mekanisme Pelaksanaan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan

Keberhasilan Desa Bringinan dalam menekan angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran diawali dengan mentransformasikan keprihatinan sosial menjadi instrumen hukum yang mengikat melalui Program Gembok Katresnan. Program ini merupakan perwujudan kehadiran negara dalam unit masyarakat terkecil untuk memberikan perlindungan nyata. Secara hierarki hukum, kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lokal berskala desa, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan perspektif Islam, upaya ini sejalan dengan *maqaṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melindungi keturunan dan kehormatan keluarga. Legitimasi program *Gembok Katresnan* memiliki dasar hukum yang spesifik melalui Perkades Nomor 6 Tahun 2023 yang diundangkan pada 29 Desember 2023. Pemerintah desa mewajibkan alur kegiatan yang dimulai dari pelaporan, wawancara, penandatanganan berkas bersama pasangan, hingga pemberian nasihat mendalam mengenai tujuan bekerja dan esensi menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara sosiologis, integrasi sosial di desa ini tercipta melalui konsensus nilai yang dituangkan ke dalam norma hukum tingkat desa. Perlindungan

[55] Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dan Ketahanan Keluarga*, 112.
[56] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

hukum keluarga ini, dalam perspektif Islam, dipandang sebagai bagian dari *maqaṣid asy-syarī'ah* untuk melindungi keturunan dan kehormatan. Perkades Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan kewajiban bagi calon PMI dan pasangan untuk mengikuti prosedur ini sebagai bentuk perlindungan preventif. Upaya preventif melalui Peraturan Desa mencerminkan pemikiran bahwa hukum harus proaktif memitigasi risiko sosial akibat migrasi internasional. Dengan landasan hukum yang kuat, setiap tindakan pendampingan memiliki legitimasi operasional yang jelas dan diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program ini bukan sekadar seremoni belaka.

Tahap perencanaan program menitikberatkan pada ketegasan administrasi sebagai instrumen kontrol sosial. Sebelum warga berangkat ke luar negeri, validasi dokumen kependudukan seperti KTP dan KK menjadi syarat mutlak untuk mencegah pemalsuan status dan menjamin kepastian hukum. Selain aspek dokumen, dilakukan komunikasi intensif melalui Komunitas KOPI untuk membahas rencana pengelolaan keuangan agar pendapatan dari luar negeri tidak habis untuk konsumsi, melainkan menjadi modal usaha. Prosedur ini menunjukkan adanya fungsi adaptasi sosial di mana desa berupaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan ketahanan warga.

Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) sangat bergantung pada kematangan perencanaan awal. Desa Bringinan membangun sistem peringatan dini melalui pendataan ketat agar hak-hak perdata Pekerja Migran tetap terlindungi. Langkah ini diakhiri dengan prosesi simbolis di mana pasangan mengaitkan gembok bersama di papan berbentuk hati sebagai representasi janji setia yang disaksikan otoritas desa. Penggunaan pendekatan "hati ke hati" yang berbasis nilai spiritual dan budaya lokal ini membuat program diterima luas, karena berhasil mengintegrasikan nilai agama ke dalam prosedur birokrasi.

Struktur sosial masyarakat yang kental dengan nilai pesantren memperkuat kesadaran kolektif dalam program ini. Integrasi sosial tetap membutuhkan jangkar nilai tradisional dan agama sebagai filter terhadap disintegrasi. Hal ini terbukti dari testimoni warga yang merasa terbantu dengan bimbingan kerukunan rumah tangga sebelum keberangkatan anggota keluarga. Dengan demikian, perencanaan program ini sukses menyatukan aspek legal-formal dengan aspek emosional-spiritual, memastikan bahwa migrasi tidak hanya membawa rezeki, tetapi juga tetap menjaga kehormatan serta keutuhan keluarga.

Penetapan sasaran program difokuskan pada kelompok yang paling rawan mengalami disintegrasi, yaitu pasangan suami-istri transnasional. Melalui bimbingan pranikah dan pembinaan agama, desa menyediakan mekanisme adaptasi untuk mengompensasi hilangnya kehadiran fisik salah satu anggota keluarga. Selain itu, program ini merangkul purna PMI dan tokoh masyarakat sebagai pendamping untuk memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas menciptakan ekosistem pendukung yang menjaga stabilitas desa sesuai dengan teori solidaritas organik.

Sebagai instrumen terakhir, Desa Bringinan menyediakan infrastruktur hukum berupa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai penyaring pertama bagi setiap konflik rumah tangga. Mediasi di tingkat desa ini menjadi ruang negosiasi (*iṣlāḥ*) yang efektif sebelum pasangan menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama. Hingga saat ini, prosesi gembok dan mediasi telah terbukti fungsional dalam mendeteksi masalah lebih dini. Dengan integrasi antara data administratif, pengawasan sosial, dan komitmen moral, Desa Bringinan berhasil bertransformasi menjadi desa model yang mampu melindungi martabat keluarga pekerja migran dari ancaman perceraian.

BAB IV
FAKTOR STRUKTURAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *GEMBOK KATRESNAN* DI BRINGINAN JAMBON

A. Paparan Data Tentang Fungsi-Fungsi Sosial dalam Skema AGIL Bekerja dalam Pelaksanaan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan

Implementasi program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan menunjukkan keterkaitan yang erat antara kebijakan formal dan dukungan struktural pemerintah desa dalam upaya menekan angka perceraian di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di mana keberhasilan ini berakar pada legitimasi hukum yang kokoh melalui Peraturan Desa (Perdes) tahun 2019 serta kepemimpinan berbasis pengalaman empiris karena mayoritas perangkat desa merupakan mantan PMI yang memahami secara mendalam.

Adapun dukungan diwujudkan secara seluk-beluk permasalahan migran nyata melalui penyediaan anggaran khusus, fasilitas pendampingan, serta integrasi program lintas sektor seperti pelatihan UMKM yang menyasar keluarga PMI, yang kemudian diperkuat dengan mekanisme pelaporan wajib dan sistem kontrol administratif yang sistematis guna memastikan setiap warga yang merantau tetap berpijak pada komitmen menjaga keutuhan batin dan keharmonisan rumah tangga di desa. Bapak Barno, selaku Kepala Desa

Bringinan, menegaskan bahwa program ini telah menjadi kesepakatan bersama yang wajib dijalankan oleh warga:

"*Gembok Katresnan* ini sudah jadi program unggulan di Desa Bringinan. Ini bukan cuma kemauan saya sendiri, tapi sudah jadi kesepakatan warga dan masuk dalam poin penting yang harus dijalankan bagi siapa pun yang mau berangkat jadi pekerja migran." [109]

Dukungan formal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Darmaji, salah satu anggota keluarga PMI, yang melihat bahwa aspek regulasi memberikan kepastian bahwa program ini diawasi secara resmi oleh lembaga desa:

[109] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

> "Desa sangat mendukung karena sudah ada aturannya (Perdes/Perkades) tentang perlindungan PMI. Jadi program ini bukan cuma seremoni saja, tapi sudah jadi kebijakan resmi yang diawasi oleh pemerintah desa dan BPD."[1]

Selain aspek regulasi, pemerintah desa juga memfasilitasi program-program pendukung yang menyasar kelompok rentan lainnya di lingkungan keluarga PMI, seperti anak-anak muda. Bapak Sarni, Ketua Komunitas KOPI, memaparkan adanya program pelatihan lintas sektor:

> "Desa juga memfasilitasi pelatihan lewat program desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dengan mengundang narasumber dari Ponorogo. Sasarannya keluarga PMI, terutama anak-anak muda yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri supaya tidak terjerumus ke hal negatif seperti pil koplo karena terlalu banyak waktu luang."[2]

Ibu Amin, sebagai warga yang merasakan langsung dampak program, menekankan bahwa kombinasi antara aturan yang jelas, dukungan anggaran, dan kerja sama antarlembaga desa menjadi pondasi utama keberlangsungan program ini:

> "Menurut pengamatan saya sebagai warga, keberhasilan program *Gembok Katresnan* ini sangat bergantung pada dukungan dari Bapak Lurah dan perangkat desa yang menetapkan aturan jelas serta menyediakan anggaran khusus untuk mendampingi keluarga kami. Peran lembaga komunitas KOPI juga penting dalam mendampingi kami, sementara tokoh agama dan masyarakat membantu kami dalam penguatan batin agar tetap setia dengan keluarga. Kerja sama yang rukun antara semua pihak di tingkat desa inilah yang menjadi pondasi kuat, sehingga program ini dapat berjalan secara nyata untuk melindungi keutuhan rumah tangga kami yang ditinggal bekerja ke luar negeri."[3]

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa program *Gembok Katresnan* didukung oleh regulasi formal berupa Peraturan Desa (Perdes) yang memberikan kepastian hukum dan pengawasan resmi dari lembaga desa serta BPD. Selain aspek hukum, pemerintah desa juga menerapkan

[1] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[2] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[3] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

pendekatan holistik dengan memfasilitasi program pendukung seperti pelatihan UMKM untuk menjaga stabilitas sosial keluarga yang ditinggalkan. Keberlanjutan program ini bertumpu pada sinergi lintas sector, termasuk dukungan anggaran, peran aktif komunitas KOPI, serta bimbingan spiritual dari tokoh agama yang secara bersama-sama membentuk pondasi kuat dalam melindungi keutuhan rumah tangga pekerja migran di Desa Bringinan.

Keberhasilan program ini didorong oleh faktor sosial berupa solidaritas kelompok melalui Komunitas Purna PMI (KOPI). Komunitas ini berfungsi sebagai sistem pendukung yang memberikan motivasi secara berkelanjutan, sehingga para keluarga yang ditinggalkan tidak merasa berjuang sendirian dalam menjaga komitmen rumah tangga mereka. Bapak Kadeni, Sekretaris Komunitas KOPI, menjelaskan kegigihan pengurus dalam menjaga kerukunan warga:

> "Keluarga yang di rumah kami ajak untuk terus kumpul bareng di komunitas KOPI. Biarpun kadang susah nemu waktunya karena mereka sibuk urusan harian, kami tidak ada bosannya nyambangi dan memberikan semangat biar mereka tetap kuat dan rukun sampai pasangannya pulang nanti."[4]

Solidaritas ini menciptakan rasa kebersamaan yang membuat keluarga PMI tidak merasa berjuang sendirian. Bapak Darmaji menambahkan bahwa prosesi yang dilakukan secara terbuka menciptakan efek kontrol sosial yang positif dari lingkungan sekitar:

> "Teman-teman dari komunitas KOPI selalu kasih motivasi ke kami. Karena pemasangan gembok dilakukan secara terbuka, tetangga jadi tahu kalau kami sedang berjuang hidup terpisah, jadi muncul rasa saling menjaga."[5]

Bapak Barno (Modin) menguraikan bagaimana komunitas purna-PMI ini bertindak sebagai "keluarga kedua" yang aktif melakukan pengawasan lingkungan guna mencegah konflik:

> "Peran solidaritas dan kontrol sosial bagi warga merantau didukung dengan peran tetangga dan komunitas PMI yang bertindak sebagai

[4] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[5] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026

> keluarga kedua yang saling menjaga serta mengingatkan jika ada perilaku keluarga yang mulai menyimpang dari komitmen *Gembok Katresnan*. Melalui komunitas ini, para istri atau suami yang ditinggal merantau tidak merasa sendirian karena ada forum rutin untuk berbagi cerita dan solusi, sementara pengawasan lingkungan yang rukun dapat mencegah terjadinya fitnah atau godaan pihak ketiga."[6]

Hal ini divalidasi oleh Ibu Amin, yang merasakan bahwa pengawasan dari lingkungan sekitarnya justru memberikan rasa aman dan menjadi pengingat untuk tetap fokus pada tanggung jawab rumah tangga:

> "Peran solidaritas dari tetangga dan pengurus KOPI di desa kami sangatlah besar dalam menjaga komunikasi keluarga selama suami bekerja di luar negeri. Kami merasa tidak sendirian karena sesama istri pekerja migran sering berkumpul untuk saling menguatkan, berbagi cerita, dan mengingatkan agar kami tetap menjaga amanah serta kepercayaan yang sudah diberikan suami. Selain itu, adanya kontrol sosial dari lingkungan sekitar membuat kami merasa selalu diawasi, sehingga kami lebih berhati-hati dalam bertindak dan tetap fokus mengurus rumah tangga serta anak-anak di rumah."[7]

Solidaritas kelompok yang digerakkan oleh komunitas purna-PMI (KOPI) dan lingkungan sekitar berfungsi sebagai sistem pendukung sekaligus mekanisme kontrol sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Kegigihan pengurus komunitas dalam memberikan pendampingan rutin dan motivasi menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sehingga para pasangan migran tidak merasa berjuang sendirian. Selain itu, prosesi pemasangan gembok yang dilakukan secara terbuka telah mentransformasi dukungan lingkungan menjadi pengawasan sosial yang positif, di mana tetangga dan komunitas bertindak sebagai keluarga kedua yang menjaga amanah kesetiaan, mencegah timbulnya konflik atau fitnah, serta memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap fokus pada tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak.

Meskipun didukung secara struktural melalui solidaritas komunitas dan pengawasan lingkungan tersebut, pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan operasional. Bapak Sarni mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan yang memiliki pengalaman

[6] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[7] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

serupa sangat menentukan kemudahan komunikasi dalam menjembatani kebutuhan warga, namun kendala teknis tetap ada yang memerlukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan agar program tetap berjalan relevan di tengah dinamika masyarakat. Bapak Kadeni menyoroti masalah klasik terkait pendanaan mandiri yang harus dikelola oleh komunitas KOPI:

> "Kendala utamanya adalah dana. Dari desa memang belum ada anggaran khusus untuk KOPI. Jadi kami bergerak secara sosial saja. Untuk biaya operasional, kami coba mandiri dengan bikin peternakan kambing komunitas yang sekarang jumlahnya ada 16 ekor."[8]

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Darmaji yang melihat keterbatasan sumber daya sebagai hambatan, meski aturan desa tetap memaksa program untuk berjalan:

> "Hambatan utamanya ya soal sumber daya atau dana di desa, tapi tetap diusahakan jalan terus karena sudah ada aturannya."[9]

Selain masalah finansial, terdapat tantangan sosiokultural berupa pandangan masyarakat yang masih tertutup. Bapak Barno selaku Modin menjelaskan bahwa urusan rumah tangga sering kali dianggap tabu untuk dicampuri pihak luar:

> "Tantangan yang menurut saya sulit adalah keterbatasan dalam hal anggaran maupun tokoh yang berperan untuk melakukan pendampingan dan konsultasi hukum bagi keluarga PMI yang bermasalah. Selain itu, kami juga berbenturan dengan hambatan koordinasi jarak jauh karena perbedaan waktu yang terkadang membuat komunikasi antara perangkat desa dengan warga di luar negeri tidak bisa secepat yang diharapkan. Di sisi lain, masih ada anggapan yang menganggap urusan rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dicampuri pihak luar, sehingga kami bertahap meyakinkan warga bahwa program *Gembok Katresnan* bukan untuk mencampuri pribadi, melainkan bentuk perlindungan dan dukungan bersama demi keutuhan keluarga masyarakat Desa Bringinan."[10]

Ibu Amin juga memvalidasi adanya resistensi dari sebagian warga terhadap campur tangan desa, serta kendala teknis dalam membagi waktu antara pekerjaan domestik dengan kegiatan koordinasi desa:

---

[8] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[9] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[10] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

> "Menurut pengamatan saya, hambatan yang paling sulit diatasi adalah merubah pandangan lama sebagian warga yang merasa urusan rumah tangga tidak perlu dicampuri oleh perangkat desa melalui program seperti *Gembok Katresnan*. Adanya keterbatasan dana desa untuk menjangkau semua keluarga pekerja migran secara rutin serta kesulitan dalam mengatur waktu koordinasi antara pengurus KOPI dengan kami yang sibuk mengurus anak dan sawah juga menjadi tantangan."[11]

Kepala Desa Bringinan, Bapak Barno, merangkum bahwa tantangan terberat adalah mengubah pola pikir masyarakat sekaligus mengelola keterbatasan sarana pendampingan:

> "Tantangan paling berat yang kami hadapi di tingkat desa adalah merubah kebiasaan lama sebagian warga yang merasa urusan rumah tangga itu urusan pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh aturan desa atau Perdes. Selain soal cara pandang itu, kami juga sering terbentur pada keterbatasan anggaran desa untuk menyediakan sarana pendampingan yang lebih lengkap serta sulitnya mencocokkan waktu koordinasi antara pengurus KOPI yang sibuk dengan warga yang punya jadwal kerja harian."[12]

Pelaksanaan program *Gembok Katresnan* menghadapi tantangan multidimensi yang meliputi aspek finansial, teknis, dan sosiokultural. Hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran desa yang belum mampu menyediakan dana khusus, sehingga komunitas KOPI harus mengupayakan kemandirian ekonomi secara sosial melalui peternakan komunal. Secara teknis, program ini juga terkendala oleh kesulitan sinkronisasi waktu koordinasi jarak jauh dengan pekerja migran akibat perbedaan zona waktu, serta kesibukan harian keluarga yang ditinggalkan. Namun, tantangan yang paling mendasar adalah adanya resistensi sosiokultural dari sebagian warga yang masih menganggap urusan rumah tangga sebagai wilayah privat yang tabu untuk dicampuri pihak luar. Menghadapi hal tersebut, pemerintah desa terus berupaya melakukan pendekatan persuasif untuk mengubah pola pikir masyarakat agar memahami bahwa program ini adalah bentuk perlindungan hukum dan batin demi keutuhan keluarga, bukan sekadar mencampuri urusan pribadi.

---

[11] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[12] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

Untuk memitigasi kendala tersebut, pemerintah desa dan komunitas KOPI menerapkan strategi pendampingan yang tidak hanya menyentuh aspek emosional, tetapi juga perencanaan ekonomi. Bapak Jemirin menjelaskan peran komunitas dalam mengarahkan orientasi keuangan para migran:

> "Kami juga bantu mereka menyusun rencana, misalnya kalau sudah pulang nanti uangnya mau buat apa. Kami ajarkan skala prioritas. Kadang ada yang mau langsung beli mobil, tapi kami beri masukan kalau investasi emas atau tanah itu lebih untung buat masa depan. Kami juga ada program pemberdayaan seperti pelatihan usaha atau bantuan izin label halal buat yang buka usaha katering."[13]

Lebih lanjut adanya partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan *Gembok Katresnan*. Bapak Jemirin mencatat bahwa partisipasi keluarga PMI sangat tinggi karena adanya integrasi sistem pelaporan di tingkat desa:

> "Sejauh ini, tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum di Desa Bringinan sangat tinggi karena mereka merasa program ini adalah kebutuhan bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kami tidak melihat adanya partisipasi yang kurang merata sebagai penghambat, karena sejak awal kami mewajibkan pelaporan yang terintegrasi di tingkat desa sehingga setiap calon PMI pasti terlibat." [14]

Namun, dari perspektif kewilayahan, Bapak Barno (Modin) mengakui adanya ketimpangan partisipasi yang dapat menghambat penyampaian pesan penguatan mental secara maksimal:

> "Menurut pengamatan saya, tingkat partisipasi keluarga PMI di Desa Bringinan sudah cukup baik, terutama pada kegiatan masyarakat seperti doa bersama atau kegiatan pemasangan *Gembok Katresnan*. Akan tetapi, kami akui adanya partisipasi yang kurang merata karena masih ada sebagian keluarga migran yang sulit meluangkan. Jika partisipasi tidak merata keberhasilan program jadi kurang bagus karena pesan-pesan keagamaan dan penguatan mental tidak maksimal."[15]

Ibu Amin menambahkan bahwa meskipun antusiasme keluarga migran tinggi, dukungan dari masyarakat umum masih perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan desa yang saling mengawasi secara positif:

---

[13] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[14] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[15] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

> "Sebenarnya keluarga pekerja migran di desa kami sangat antusias karena kami merasa program ini memberikan perlindungan nyata bagi keutuhan rumah tangga dan kejelasan urusan surat-menyurat. Namun, memang harus diakui bahwa partisipasi masyarakat umum masih belum merata sepenuhnya karena ada beberapa warga yang merasa kegiatan ini hanya dikhususkan bagi mereka yang hendak berangkat ke luar negeri saja."[16]

Salah satu faktor kunci dalam struktur pendukung program *Gembok Katresnan* adalah pelibatan aktif para mantan PMI (Purna-PMI). Kehadiran mereka memberikan dimensi praktis berdasarkan pengalaman nyata yang tidak dimiliki oleh perangkat desa biasa. Bapak Barno selaku Kepala Desa menjelaskan efektivitas peran mereka:

> "Purna-PMI kami libatkan dalam struktur program melalui komunitas KOPI sebagai pembimbing bagi warga yang akan berangkat. Tugas utamanya adalah membagikan pengalaman seperti cara mengelola keuangan hasil merantau dan tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran mereka sangat efektif karena nasihatnya lebih mudah diterima dan dipercaya oleh warga dibandingkan teori dari perangkat desa."[17]

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Barno (Modin) yang menekankan bahwa Purna-PMI berfungsi sebagai bukti nyata (*living proof*) bahwa hubungan jarak jauh dapat berhasil:

> "Tentu mas, mantan PMI di Desa Bringinan kami libatkan agar bisa membagikan pengalaman dan solusi cepat dalam menghadapi godaan serta kesulitan komunikasi selama merantau. Keluarga yang sedang ditinggal merantau dapat jadi lebih nyaman terbuka kepada mantan perantau yang telah terbukti berhasil menjaga keutuhan rumah tangga hingga kembali ke desa. Kehadiran mantan PMI memberikan bukti bahwa kesetiaan dalam program *Gembok Katresnan* bisa diwujudkan, sehingga nasihat yang diberikan jauh lebih menyentuh dan mudah diterima."[18]

Dari sisi penerima manfaat, Ibu Amin mengakui bahwa pendampingan dari komunitas KOPI yang berisi para Purna-PMI jauh lebih relevan dengan kondisi lapangan yang mereka hadapi:

---

[16] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[17] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/202
[18] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

> "Para mantan Pekerja Migran Indonesia atau yang kami sebut purna-PMI dilibatkan dalam struktur program *Gembok Katresnan* ini, terutama melalui wadah pengurus KOPI di desa kami. Mereka adalah pendamping yang memberikan pemahaman berdasarkan pengalaman saat bekerja di luar negeri, mulai dari cara mengelola keuangan hasil kerja hingga tips menjaga komunikasi agar tetap harmonis dengan pasangan di rumah. Menurut saya, peran mereka sangat baik karena mereka lebih mengerti suka duka dan godaan yang kami hadapi."[19]

Strategi operasional program *Gembok Katresnan* mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan pelibatan mentor praktis untuk menjamin relevansi program di mata masyarakat. Komunitas KOPI berperan penting dalam memberikan edukasi literasi keuangan dan rencana investasi masa depan bagi PMI, agar hasil kerja di luar negeri tidak habis untuk konsumsi yang tidak produktif. Selain itu, program ini mengandalkan keterlibatan purna-PMI sebagai sosok teladan (*living proof*) yang nasihatnya dianggap lebih kredibel dan menyentuh dibandingkan teori administratif perangkat desa, karena mereka memahami secara langsung dinamika serta godaan hubungan jarak jauh.

Meskipun partisipasi keluarga PMI tercatat tinggi karena adanya integrasi sistem pelaporan wajib di tingkat desa, tantangan berupa ketimpangan partisipasi masyarakat umum masih ditemukan. Hal ini terjadi karena sebagian warga masih menganggap program ini bersifat eksklusif bagi calon migran, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran kolektif agar seluruh lapisan masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan desa yang saling menjaga dan mengawasi keutuhan rumah tangga warga perantau. Program *Gembok Katresnan* tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan birokrasi, melainkan memanfaatkan struktur sosial dan nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat Desa Bringinan. Bapak Jemirin menjelaskan bagaimana norma kesetiaan diwujudkan dalam bentuk fisik:

> "Untuk memastikan kontrol sosial tetap berjalan meskipun pasangan terpisah jarak, struktur sosial Desa Bringinan mengandalkan

[19] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

> komunikasi melalui perangkat desa dan komunitas KOPI yang selalu memantau kondisi keluarga yang ditinggalkan. Kami mengangkat nilai budaya lokal seperti guyub rukun dan kesetiaan sebagai norma. *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut melalui simbolisasi gembok agar nilai kesetiaan tersebut memiliki bentuk nyata dan diingat oleh kedua belah pihak."[20]

Meskipun terdapat kendala berupa kesibukan individu, rata-rata mantan PMI tetap berusaha berkontribusi dalam organisasi untuk menjaga solidaritas sosial. Bapak Sarni mencatat dinamika ini:

> "Iya, rata-rata mantan PMI masuk ke organisasi komunitas. Cuma memang kadang ada yang tidak aktif karena sibuk dengan urusan masing-masing, misalnya kalau ada pelatihan di Ponorogo mereka tidak bisa ikut karena ada kerjaan lain."[21]

Berdasarkan paparan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Gembok Katresnan* merupakan sebuah model perlindungan keluarga migran yang mengintegrasikan aspek legal-formal, dukungan sosial-budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Program ini berpijak pada fondasi hukum yang kuat (Perdes 2019) dan kepemimpinan perangkat desa yang memiliki pengalaman empiris sebagai mantan PMI, sehingga kebijakan yang dilahirkan bersifat relevan dan tepat sasaran.

Keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada administrasi desa, tetapi sangat didorong oleh sinergi lintas sektor. Komunitas KOPI bersama tokoh agama dan masyarakat berperan sebagai support *system* sekaligus instrumen kontrol sosial yang efektif. Melalui simbolisme gembok yang terbuka dan keterlibatan Purna-PMI sebagai mentor (*living proof*), nilai-nilai kesetiaan dan kejujuran ditransformasikan dari sekadar norma menjadi komitmen nyata yang dipantau oleh lingkungan sekitar.

Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan multidimensi seperti keterbatasan anggaran yang memicu kemandirian ekonomi melalui peternakan komunal, kendala koordinasi lintas zona waktu, hingga resistensi terhadap privasi rumah tangga. Pemerintah desa berhasil memitigasi

[20] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[21] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026

hambatan tersebut melalui pendekatan persuasif dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, *Gembok Katresnan* telah berkembang dari sekadar kebijakan birokrasi menjadi sebuah gerakan sosial yang memanfaatkan struktur "guyub rukun" untuk menjaga stabilitas mental, ekonomi, dan keharmonisan keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Bringinan.

B. Analsisis Hasil Tentang Fungsi-Fungsi Sosial dalam Skema AGIL Bekerja dalam Pelaksanaan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan

Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan, Jambon, hadir sebagai sebuah manifestasi keberanian lokal dalam merespons potensi konflik rumah tangga pada pekerja migran. Inisiatif ini memotret realitas sosiologis di mana jarak seringkali menjadi pemicu bagi keretakan rumah tangga, sehingga pemerintah desa memandang perlu untuk melakukan intervensi melalui simbolisasi komitmen yang bersifat publik dan mengikat. Dengan mengintegrasikan nilai kasih sayang (*katresnan*) ke dalam sebuah prosedur resmi yang disaksikan oleh aparatur desa, program ini sebenarnya sedang membangun benteng psikologis dan moral bagi pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar orientasi ekonomi mereka di luar negeri tidak mengorbankan sakralitas ikatan perkawinan yang ditinggalkan di tanah air.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka digunakan skema AGIL dari Talcott Parsons pisau analisis untuk untuk memahami seberapa efektif program ini dilaksanakan. Penting untuk digarisbawahi bahwa program tersebut tidak dimaksudkan untuk memaksa keluarga PMI mempertahankan perkawinan dalam semua keadaan, melainkan mencegah perceraian yang lahir dari miskomunikasi, disinformasi, atau konflik yang masih dapat dimediasi. Oleh sebab itu, dalam kasus kekerasan atau pelanggaran hak berat, perlindungan terhadap martabat korban tetap menjadi prioritas utama.

Kehadiran struktur pendukung tersebut ini dapat dipahami melalui kerangka fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang memandang entitas masyarakat sebagai sistem yang saling bergantung demi menjaga

keseimbangan (*equilibrium*).[22] Program Gembok Katresnan dalam hal ini berjalan sebagai sebuah subsistem vital yang menjalankan fungsi-fungsi strategis melalui skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration,* dan *Latency*). Keberhasilan atau kegagalan upaya ini dalam menekan angka perceraian sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara regulasi, dukungan komunitas, serta pemeliharaan pola nilai budaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai degradasi sosial di lingkungan keluarga migran.

Berikut di bawah ini merupakan penjabaran sesuai dengan fakta lapangan yang telah dimuat dalam paparan data, dengan analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural berdasarkan pandangan Talcott Person.

1. Fungsi Adaptasi (*Adaptation*)

   Fungsi adaptasi merujuk pada kemampuan sebuah sistem untuk menanggulangi situasi yang mendesak serta menyesuaikan diri dengan lingkungan demi keberlangsungan hidup. Dalam struktur sosial Desa Bringinan, adaptasi dilakukan melalui transformasi kebijakan lokal yang merespons fenomena migrasi internasional oleh masyarakat. Pemerintah Desa melakukan adaptasi dengan menciptakan regulasi resmi berupa Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2019 dan penyediaan anggaran khusus guna memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Langkah adaptif ini pentinh mengingat bekerja di luar negeri dapat membawa risiko disintegrasi keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Barno selaku Kepala Desa, Program Gembok Katresnan merupakan wujud kesepakatan warga dan kebijakan resmi desa yang wajib dijalankan bagi setiap calon PMI untuk memastikan perlindungan dokumen dan batin.[23]

   Perlindungan hukum dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif menuntut adanya adaptasi institusional terhadap perubahan pola hidup masyarakat. Adaptasi di Desa Bringinan tidak hanya bersifat

[22] Talcott Parsons, *The Social System (Edisi Klasik Revisi)* (London: Routledge, 2022).
[23] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

administratif, tetapi juga ekonomi, di mana keterbatasan anggaran desa disikapi dengan kemandirian ekonomi komunitas melalui pelatihan UMKM. Menurut Nasution, adaptasi hukum keluarga di era migrasi global harus mencakup perlindungan hak-hak perdata dan penguatan ekonomi rumah tangga guna meminimalisir pemicu perceraian.[24] Hal ini dipertegas oleh Bapak Kadeni bahwa keterbatasan dana diatasi dengan gerakan sosial mandiri seperti UMKM agar operasional pendampingan tetap berjalan.[25] Strategi ini menunjukkan bahwa sistem di Desa Bringinan memiliki daya dukung dalam menghadapi tantangan finansial demi menjaga fungsi perlindungan keluarga.

Adaptasi juga menyentuh aspek sosiokultural melalui pelibatan Purna-PMI sebagai pendamping. Pelibatan tersebut merupakan strategi untuk menjembatani hambatan komunikasi dan perbedaan zona waktu yang sering menjadi kendala teknis dalam koordinasi jarak jauh. Kehadiran mantan perantau memberikan pengalaman nyata yang tidak dimiliki oleh perangkat desa biasa, sehingga nasihat mereka lebih kredibel dan mudah diterima oleh keluarga PMI. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penggunaan *uruf* atau adat kebiasaan yang baik (*al-'adah al-muhakkamah*) dalam meredam konflik merupakan bentuk ijtihad sosial. Menurut Arifin, hukum keluarga harus mampu beradaptasi dengan realitas sosiologis masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat guna mewujudkan keluarga yang sakinah.[26]

Interpretasi terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa Desa Bringinan berhasil melakukan konversi tantangan menjadi peluang melalui struktur pendukung yang relevan. Bapak Barno (Modin) mencatat bahwa keluarga yang ditinggal merantau merasa lebih nyaman terbuka kepada mantan perantau yang telah terbukti berhasil menjaga keutuhan rumah tangga hingga kembali ke desa.[27] Hal ini membuktikan

[24] Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dan Ketahanan Keluarga*, 67.
[25] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[26] Arifin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dinamika Dan Regulasi*, 124.
[27] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

bahwa fungsi adaptasi dalam paradigma Parsons berjalan efektif melalui sinkronisasi antara kebutuhan warga (orientasi ekonomi) dengan sistem perlindungan desa (orientasi hukum dan moral). Dengan demikian, Program Gembok Katresnan adalah sistem hidup yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat migran di Desa Bringinan.

2. Fungsi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Fungsi pencapaian tujuan dalam sistem Parsons mengharuskan sebuah struktur untuk menetapkan tujuan dan memobilisasi seluruh sumber daya yang ada demi mencapai tujuan tersebut. Mobilisasi sumber daya ini bekerja melalui kontrak sosial lewat penandatanganan berkas dan simbolisasi gembok sebagai instrumen hukum formal dan moral. Tujuan utama program ini adalah untuk menekan angka perceraian dan menjaga keutuhan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan integrasi antara janji moral (Gembok Katresnan) dan instrumen hukum formal. Bapak Barno selaku Kepala Desa menegaskan bahwa program ini bertujuan agar setiap warga yang merantau memiliki landasan komitmen yang kuat dan perlindungan dokumen yang jelas sebelum meninggalkan keluarga, sehingga kerukunan tetap terjaga.[28]

Dalam disiplin Hukum Keluarga Islam, pencapaian tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* memerlukan usaha preventif (*saddu adz-dzari'ah*) terhadap hal-hal yang berpotensi merusak ikatan tersebut. Program ini memobilisasi tokoh agama dan pengurus desa untuk memberikan penguatan mental agar pasangan memiliki kesepakatan yang jelas mengenai pola komunikasi dan pengelolaan keuangan. Keberhasilan sebuah kebijakan hukum keluarga diukur dari sejauh mana instrumen tersebut mampu mentransformasi visi ideal pernikahan menjadi langkah praktis yang dapat dijalankan oleh

[28] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

pasangan.[29] Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Darmaji bahwa tujuan pengarahan tersebut adalah agar keluarga tidak pecah dan suami-istri memiliki kesepakatan soal kesetiaan serta kiriman uang.[30]

Mobilisasi sumber daya juga mencakup keterlibatan aktif purna-PMI dalam struktur komunitas KOPI. Kehadiran mereka sebagai mentor bertujuan untuk memberikan bukti nyata (*living proof*) bahwa kesetiaan bisa diwujudkan meskipun terpisah jarak. Bapak Barno (Modin) menjelaskan bahwa kehadiran mantan PMI memberikan bukti bahwa program ini bukan sekadar teori, sehingga nasihat yang diberikan jauh lebih menyentuh dan mudah diterima.[31] Interpretasi sosiologisnya bahwa sistem ini menggunakan teladan sosial sebagai alat untuk mencapai tujuan desa dalam mengurangi konflik rumah tangga.

3. Fungsi Integrasi (*Integration*)

Integrasi merupakan fungsi yang mengatur antarhubungan bagian-bagian dari komponen sistem agar dapat berjalan secara harmonis. Dalam konteks Desa Bringinan, integrasi dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Desa, Tokoh Agama, dan Komunitas KOPI. Sinergi ini memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih peran, melainkan saling memperkuat dalam pengawasan sosial. Ibu Amin menekankan bahwa kerja sama yang rukun antara semua pihak di tingkat desa inilah yang menjadi pondasi kuat sehingga program dapat berjalan nyata melindungi rumah tangga.[32] Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sosial di Desa Bringinan bekerja melalui solidaritas masyarakat yang sangat erat.

Dari sudut pandang Teori Integrasi Sosial, kestabilan sebuah komunitas migran sangat bergantung pada pengawasan lingkungan yang bersifat persuasif namun efektif. Di Desa Bringinan, tetangga dan komunitas PMI bertindak sebagai keluarga kedua yang saling menjaga

---

[29] Aziz, *Hukum Keluarga Islam: Penguatan Komitmen Dan Perlindungan Perdata*, 88.
[30] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[31] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[32] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

dan mengingatkan jika ada perilaku yang menyimpang dari komitmen Gembok Katresnan. Oleh sebab itu, integrasi sosial dalam masyarakat migran memerlukan mekanisme kontrol sosial yang halus untuk mencegah terjadinya fitnah atau godaan pihak ketiga yang dapat merusak tatanan keluarga.[33] Fungsi kontrol sosial ini divalidasi oleh Ibu Amin yang merasa selalu diawasi sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak dan tetap fokus mengurus rumah tangga.[34]

Integrasi juga tercermin dalam bagaimana program ini untuk dapat merangkul kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak PMI dan keluarga lansia. Bapak Sarni menjelaskan bahwa desa memfasilitasi pelatihan bagi anak-anak muda yang ditinggal orang tuanya agar tidak terjerumus ke hal negatif.[35] Langkah ini merupakan bentuk integrasi untuk memastikan bahwa kerusakan di satu bagian (orang tua pergi merantau) tidak mengakibatkan kerusakan di bagian lain misalnya kenakalan remaja. Dalam Hukum Keluarga Islam, perlindungan terhadap anak (*ḥifẓ an-nasl*) merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keutuhan keluarga. Selarasa dengan pandangan Suharto bahwa, ketahanan keluarga migran harus dilihat secara menyeluruh, mencakup perlindungan anak dan penguatan ekonomi, guna menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.[36]

Interpretasi atas fungsi integrasi tersebut menunjukkan bahwa Desa Bringinan tidak hanya memaknai gembok secara fisik, tetapi juga mengunci sistem sosialnya agar tidak ada celah bagi disintegrasi. Sinergi antara kebijakan formal, bimbingan spiritual, dan solidaritas tetangga menciptakan sebuah jaring pengaman sosial yang kuat. Sebagaimana disimpulkan oleh Bapak Jemirin bahwa, koordinasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI dilakukan untuk menghindari

[33] Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern*, 118.
[34] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[35] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[36] Suharto, *Ketahanan Sosial Dan Perlindungan Anak Dalam Keluarga Migran*, 132.

keretakan sosial, di mana masing-masing pihak memiliki peran spesifik sebagai pembuat aturan, pembina rohani, dan pengaman sosial.[37]

4. Fungsi Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Fungsi terakhir dalam skema AGIL Parsons adalah *Latency* atau pemeliharaan pola, yang berfokus pada bagaimana sebuah sistem mempertahankan nilai-nilai, norma, dan motivasi individu di dalamnya. Desa Bringinan, melakukan pemeliharaan pola melalui enkulturasi nilai-nilai Katresnan (kasih sayang) ke dalam simbolisme gembok dan bimbingan spiritual yang berkesinambungan. Bapak Barno (Modin) menjelaskan bahwa makna filosofis Gembok Katresnan terletak pada fungsinya sebagai pengunci rapat kesetiaan agar tidak tergoda pihak lain, yang tertanam kuat dalam batin warga sebagai janji suci.[38] Proses ini menjamin bahwa meskipun pasangan terpisah jarak ribuan kilometer, pola kesetiaan tetap terjaga karena adanya pengingat batin.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemeliharaan pola ini sejalan dengan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik), di mana komitmen suami-istri harus terus dipupuk melalui komunikasi dan penguatan iman. Latency di Desa Bringinan diperkuat dengan keterlibatan Purna-PMI sebagai penjaga pola. Bapak Barno (Kepala Desa) memaparkan bahwa mantan migran dilibatkan untuk membagikan pengalaman dalam menjaga keharmonisan, yang terbukti sangat efektif karena nasihat mereka jauh lebih menyentuh dan mudah diterima.[39] Oleh sebab itu, keberlanjutan sebuah norma dalam keluarga migran sangat bergantung pada keberadaan sosok teladan (*living proof*) yang mampu mentransfer nilai-nilai ketahanan keluarga kepada generasi berikutnya.[40]

Meskipun fungsi AGIL telah berjalan, sistem tersebut tetap menghadapi tantangan di lapangan. Tantangan sosiokultural berupa resistensi sebagian warga yang menganggap urusan rumah tangga sebagai

[37] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[38] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[39] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[40] Purnomo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*, 156.

ranah pribadi yang bersifat rahasia menjadi hambatan utama dalam fungsi integrasi. Bapak Barno (Kepala Desa) mengakui bahwa mengubah pola pikir warga yang menganggap aturan desa mencampuri urusan pribadi adalah tantangan terberat.[41] Hal ini menunjukkan adanya gesekan antara sistem desa dengan dunia kehidupan warga yang masih tertutup. Namun, pemerintah desa mengatasi hal ini melalui pendekatan persuasif, meyakinkan warga bahwa program ini adalah bentuk perlindungan hukum, bukan intervensi pribadi.

Hambatan lain adalah keterbatasan anggaran dan sinkronisasi waktu koordinasi lintas zona waktu. Bapak Kadeni menyebutkan bahwa karena belum ada anggaran khusus, komunitas KOPI harus bergerak secara mandiri melalui peternakan kambing.[42] Dalam teori Parsons, kegagalan dalam satu fungsi (adaptasi ekonomi) dapat mengganggu fungsi lainnya. Namun, kemandirian ekonomi yang ditunjukkan komunitas KOPI justru memperkuat solidaritas di Desa Bringinan. Selaras dengan pandangan Suharto bahwa, ketahanan sosial yang tangguh justru seringkali muncul dari inovasi komunitas dalam mengelola sumber daya terbatas demi kepentingan bersama.[43]

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan dikaji melalui empat fungsi utama dalam skema AGIL Talcott Parsons, menunjukan adanya adaptasi yang diwujudkan melalui transformasi kebijakan pemerintah desa dan kemandirian ekonomi seperti UMKM yang diinisiasi oleh purna PMI. Adapun fungsi pencapaian tujuan diwujudkan melalui mobilisasi sumber daya desa dan peran purna PMI sebagai pembimbing para pekerja migran yang bertujuan untuk menurukan angka perceraian.

Sinergi lintas sektor antara tokoh agama, perangkat desa, dan komunitas KOPI menjalankan fungsi integrasi yang menciptakan jaring pengaman sosial, yang kemudian disempurnakan oleh fungsi pemeliharaan

[41] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[42] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[43] Suharto, *Ketahanan Sosial Dan Perlindungan Anak Dalam Keluarga Migran*, 141.

pola (*latency*) melalui enkulturasi nilai *Katresnan* dalam simbolisme gembok dan bimbingan spiritual guna memastikan motivasi kesetiaan tetap terinternalisasi sesuai prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Meskipun sistem yang dibangun rentan terhadap menghadapi tantangan dalam pelaksanaan berupa resistensi sosiokultural warga terhadap intervensi wilayah privat (*lifeworld*) serta keterbatasan anggaran, kegagalan pada adaptasi ekonomi tersebut justru berhasil dikonversi menjadi penguat solidaritas masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa ketahanan sosial yang tangguh lahir dari inovasi bersama dalam mengelola keterbatasan demi menjaga keutuhan batin dan keharmonisan rumah tangga warga perantau.

C. Singkroniasai Data Tentang Fungsi-Fungsi Sosial dalam Skema AGIL Bekerja dalam Pelaksanaan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan

Program Gembok Katresnan di Desa Bringinan, Jambon, merupakan manifestasi keberanian lokal dalam merespons potensi disintegrasi rumah tangga pada keluarga pekerja migran. Inisiatif ini memotret realitas sosiologis di mana jarak fisik sering kali menjadi pemicu keretakan hubungan. Melalui simbolisasi komitmen publik yang mengikat, pemerintah desa melakukan intervensi untuk membangun benteng psikologis dan moral bagi pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mengintegrasikan nilai kasih sayang (*katresnan*) ke dalam prosedur resmi, program ini memastikan bahwa orientasi ekonomi di luar negeri tidak mengorbankan sakralitas ikatan perkawinan di tanah air.

Dalam kerangka fungsionalisme struktural Talcott Parsons, keberhasilan program ini ditentukan oleh empat fungsi strategis yang dikenal sebagai skema AGIL. Fungsi pertama, yaitu Adaptasi (*Adaptation),* diwujudkan melalui transformasi kebijakan lokal yang responsif terhadap fenomena migrasi. Desa Bringinan berhasil melakukan adaptasi institusional dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2019 sebagai payung hukum resmi. Selain aspek administratif, adaptasi juga menyentuh dimensi ekonomi melalui kemandirian komunitas dalam bentuk pelatihan UMKM dan

peternakan kambing. Langkah ini menjadi katup penyelamat bagi operasional program di tengah keterbatasan anggaran formal desa.

Fungsi kedua adalah Pencapaian Tujuan **(***Goal Attainment***)**, di mana sistem menetapkan penurunan angka perceraian sebagai target utama. Untuk mencapai hal tersebut, desa memobilisasi seluruh sumber daya, mulai dari perangkat desa hingga tokoh agama. Mobilisasi ini mencakup pemberian penguatan mental dan kesepakatan tertulis mengenai pola komunikasi serta pengelolaan keuangan sebelum keberangkatan PMI. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, langkah ini merupakan implementasi dari prinsip *saddu adz-dzari'ah*, yakni upaya preventif untuk menutup celah kemudaratan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, fungsi Integrasi *(Integration)* dijalankan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Desa, Tokoh Agama, dan Komunitas KOPI. Sinergi ini menciptakan jaring pengaman sosial yang memastikan setiap bagian sistem bekerja secara harmonis tanpa tumpang tindih peran. Integrasi sosial di Desa Bringinan juga diperkuat oleh peran tetangga dan purna-PMI yang bertindak sebagai keluarga kedua yang saling menjaga. Bahkan, program ini merangkul kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak PMI, melalui pelatihan positif guna memastikan stabilitas sosial tetap terjaga secara menyeluruh dari berbagai lapisan anggota keluarga.

Fungsi terakhir adalah Pemeliharaan Pola (*Latency*), yang berfokus pada enkulturasi nilai-nilai *katresnan* melalui simbolisme gembok dan bimbingan spiritual. Proses ini menjamin bahwa meskipun pasangan terpisah jarak ribuan kilometer, motivasi kesetiaan tetap terinternalisasi sebagai janji suci di dalam batin. Keterlibatan purna PMI sebagai *living proof* atau bukti nyata kesuksesan menjaga rumah tangga menjadi faktor kunci dalam memelihara pola perilaku ini. Nasihat dari mereka yang telah berhasil melewati tantangan serupa terbukti lebih efektif dan menyentuh sisi psikologis pasangan migran baru dibandingkan sekadar instruksi formal.

Meskipun sistem AGIL ini telah berjalan, Desa Bringinan tetap menghadapi tantangan struktural berupa resistensi sosiokultural dari sebagian

warga yang menganggap urusan rumah tangga sebagai wilayah privat yang tertutup. Namun, pemerintah desa berhasil mengatasi hambatan ini melalui pendekatan persuasif, meyakinkan masyarakat bahwa program ini adalah bentuk perlindungan hukum, bukan intervensi pribadi. Pada akhirnya, keberhasilan Program Gembok Katresnan membuktikan bahwa ketahanan sosial yang tangguh lahir dari inovasi komunitas yang mampu menyinergikan regulasi formal dengan kekuatan batin dan kearifan lokal masyarakat perantau.

Tabel 4.1. *Mekanisme Sosial Program Gembok Katresnan (Skema AGIL)*

Fungsi AGIL	**Makna Teoretis**	**Indikator Mekanisme dalam Program**	**Data Lapangan**
Adaptation	Kemampuan sistem merespons tantangan eksternal demi keberlangsungan.	Transformasi kebijakan (Perdes/Perkades), kemandirian ekonomi UMKM, dan pemanfaatan modal sosial Purna-PMI sebagai agen transmisi.	Dokumen Perdes 2019 & Perkades 6/2023, laporan kemandirian UMKM komunitas KOPI, wawancara Purna-PMI.
Goal Attainment	Kemampuan sistem memobilisasi	Kontrak sosial formal (dokumen) dan	Data kasus mediasi, dokumen surat

Fungsi AGIL	Makna Teoretis	Indikator Mekanisme dalam Program	Data Lapangan
	sumber daya untuk mencapai target.	moral (prosesi), serta efektivitas mediasi untuk menekan angka perceraian.	izin suami atau istri, laporan hasil mediasi, wawancara Kades tentang visi pernikahan.
Integration	Pengaturan hubungan antar-komponen agar sistem bekerja harmonis.	Sinergi lintas sektor (Pemerintah-Agama-Komunitas) dan kontrol sosial kolektif (pengawasan tetangga).	Dokumentasi koordinasi lintas sektor, catatan partisipasi tokoh agama, testimoni warga mengenai pengawasan lingkungan.
Latency	Pemeliharaan nilai, norma, dan motivasi individu di dalam sistem.	Enkulturasi nilai *Katresnan*, internalisasi simbol gembok sebagai pengingat batin, dan peran teladan (living proof).	Narasi filosofis Gembok Katresnan, observasi prosesi simbolik, wawancara keluarga PMI tentang

Fungsi AGIL	Makna Teoretis	Indikator Mekanisme dalam Program	Data Lapangan
			internalisasi nilai kesetiaan.

BAB V
PENGARUH STRUKTUR SOSIAL PADA PROGRAM *GEMBOK KATRESNAN* DI DESA BRINGINAN JAMBON

A. Paparan Data Tentang Kontribusi Program *Gembok Katresnan* terhadap Pencegahan Konflik Keluarga dan Perceraian Pekerja Migran di Desa Bringinan

Struktur sosial di Desa Bringinan memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu bentuk dukungan nyata adalah melalui peran aktif Komunitas Purna PMI (KOPI) dan Pemerintah Desa yang memastikan bahwa aspek pengasuhan anak dan persiapan mental menjadi prioritas sebelum keberangkatan. Bapak Sarni, selaku Ketua Komunitas KOPI, menjelaskan bagaimana mereka masuk ke dalam ranah domestik untuk memastikan pengasuhan anak tetap terjaga:

> "Kami selalu tanya, kalau orang tuanya berangkat, anaknya dititipkan ke siapa. Biasanya kalau ayah-ibunya berangkat semua, anak dititipkan ke kakek-neneknya. Kami juga sarankan anak-anak itu ikut les tambahan, karena kalau di rumah sendirian tanpa orang tua, pengawasan belajarnya pasti kurang."[1]

Senada dengan hal tersebut, Bapak Kadeni selaku Sekretaris Komunitas KOPI menegaskan pentingnya bimbingan belajar bagi anak-anak migran agar kualitas pendidikan mereka tidak menurun meskipun tanpa kehadiran orang tua secara fisik:

> "Sejak awal kami tanya, kalau orang tua berangkat, anak dititipkan ke siapa. Biasanya kan ke kakek-neneknya. Kami sarankan anak-anak ikut les tambahan karena kalau di rumah saja tanpa bimbingan orang tua, belajarnya pasti kurang maksimal."[2]

Dukungan struktural ini dirasakan langsung manfaatnya oleh keluarga PMI. Bapak Darmaji, salah satu suami dari pekerja migran, menceritakan proses penguatan mental yang dilakukan oleh perangkat desa:

---

[1] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[2] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026

> "Sebelum istri saya berangkat ke Hongkong, kami berdua dipanggil dulu untuk sosialisasi oleh Pak Lurah dan pengurus KOPI supaya mental kami siap".[1]

Lebih lanjut, Bapak Barno selaku Modin Desa Bringinan memaparkan bahwa desa memiliki mekanisme pengawasan yang berlapis, melibatkan RT/RW hingga tokoh masyarakat yang berperan sebagai "orang tua asuh" bagi keluarga yang ditinggalkan:

> "Desa Bringinan memastikan kerukunan keluarga PMI tetap terjaga dengan adanya komunitas KOPI dan pengawasan yang melibatkan pengurus RT/RW serta tokoh masyarakat sebagai orang tua asuh bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui pertemuan rutin di tingkat lingkungan dan grup komunikasi warga, tetangga sekitar menjalankan fungsi kontrol sosial secara halus, yaitu dengan saling peduli dan mengingatkan jika ada perilaku yang dirasa kurang pas atau menyimpang dari kesepakatan *Gembok Katresnan*. Cara ini memastikan bahwa upaya pembinaan keagamaan dan kesetiaan tidak berhenti meski pasangan terpisah jarak, karena seluruh warga desa ikut bertanggung jawab menjaga kehormatan setiap keluarga migran sebagai satu kesatuan masyarakat yang rukun."[2]

Ibu Amin, yang suaminya merantau, melihat bahwa keberadaan program ini merupakan strategi kebijakan sosial yang efektif untuk memantau kondisi warga secara terus-menerus:

> "Dengan adanya program ini, desa jadi punya cara untuk memantau warganya. Ini bukan cuma soal gembok, tapi soal kebijakan sosial desa biar nggak ada keretakan atau masalah di masyarakat gara-gara banyak warga yang jadi PMI. Setelah pasang gembok pun, kalau ada sosialisasi atau pertemuan lagi dari desa, kami sering diundang. Jadi komunikasinya tetap nyambung terus antara warga dan pemerintah desa."[3]

Keberhasilan Program *Gembok Katresnan* juga sangat dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai budaya dan agama yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Bringinan. Bapak Sarni mencatat bahwa latar belakang pendidikan agama menjadi filter alami terhadap pengaruh budaya luar:

---

[1] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[2] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[3] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

> "Kebanyakan mantan PMI di sini basiknya dari pondok pesantren, jadi budaya Indonesia dan nilai-nilai agamanya masih dipegang kuat. Budaya luar tidak gampang masuk ke Desa Bringinan. Kalau pulang ya tetap jadi orang biasa yang sopan."[4]

Dalam konteks norma sosial, Bapak Darmaji menyebutkan bahwa tingginya jumlah warga yang memiliki nasib serupa sebagai PMI menciptakan sebuah kesepakatan nilai (norma) untuk saling menjaga kesetiaan:

> "Sangat mendukung, karena 70% warga di sini senasib jadi PMI, jadi sudah jadi norma kalau kita harus saling setia dan tanggung jawab."[5]

Bapak Jemirin, Sekretaris Desa, memberikan penjelasan filosofis mengenai dasar budaya yang digunakan dalam program ini, yaitu prinsip *Eling lan Waspada* serta *Rukun Agawe Santosa*:

> "Di Desa Bringinan, nilai budaya yang menjadi fondasi utama adalah Eling lan Waspada serta filosofi Rukun Agawe Santosa. Norma kesetiaan di sini bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab moral kepada keluarga. Kami menyadari bahwa godaan saat terpisah jarak sangat besar, sehingga Program *Gembok Katresnan* ini kami jadikan sebagai jembatan untuk menghidupkan kembali nilai Komitmen Saklawase."[6]

Implementasi nilai-nilai ini kemudian dibungkus dalam bentuk prosesi adat desa yang memberikan beban moral lebih besar kepada pasangan. Bapak Barno selaku Kepala Desa menjelaskan kekuatan dari janji yang disaksikan secara kolektif:

> "Nilai budaya yang paling menonjol di Desa Bringinan adalah rasa guyub rukun dan menjaga kehormatan keluarga, di mana kesetiaan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga bersama. Program *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma ini dengan mengubah janji pribadi menjadi prosesi yang disaksikan perangkat desa dan tokoh masyarakat, sehingga warga merasa memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk tidak melanggar janji di depan umum. Melalui cara ini, budaya saling menjaga nama baik di desa justru menjadi kekuatan

[4] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[5] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[6] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026

> utama yang mendukung ketahanan perkawinan para pekerja migran kami."[7]

Keberhasilan Program *Gembok Katresnan* dalam menjaga stabilitas sosial tidak terlepas dari pola koordinasi yang erat antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas pendamping. Sinergi ini memastikan bahwa setiap permasalahan dapat dideteksi dan ditangani secara cepat melalui pendekatan yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Bapak Jemirin, Sekretaris Desa, menjelaskan pembagian peran tersebut:

> "Untuk menghindari keretakan sosial kami menjalankan koordinasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI itu sendiri. Pemerintah desa berperan sebagai pembuat aturan yang memastikan perlindungan hukum, sementara tokoh agama berperan memberikan siraman rohani mengenai pentingnya menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga dalam setiap pertemuan warga. Komunitas PMI kami posisikan sebagai pengaman sosial. Mereka saling memantau dan memberikan dukungan moral jika ada salah satu keluarga PMI yang sedang mengalami masalah di desa."[8]

Koordinasi ini dirasakan sangat efektif oleh perangkat kewilayahan dalam menjaga ketertiban moral warga. Bapak Barno selaku Modin menekankan bahwa kehadiran pemerintah desa memberikan "pegangan moral" bagi warga yang jauh dari pasangan:

> "Kami sangat dilibatkan dalam urusan ini. Koordinasi antara perangkat desa, tokoh agama seperti saya (Modin), dan pengurus komunitas itu berjalan sangat baik karena tujuannya satu: menjaga keutuhan rumah tangga warga. Karena ini sudah menjadi kesepakatan dan masuk dalam program kerja desa, pelaksanaannya jadi lebih teratur. Ini cara pemerintah desa hadir untuk memastikan warganya tetap rukun dan punya pegangan moral meskipun sedang jauh dari pasangan."[9]

Dukungan teknis dan motivasi juga secara aktif diberikan oleh perangkat desa di lapangan. Bapak Sarni mencatat keaktifan para pengurus desa dalam memberikan wawasan:

> "Perangkat desa seperti Pak Jemirin (Sekdes) dan Pak Kadeni (Sekretaris KOPI) sangat aktif. Setiap ada warga yang mau berangkat,

[7] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[8] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[9] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

> mereka langsung turun tangan memberi wawasan dan motivasi supaya fokus bekerja dan tetap menjaga keluarganya di rumah. Kalau ada undangan soal PMI di Ponorogo, mereka pasti datang."[10]

Selain aspek simbolis dan mental, struktur sosial di Desa Bringinan memperkuat program ini melalui kemandirian ekonomi. Hal ini dilakukan agar motif ekonomi yang seringkali menjadi pemicu perceraian dapat dikelola dengan baik sejak PMI masih berada di luar negeri hingga kembali ke desa. Bapak Jemirin memaparkan kebijakan pemberdayaan ekonomi purna-PMI:

> "Selain *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga menciptakan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Purna PMI melalui pembinaan kelompok usaha mikro. Adapun dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses modal bagi istri atau suami yang tinggal di desa, agar uang kiriman dari luar negeri dapat dikelola secara produktif. Dengan adanya kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga, tekanan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu pertengkaran keluarga dapat diminimalisir. Kami ingin memastikan bahwa ketika PMI pulang, mereka memiliki tabungan atau usaha yang mapan sehingga tidak perlu kembali berangkat ke luar negeri."[11]

Pendekatan ekonomi ini juga berfungsi sebagai media pengalih perhatian yang positif bagi pasangan yang ditinggalkan. Bapak Barno (Modin) menjelaskan bahwa kesibukan dalam usaha produktif dapat memperkuat "kunci" kesetiaan yang telah dibuat:

> "Selain *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga menciptakan wadah pembinaan ekonomi bagi keluarga yang ditinggal merantau dan para mantan PMI. Mekanismenya melalui pelatihan keterampilan UMKM, seperti pengolahan hasil bumi atau kerajinan tangan, sehingga uang kiriman dari luar negeri tidak habis untuk kebutuhan konsumsi, melainkan diputar menjadi modal usaha produktif di desa. Program ini memastikan keutuhan keluarga tetap terjaga karena pihak yang di rumah memiliki kesibukan positif yang menghasilkan pendapatan tambahan, sementara mantan PMI dapat langsung mandiri tanpa harus kembali merantau, sehingga keutuhan keluarga yang telah dikunci lewat *Gembok Katresnan* semakin kuat berkat kemandirian ekonomi."[12]

[10] Lihat Transkrip Wawancara kode: 01/W/GK-PMI//II/2026
[11] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[12] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

Ibu Amin sebagai keluarga PMI merasakan bahwa keberadaan komunitas KOPI yang didukung kebijakan desa memberikan "sandaran" yang kuat dalam menghadapi masalah keuangan maupun sengketa rumah tangga:

> "Selain program *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga telah membentuk wadah khusus bernama Komunitas Pekerja Migran Indonesia atau KOPI yang bekerja nyata dalam menjaga keluarga kami melalui pendampingan berkelanjutan. Program komunitas KOPI dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pengelolaan keuangan hasil kerja di luar negeri agar kiriman uang dari suami tidak habis begitu saja, melainkan bisa menjadi modal usaha atau tabungan masa depan di desa. Selain itu, pengurus KOPI yang terdiri dari purna-PMI rutin mengadakan pertemuan warga untuk berbagi informasi perlindungan hukum serta menjadi tempat mengadu jika muncul masalah komunikasi atau sengketa dalam rumah tangga. Melalui kebijakan desa yang mendukung adanya komunitas ini, kami para istri merasa memiliki sandaran yang kuat karena masalah kami tidak hanya dipikul sendiri, melainkan dibantu penyelesaiannya secara kekeluargaan agar keutuhan keluarga tetap terjaga selama suami merantau."[13]

Keberhasilan Program *Gembok Katresnan* juga didukung oleh prosedur teknis yang terstruktur dan kehadiran lembaga mediasi di tingkat desa. Sebelum keberangkatan, pasangan PMI diwajibkan melalui serangkaian tahapan administratif dan spiritual yang disaksikan langsung oleh pimpinan desa. Bapak Darmaji menjelaskan pengalaman teknis yang dilaluinya:

> "Kami diarahkan ikut sosialisasi, diwawancarai soal dokumen, lalu mengaitkan gembok di papan berbentuk daun waru (hati). Selain itu, kami juga diminta berjanji secara lisan di depan Pak Lurah untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami."[14]

Selain prosesi simbolis, Pemerintah Desa Bringinan menyediakan infrastruktur hukum berupa "Posbakum" (Pos Bantuan Hukum) desa untuk menangani konflik rumah tangga sebelum meluas ke ranah pengadilan. Bapak Kadeni memaparkan fungsi strategis ruang mediasi ini:

> "Kami punya 'Posbakum' di desa untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari urusan tanah sampai mediasi rumah tangga, supaya masalah tidak langsung dibawa ke ranah hukum yang

[13] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026
[14] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026

> lebih tinggi. Sejauh ini sudah ada sekitar 11 pasangan yang melakukan prosesi gembok di ruangan Pak Lurah."[15]

Kehadiran fisik perangkat desa dalam setiap tahapan keberangkatan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam ruang privat warga untuk tujuan perlindungan. Bapak Barno selaku Kepala Desa menegaskan bahwa keterlibatan semua unsur ini bertujuan untuk deteksi dini konflik:

> "Koordinasi di desa kami berjalan melalui pemerintah desa sebagai pembuat aturan, tokoh agama sebagai pembina rohani, dan komunitas KOPI sebagai pendamping. Kerja sama ini bermanfaat dalam mengatasi masalah keluarga pekerja migran supaya bisa dideteksi lebih dini dan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum terjadi keretakan yang lebih parah. Dengan melibatkan semua unsur, kami berhasil menghindari perpecahan di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga yang merantau tetap terhubung erat dengan kehidupan sosial di desa."[16]

Struktur sosial Desa Bringinan berhasil mentransformasi sebuah gembok menjadi instrumen ketertiban dan ketenangan batin. Bapak Darmaji merasakan bahwa program ini memberikan rasa aman secara kolektif:

> "Saya merasa sangat terbantu dengan adanya *Gembok Katresnan* ini. Ini bukan cuma simbol cinta, tapi sudah jadi cara desa untuk menjaga ketertiban dan ketenangan warga di Desa Bringinan."[17]

Bagi warga, dipertemukannya suami-istri di kantor desa sebelum berpisah jarak merupakan pengingat yang sangat kuat untuk selalu pulang ke rumah. Hal ini ditegaskan kembali oleh Bapak Barno (Kepala Desa):

> "Menurut warga, ini sangat membantu. Dengan dipertemukan di desa sebelum berangkat, suami dan istri jadi sama-sama tahu tujuannya apa. Jadi kalau nanti di sana sudah bertahun-tahun, mereka tetap punya 'pengingat' di desa supaya ingat pulang dan ingat anak-istri atau suami di rumah."[18]

Perlu diketahui bahwa, keberhasilan Program *Gembok Katresnan* didukung oleh integrasi prosedur teknis yang terstruktur dengan kehadiran negara di tingkat desa melalui lembaga mediasi formal. Melalui serangkaian

---

[15] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[16] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[17] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[18] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026

tahapan yang meliputi sosialisasi, verifikasi dokumen, janji lisan, serta simbolisasi pemasangan gembok di hadapan pimpinan desa, program ini berhasil membangun komitmen moral dan psikologis yang kuat bagi pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Keberadaan infrastruktur hukum berupa "Posbakum" desa menjadi faktor krusial dalam melakukan deteksi dini konflik dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, sehingga mencegah keretakan rumah tangga meluas ke ranah hukum yang lebih tinggi. Dengan melibatkan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas, struktur sosial di Desa Bringinan tidak hanya menjadikan *Gembok Katresnan* sebagai simbol cinta, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang nyata dalam menjaga ketertiban, ketenangan batin, serta memastikan warga merantau tetap terhubung erat dengan keluarga dan kehidupan sosial di desa asal.

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan merupakan hasil sinergi antara struktur sosial yang responsif, penguatan nilai budaya lokal, dan dukungan prosedur teknis yang terintegrasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas KOPI, program ini mampu memberikan perlindungan menyeluruh yang mencakup pengawasan pengasuhan anak, penguatan mental, hingga kemandirian ekonomi bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kehadiran instrumen formal seperti Posbakum dan prosesi simbolis di kantor desa tidak hanya mentransformasi janji pribadi menjadi komitmen moral kolektif di hadapan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat deteksi dini konflik dan sistem pendukung sosial yang nyata dalam menjaga ketertiban batin serta keutuhan rumah tangga pekerja migran Indonesia di Desa Bringinan.

B. Analsisis Hasil Tentang Kontribusi Program *Gembok Katresnan* terhadap Pencegahan Konflik Keluarga dan Perceraian Pekerja Migran di Desa Bringinan

Perceraian Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali dipicu oleh kerentanan karena terkendalanya perbedaan waktu dan fisik yang saling

berjauhan, di mana tekanan ekonomi dan hambatan komunikasi menjadi pemicu utama disintegrasi rumah tangga. Fenomena tersebut menempatkan keluarga migran pada risiko ketidakstabilan sosial yang tinggi, sehingga diperlukan sebuah mekanisme perlindungan dalam menjaga keutuhannya. Menurut Nasution perlindungan hukum bagi keluarga migran harus bersifat menyelurh, di mana komunitas berperan sebagai penyangga psikologis dan edukatif guna meminimalisir konflik rumah tangga.[19]

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, menunjukkan bahwa ketahanan keluarga migran sangat bergantung pada sinkronisasi peran antar bagian dalam masyarakat guna menjaga keseimbangan (*equilibrium*) sosial di tengah tantangan globalisasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahyudibahwa, adanya stabilitas bagi komunitas migran sangat bergantung pada pengawasan lingkungan yang bersifat persuasif namun memiliki landasan norma yang jelas untuk mencegah keretakan.[20]

Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan, Jambon, hadir sebagai manifestasi dari bekerjanya elemen-elemen struktur desa yang meliputi Pemerintah Desa, Komunitas Purna PMI (KOPI), hingga tokoh agama sebagai satu kesatuan sistem fungsional. Struktur sosial di desa ini bukan sekadar tatanan geografis, melainkan sebuah instrumen perlindungan berlapis yang mentransformasi janji setia menjadi sebuah komitmen publik yang terinstitusi melalui simbolisme gembok dan pengawasan komunal. Hal ini terekam dalam penjelasan Bapak Jemirin (Sekdes) bahwa nilai budaya *Eling lan Waspada* dijadikan jembatan untuk menghidupkan kembali komitmen saklawase (selamanya) bagi pasangan yang merantau.

Adanya integrasi nilai kasih sayang ke dalam prosedur formal yang disaksikan oleh otoritas desa, program ini berhasil membangun benteng psikologis bagi pasangan PMI agar orientasi ekonomi tidak mengorbankan sakralitas perkawinan. Oleh sebab itu, hukum keluarga yang berbasis pada kearifan lokal cenderung lebih ditaati karena warga merasa memiliki

[19] Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dan Ketahanan Keluarga*, 112.
[20] Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern*, 45.

keterikatan batin dengan nilai tersebut dibandingkan aturan yang kaku.[21] Senada dengan hal itu, Bapak Barno (Modin) menekankan bahwa kehadiran pemerintah desa melalui program ini memberikan pegangan moral bagi warga yang jauh dari pasangan agar tetap rukun dan terjaga kehormatannya.[22]

Salah satu faktor determinan keberhasilan program ini adalah keberanian struktur desa untuk melakukan intervensi pada ranah domestik yang selama ini dianggap privat. Berdasarkan paparan data, Komunitas KOPI dan Pemerintah Desa mengambil peran aktif sebagai pengawas aspek pengasuhan anak dan persiapan mental pasangan. Bapak Sarni, selaku Ketua Komunitas KOPI, mengungkapkan bahwa pendampingan dilakukan secara mendetail dengan memastikan skema pengasuhan anak sebelum orang tuanya berangkat, bahkan menyarankan bimbingan belajar tambahan untuk menambal celah pengawasan yang hilang. Hal serupa ditegaskan oleh Bapak Kadeni bahwa perlindungan kualitas pendidikan anak menjadi prioritas agar tidak terjadi degradasi kualitas generasi akibat migrasi orang tua.

Secara sosiologis, tindakan ini merupakan bentuk adaptasi struktural untuk menggantikan fungsi orang tua yang vakum sementara. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, langkah ini selaras dengan prinsip *Hifz an-Nasl* (perlindungan keturunan) yang dalam kondisi darurat migrasi diambil alih secara kolektif oleh komunitas. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi keluarga migran harus bersifat menyeluruh, di mana komunitas berperan sebagai penyangga psikologis dan edukatif guna meminimalisir konflik rumah tangga yang bersumber dari kekhawatiran terhadap anak.[23] Hal ini diperkuat oleh interpretasi atas pengalaman Bapak Darmaji, yang merasa bahwa proses pemanggilan oleh Kepala Desa sebelum istri berangkat merupakan titik balik penguatan mental yang krusial. Kehadiran negara dalam bentuk perangkat desa ini memberikan kepastian hukum dan emosional yang menjadi dasar kesetiaan.[24]

---

[21] Arifin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dinamika Dan Regulasi*, 134.
[22] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[23] Nasution, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran dan Ketahanan Keluarga*, 112.
[24] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026

Struktur sosial Desa Bringinan menciptakan mekanisme pengawasan yang berlapis melalui integrasi antara perangkat formal (RT/RW) dan tokoh masyarakat. Fenomena orang tua asuh bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan inovasi sosial yang sangat efektif. Bapak Barno selaku Modin memaparkan bahwa melalui pertemuan rutin dan grup komunikasi warga, tetangga menjalankan fungsi kontrol sosial secara halus dengan saling peduli dan mengingatkan jika ada perilaku yang menyimpang dari norma kesetiaan.[25] Pola ini menunjukkan bahwa Desa Bringinan berhasil mentransformasi solidaritas masyarakat menjadi instrumen penjaga moralitas publik yang sangat berwibawa.

Dari sudut pandang Sosiologi Hukum, efektivitas kontrol sosial di desa ini terjadi karena adanya tekanan moral kolektif yang positif. Stabilitas sebuah komunitas migran sangat bergantung pada pengawasan lingkungan yang bersifat persuasif namun memiliki landasan norma yang jelas.[26] Pernyataan Ibu Amin memvalidasi hal tersebut, di mana dirinya melihat *Gembok Katresnan* bukan sekadar simbol, melainkan strategi kebijakan sosial desa yang membuat pemerintah tetap hadir untuk memantau kondisi warga secara terus-menerus.[27] Hal ini membuktikan bahwa struktur desa tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pendamping yang aktif menjaga agar tidak ada keretakan sosial di tengah masifnya fenomena migrasi.

Kekuatan struktur sosial di Bringinan juga berakar pada kedalaman nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi filter alami terhadap tantangan globalisasi. Bapak Sarni mencatat bahwa basis pendidikan pesantren yang dimiliki mayoritas mantan PMI menjadi modal sosial untuk tetap memegang teguh norma kesopanan dan agama meskipun telah lama terpapar budaya luar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem nilai (*latency*) di Desa Bringinan bekerja sangat kuat melalui proses enkulturasi yang berkelanjutan. Dalam Hukum Keluarga Islam, penguatan karakter *akhlaqul karimah* adalah fondasi utama

[25] Lihat Transkrip Wawancara kode: 07/W/GK-PMI//II/2026
[26] Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern*, 45.
[27] Lihat Transkrip Wawancara kode: 06/W/GK-PMI//II/2026

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah keterpisahan jarak.[28]

Penggunaan filosofi lokal seperti *Eling lan Waspada* serta *Rukun Agawe Santosa* oleh Pemerintah Desa menjadi jembatan komunikasi yang sangat efektif. Bapak Jemirin (Sekdes) menjelaskan bahwa nilai-nilai ini dihidupkan kembali sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar janji administratif. Hukum keluarga yang berbasis pada kearifan lokal cenderung lebih ditaati karena warga merasa memiliki keterikatan batin dengan nilai tersebut dibandingkan aturan yang kaku.[29] Prosesi janji lisan di depan Kepala Desa, sebagaimana dialami Bapak Darmaji, memberikan beban moral yang lebih besar karena disaksikan oleh otoritas yang dihormati secara kolektif. Ini adalah bentuk integrasi antara norma hukum, agama, dan budaya yang menciptakan ketahanan perkawinan yang tangguh.[30]

Keberhasilan Program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan sangat ditentukan oleh pola koordinasi yang presisi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas pendamping. Struktur sosial ini bekerja secara terpadu untuk memastikan setiap potensi konflik dapat dideteksi dan diintervensi secara dini. Bapak Jemirin (Sekdes) menjelaskan pembagian peran yang sangat spesifik: pemerintah desa sebagai regulator hukum, tokoh agama sebagai pembina rohani melalui siraman rohani rutin, dan komunitas KOPI sebagai pengaman sosial yang memantau kondisi lapangan.[31] Sinergi ini menciptakan sebuah sistem pengawasan yang memiliki sentuhan moral dan emosional.

Secara teoretis, koordinasi lintas sektor ini merupakan manifestasi dari fungsi integrasi dalam sistem sosial, di mana berbagai subsistem saling mendukung untuk menjaga harmoni. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kolaborasi ini mencerminkan prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan guna menjaga kehormatan rumah tangga. Menurut Wahyudi

[28] Arifin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dinamika Dan Regulasi*.
[29] Arifin, 134.
[30] Lihat Transkrip Wawancara kode: 03/W/GK-PMI//II/2026
[31] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026

(2023), integritas sosial dalam komunitas migran memerlukan mekanisme koordinasi yang cair namun terarah agar setiap individu merasa memiliki sandaran sosial saat menghadapi krisis.[32] Pengakuan Bapak Barno (Modin) mempertegas hal ini, di mana kehadiran pemerintah desa melalui koordinasi tersebut memberikan pegangan moral bagi warga yang berada jauh dari pasangan.[33]

Struktur sosial di Desa Bringinan memahami bahwa motif ekonomi seringkali menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga pekerja migran. Oleh karena itu, program ini tidak hanya berhenti pada simbolisme pemasangan gembok, tetapi juga masuk ke dalam ranah penguatan ekonomi keluarga. Bapak Jemirin (Sekdes) memaparkan kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan kelompok usaha mikro dan akses modal bagi pasangan yang ditinggal di desa.[34] Langkah ini bertujuan agar uang kiriman (*remittance*) dari luar negeri dapat dikelola secara produktif, sehingga ketika PMI kembali ke tanah air, mereka telah memiliki kemandirian ekonomi yang mapan dan tidak perlu merantau kembali.

Pendekatan ekonomi ini berfungsi sebagai media pengalih perhatian yang positif sekaligus memperkuat kunci kesetiaan. Bapak Barno (Modin) menginterpretasikan bahwa kesibukan dalam usaha produktif, seperti pengolahan hasil bumi, membuat pasangan yang ditinggalkan memiliki aktivitas yang menghasilkan pendapatan tambahan.[35] Dalam kerangka Teori Adaptasi dan Ketahanan Sosial, kemandirian ekonomi merupakan fondasi utama bagi stabilitas keluarga. Oleh sebab itu, ketahanan keluarga migran akan mencapai titik optimal apabila dukungan emosional dibarengi dengan manajemen ekonomi rumah tangga yang sehat guna meminimalisir potensi pertengkaran akibat tekanan finansial.[36] Pernyataan Ibu Amin mendukung hal

[32] Wahyudi, *Teori Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Modern*, 118.
[33] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[34] Lihat Transkrip Wawancara kode: 04/W/GK-PMI//II/2026
[35] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026
[36] Suharto, *Ketahanan Sosial dan Perlindungan Anak dalam Keluarga Migran*, 141.

ini, di mana keberadaan komunitas KOPI yang membimbing pengelolaan keuangan memberikan rasa aman dan sandaran bagi para istri PMI.

Faktor struktural terakhir yang sangat menentukan keberhasilan program ini adalah ketersediaan infrastruktur hukum di tingkat desa berupa Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kehadiran Posbakum desa menunjukkan bahwa negara hadir hingga ke tingkat akar rumput untuk memberikan solusi atas konflik domestik sebelum meluas ke ranah pengadilan. Bapak Kadeni menjelaskan bahwa Posbakum berfungsi strategis untuk membantu menyelesaikan sengketa rumah tangga secara kekeluargaan.[37] Hal ini membuktikan bahwa struktur sosial di Desa Bringinan memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang sangat taktis dan berwibawa.

Dalam disiplin Hukum Keluarga Islam, keberadaan ruang mediasi desa ini sejalan dengan konsep *Ishlah* (perdamaian) sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perselisihan suami-istri. Mediasi yang dilakukan oleh pimpinan desa memiliki beban moral yang lebih tinggi dan cenderung lebih ditaati oleh warga. Keberhasilan kebijakan hukum keluarga diukur dari ketersediaan instrumen mediasi yang mampu mendeteksi dini konflik dan memberikan solusi tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.[38] Bapak Barno (Kepala Desa) menegaskan bahwa keterlibatan semua unsur dalam Posbakum bertujuan untuk deteksi dini konflik agar tidak terjadi keretakan yang lebih parah, sehingga keutuhan sosial masyarakat tetap terjaga.[39]

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat simpulkan bahwa, keberhasilan Program *Gembok Katresnan* dalam menekan angka perceraian Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Bringinan merupakan hasil dari sinkronisasi struktur sosial yang responsif dan integratif. Melalui keterlibatan aktif Pemerintah Desa, Komunitas KOPI, dan tokoh agama, program ini berhasil mentransformasi risiko keretakan rumah tangga akibat jarak fisik menjadi sebuah ketahanan keluarga yang tangguh. Dengan mengalihkan isu pribadi menjadi tanggung jawab, baik melalui pengawasan pengasuhan anak,

[37] Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/GK-PMI//II/2026
[38] Aziz, *Hukum Keluarga Islam: Penguatan Komitmen Dan Perlindungan Perdata*, 88.
[39] Lihat Transkrip Wawancara kode: 05/W/GK-PMI//II/2026

penguatan batin berbasis nilai spiritual, maupun pemberdayaan ekonomi kreatif. Struktur sosial di Bringinan telah menciptakan jaring pengaman sosial yang mampu menjaga sakralitas ikatan perkawinan sekaligus mewujudkan stabilitas masyarakat desa yang harmonis.

C. Singkroniasai Data Tentang Kontribusi Program *Gembok Katresnan* terhadap Pencegahan Konflik Keluarga dan Perceraian Pekerja Migran di Desa Bringinan

Perceraian di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan fenomena sosiologis yang kompleks, sering kali dipicu oleh kerentanan komunikasi akibat perbedaan zona waktu dan jarak fisik yang memisahkan pasangan dalam waktu lama. Tekanan ekonomi yang semula menjadi alasan keberangkatan justru sering berbalik menjadi pemicu disintegrasi rumah tangga ketika tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan yang kuat. Dalam konteks ini, keluarga migran berada pada risiko ketidakstabilan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penyangga psikologis dan edukatif dari komunitas lokal untuk meminimalisir konflik, sebagaimana ditegaskan dalam teori perlindungan hukum bagi keluarga migran yang harus bersifat menyeluruh dan partisipatif.

Desa Bringinan di Kecamatan Jambon hadir dengan sebuah inovasi struktur sosial yang sinkron melalui Program *Gembok Katresnan*. Menggunakan kerangka fungsionalisme struktural Talcott Parsons, ketahanan keluarga migran di desa ini sangat bergantung pada bagaimana setiap elemen masyarakat menjalankan perannya demi menjaga keseimbangan (*equilibrium*) sosial. Program ini bukan sekadar tatanan geografis, melainkan sebuah instrumen perlindungan berlapis yang melibatkan Pemerintah Desa, Komunitas Purna PMI (KOPI), dan tokoh agama sebagai satu kesatuan sistem fungsional. Struktur inilah yang mentransformasi janji setia menjadi sebuah komitmen publik yang terinstitusi melalui simbolisme gembok dan pengawasan komunal yang ketat namun persuasif.

Salah satu faktor determinan keberhasilan program ini adalah keberanian struktur desa untuk melakukan intervensi pada ranah domestik

yang selama ini dianggap sebagai wilayah privat. Berdasarkan data lapangan, Komunitas KOPI dan Pemerintah Desa mengambil peran aktif sebagai pengawas aspek pengasuhan anak dan persiapan mental pasangan sebelum keberangkatan. Ketua Komunitas KOPI, Bapak Sarni, mengungkapkan bahwa pendampingan dilakukan secara mendetail, termasuk memastikan skema pengasuhan anak agar tidak terjadi celah pengawasan yang hilang. Secara sosiologis, tindakan ini merupakan bentuk adaptasi struktural untuk menggantikan fungsi orang tua yang vakum sementara, yang dalam hukum Islam selaras dengan prinsip *Hifdz an-Nasl* atau perlindungan keturunan secara kolektif oleh komunitas.

Struktur sosial Desa Bringinan juga menciptakan mekanisme pengawasan yang berlapis melalui integrasi antara perangkat formal (RT/RW) dan tokoh masyarakat. Munculnya fenomena "orang tua asuh" bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan inovasi sosial yang efektif untuk menjaga moralitas publik. Bapak Barno selaku Modin memaparkan bahwa melalui pertemuan rutin dan grup komunikasi warga, tetangga menjalankan fungsi kontrol sosial secara halus dengan saling peduli dan mengingatkan jika ada perilaku yang menyimpang dari norma kesetiaan. Pola ini membuktikan bahwa tekanan moral kolektif yang positif jauh lebih berwibawa dalam menjaga stabilitas komunitas dibandingkan dengan sanksi administratif yang kaku.

Kekuatan struktur sosial di Bringinan juga berakar pada kedalaman nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi filter alami terhadap tantangan globalisasi. Mayoritas mantan PMI yang memiliki basis pendidikan pesantren menjadi modal sosial yang kuat untuk tetap memegang teguh norma kesopanan dan agama meskipun telah lama terpapar budaya luar. Pemerintah Desa memanfaatkan filosofi lokal seperti *Eling lan Waspada* (Ingat dan Waspada) serta *Rukun Agawe Santosa* (Rukun membawa kekuatan) sebagai jembatan komunikasi. Hukum keluarga yang berbasis pada kearifan lokal ini cenderung lebih ditaati karena warga merasa memiliki keterikatan batin dan

beban moral yang besar ketika janji tersebut disaksikan langsung oleh otoritas desa yang mereka hormati.

Selain aspek moral, struktur sosial di Bringinan menyadari bahwa motif ekonomi sering kali menjadi akar keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, program ini tidak berhenti pada simbolisme gembok, tetapi masuk ke ranah pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui pembinaan kelompok usaha mikro dan akses modal bagi pasangan yang ditinggal di desa, pemerintah desa memastikan bahwa kiriman uang (*remittance*) dari luar negeri dikelola secara produktif. Aktivitas ekonomi ini berfungsi ganda: sebagai penguat finansial keluarga agar PMI tidak perlu merantau selamanya, serta sebagai media pengalih perhatian yang positif bagi pasangan yang ditinggalkan agar tetap fokus pada kegiatan produktif di desa.

Keberhasilan Program *Gembok Katresnan* juga didukung oleh infrastruktur hukum tingkat desa berupa Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kehadiran Posbakum menunjukkan bahwa negara hadir hingga ke tingkat akar rumput untuk memberikan solusi atas konflik domestik sebelum meluas ke ranah pengadilan. Dalam disiplin Hukum Keluarga Islam, ruang mediasi desa ini sejalan dengan konsep *Ishlah* atau perdamaian sebagai jalan utama menyelesaikan perselisihan. Mediasi yang dilakukan oleh pimpinan desa memiliki legitimasi sosial yang tinggi, memungkinkan deteksi dini konflik agar tidak terjadi keretakan yang lebih parah yang dapat merusak tatanan sosial desa secara keseluruhan.

Sinkronisasi struktur sosial di Desa Bringinan yang bersifat responsif dan integratif menjadi kunci utama keberhasilan menekan angka perceraian PMI. Sinergi antara Pemerintah Desa sebagai regulator, tokoh agama sebagai pembina rohani, dan komunitas KOPI sebagai pengaman sosial telah menciptakan jaring pengaman yang tangguh. Dengan mengalihkan isu individu menjadi tanggung jawab bersama baik melalui pengawasan pengasuhan anak, penguatan batin berbasis spiritual, maupun pemberdayaan ekonomi kreatif Desa Bringinan berhasil mewujudkan stabilitas masyarakat

yang harmonis sekaligus menjaga sakralitas ikatan perkawinan di tengah arus migrasi global yang masif.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desain, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan telah berhasil dalam mentransformasi nilai agama dan keprihatinan sosial menjadi produk hukum formal yang mengikat melalui Perdes tahun 2019 dan dipertegas melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2023. Program ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan sosial awal melalui kombinasi simbol budaya, validasi administratif dokumen kependudukan, dan pemberian nasihat mengenai orientasi migrasi. Namun, tingkat efektivitasnya perlu dibaca dengan hati-hati, karena keberhasilan operasional program sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat desa, peran aktif pasangan PMI dalam mengikuti prosedur, serta ketersediaan data kasus perceraian yang akurat sebagai tolok ukur.
2. Fungsi-fungsi sosial dalam skema AGIL bekerja dalam pelaksanaan program *Gembok Katresnan* di Desa Bringinan didorong oleh berjalannya empat fungsi utama sistem sosial (AGIL). Pertama, Adaptasi, yang diwujudkan melalui transformasi kebijakan desa dan inisiatif kemandirian ekonomi komunitas (UMKM) untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Kedua, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), melalui mobilisasi sumber daya lokal untuk membangun komitmen pasangan. Ketiga, Integrasi, yang tercermin dalam sinergi antara perangkat desa, tokoh desa, tokoh agama, dan purna PMI dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial. Keempat, Pemeliharaan Pola (*Latency*), yang berupaya menjaga motivasi kesetiaan melalui internalisasi nilai *Katresnan* dan keberadaan purna-PMI sebagai *living proof*. Meski demikian, fungsi-fungsi ini menghadapi tantangan

berupa resistensi sosiokultural terhadap intervensi di ranah privat, sehingga keberlanjutan sistem ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjaga komitmen para pihak.

3. Kontribusi program *Gembok Katresnan* terhadap pencegahan konflik keluarga dan perceraian pekerja migran di Desa Bringinan berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang berpotensi memperkuat ketahanan keluarga pekerja migran. Melalui pemanfaatan filosofi lokal dan infrastruktur mediasi (*ishlah*) di tingkat desa, program ini menyediakan ruang negosiasi konflik sebelum berujung pada proses litigasi. Sinergi antara pemerintah desa sebagai regulator, tokoh agama sebagai pembina moral, dan komunitas sebagai pengaman sosial, menciptakan ekosistem pendukung yang dipahami oleh pemerintah desa sebagai upaya preventif untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan catatan, program ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan keutuhan perkawinan dalam kondisi yang merusak martabat; dalam kasus kekerasan atau pelanggaran hak yang berat, perlindungan jiwa dan martabat korban tetap menjadi prioritas utama.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Bringinan disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) turunan dari Peraturan Desa Tahun 2019 yang mengintegrasikan sistem pemantauan digital berbasis data real-time guna memperkuat fungsi peringatan dini terhadap potensi konflik rumah tangga pekerja migran selama mereka berada di luar negeri.
2. Komunitas KOPI dan pemerintah desa perlu memperluas jejaring kemitraan strategis dengan institusi keuangan maupun dinas terkait untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui akses permodalan UMKM yang lebih luas, sekaligus menjadikan model keberhasilan skema AGIL di Desa Bringinan sebagai percontohan kebijakan ketahanan keluarga migran di tingkat regional.
3. Struktur sosial desa perlu memperkokoh peran "Orang Tua Asuh" dan petugas Posbakum Desa melalui pelatihan mediasi bersertifikat bagi

perangkat desa serta tokoh agama agar proses perdamaian atau *ishlah* di tingkat akar rumput memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dan profesional dalam menjaga sakralitas perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Elok. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2024).

Antaranews.com. "Di Ponorogo Jatim kasus perceraian didominasi pasangan muda." *Antara News*, 7 Januari 2023. https://www.antaranews.com/berita/3339780/di-ponorogo-jatim-kasus-perceraian-didominasi-pasangan-muda.

Arifin, Zainul. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan Regulasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Arisandi, Herman. *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Sosiologi Terkemuka Sepanjang Masa*. IRCiSoD, t.t.

Aziz, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam: Penguatan Komitmen dan Perlindungan Perdata*. Surabaya: Bina Ilmu, 2023.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.

Bukhari, Muh. "Strategi Koping, Komunikasi Keluarga, Dukungan Sosial dan Kualitas Perkawinan pada Keluarga Pekerja Migran Indonesi (PMI)." Thesis, IPB University, 2020. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103399.

Dari Sosiologi untuk Indonesia. "Dari Sosiologi untuk Indonesia." Diakses 5 November 2025. https://www.sosiologiku.com/.

Darmawan, Hendra. *Sosiologi Masyarakat Transnasional: Adaptasi dan Integrasi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2023.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 22 September 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 16 Tahun 2019." Diakses 22 September 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 18 Tahun 2017." Diakses 22 September 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017.

Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. "Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo." Diakses 23 September 2025. https://www.bringinan.desa.id/.

Dewi, Rr. Aisa Kartika Puspita, Nita Puspita Dewi, dan Dina Rizqayanti. *Perceraian Berdasarkan Perspektif Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosiologi Modern*. Zenodo, 8 Juni 2023. https://doi.org/10.5281/ZENODO.8016382.

Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society (Edisi Terjemahan Baru)*. London: Macmillan, 2023.

Jatimnow.com. "'*Gembok Katresnan*', Inovasi Desa Bringinan Ponorogo Tekan Angka Perceraian PMI." *jatimnow.com - Berita dan Informasi Jawa Timur Terkini*, 12 Juni 2025. https://jatimnow.com/baca-77133-gembok-katresnan-inovasi-desa-bringinan-ponorogo-tekan-angka-perceraian-pmi.

Kompas.com. "Desa di Ponorogo Punya Gembok Cinta untuk Tekan Angka Perceraian Pekerja Migran Indonesia." Diakses 5 November 2025. https://surabaya.kompas.com/read/2025/06/11/224207078/desa-di-ponorogo-punya-gembok-cinta-untuk-tekan-angka-perceraian-pekerja.

Kompasiana.com. "Mengenal Konsep Fungsionalisme Struktural dalam Pemikiran Talcott Parsons." Diakses 5 November 2025. https://www.kompasiana.com/teguhprasetiyo4934/68981a1d34777c28f856c702/mengenal-konsep-fungsionalisme-struktural-dalam-pemikiran-talcott-parsons.

KP2MI. "KP2MI | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." Diakses 19 September 2025. https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan.

Maimun, Akhmad, dan Hasbi Ash Shiddiqi. "Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2024): 77–87. https://doi.org/10.32528/faj.v22i2.23950.

Marwanti, Theresia Martina. "Ketahanan Sosial dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo di Kabupaten Garut." *Pekerjaan Sosial* 16, no. 2 (2017). https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.113.

Metrowilis.com. "Desa Bringinan Luncurkan '*Gembok Katresnan*' untuk Tekan Angka Perceraian PMI." 12 Juni 2025. https://www.metrowilis.com/2025/06/desa-bringinan-luncurkan-gembok.html.

Nasution, Khoiruddin. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran dan Ketahanan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Nasution, Robby Darwis. "Pemetaan Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 1 (2019): 31–40. https://doi.org/10.31105/jpks.v18i1.1610.

Nizar, Moh, Astiwi Inayah, dan Aman Toto Dwijono. "Penguatan Peran Pemerintah melalui Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran

Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 20, no. 2 (2018): 95–111. https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2.10.

Nurrochman, Mohammad Ilham. "Peran Pekerja Migran dalam membentuk Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Parsons, Talcott. *The Social System (Edisi Klasik Revisi)*. London: Routledge, 2022.

Pebrianti, Charolin. "Kasus Perceraian di Ponorogo Capai 1.990, Didominasi Para TKW." *detiknews*. Diakses 5 November 2025. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1-990-didominasi-para-tkw.

Primasari, Niroini. "Islam dan Ketahanan Keluarga Buruh Migran di Kabupaten Trenggalek." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Purnomo, Agus. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana, 2022.

Putri, Marhamah Ika. "Teori Fungsionalisme Dalam Sosiologi: Pengertian dan Asalnya." *tirto.id*. Diakses 5 November 2025. https://tirto.id/apa-pengertian-teori-fungsionalisme-dalam-sosiologi-gikG.

Santoso, Hadi. "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 111–18. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1664.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Analisis terhadap Fungsi dan Disintegrasi*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Soekanto, Soerjono, dan Suryono Sukanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, 2007.

Suharto, Edi. *Ketahanan Sosial dan Perlindungan Anak dalam Keluarga Migran*. Jakarta: Alfabeta, 2023.

Utamidewi, Wahyu, Deddy Mulyana, dan Edwin Rizal. "Pengalaman Komunikasi Keluarga pada Mantan Buruh Migran Perempuan." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 69–80. https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.7901.

Wahyudi, S. *Teori Integrasi Sosial dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

NO.	PERTANYAAN
1.	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
2.	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
3.	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
4.	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
5.	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?
6.	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?
7.	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
8.	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural

	(misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
9.	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
10.	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
11.	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
12.	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
13.	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
14.	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?

Lampiran 2

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	01/W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Sarni
Identitas	:	Ketua Komunitas KOPI
Tanggal Wawancara	:	02 Februari 2026
Waktu	:	08.00-09.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	PERTANYAAN	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Program *Gembok Katresnan* ini intinya adalah cara warga Desa Bringinan saling menjaga keutuhan rumah tangga saat ditinggal bekerja ke luar negeri. Alurnya dimulai dari lapor ke balai desa untuk didata, lalu calon pekerja dan pasangannya diajak ngobrol dan diberi nasihat supaya punya niat serta tanggung jawab yang sama dalam mencari nafkah. Setelah itu, ada acara pasang gembok bareng-bareng di ruang Pak Lurah sebagai tanda janji setia, dan terakhir, pihak desa akan terus memantau serta mengawasi kabar keluarga yang ditinggalkan agar tetap rukun dan tidak sampai terjadi perceraian. Selanjutnya kita pantau terus kondisi keluarganya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas di lingkungan sosial, kita beri teguran atau nasihat. Kami juga melihat apakah angka perceraian benar-benar turun dengan adanya program ini.

2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
	Informan	Target utamanya adalah keluarga PMI. Dulu kan ada kejadian warga meninggal di luar negeri, padahal sudah punya anak dengan majikannya meski belum cerai dari pasangan di sini. Akhirnya kami dari KOPI bantu urus asuransi kematian dan jaminan pendidikan anaknya sampai kuliah.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	Pak Barno selaku Kepala Desa selalu menyelipkan pembahasan soal KOPI dan *Gembok Katresnan* di setiap pertemuan besar atau musyawarah desa. Karena desa kita tidak terlalu besar, informasi jadi cepat sampai dan masyarakatnya kompak.
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
	Informan	Gembok itu simbol kunci supaya ikatan cinta mereka tetap kuat dan melekat sebagai kunci kebersamaan. Kunci sukses berkeluarga itu dipegang oleh masing-masing pasangan. Katresnan itu sendiri adalah lambang kasih sayang. Nyatanya, dengan adanya simbolis ini, angka perceraian memang berkurang.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?

	Informan	Sudah ada datanya di desa. Sebelum ada program ini, angka perceraian cukup diperhatikan, tapi sekarang penurunannya luar biasa bagus. Program ini dibuat memang supaya masyarakat sadar dan bisa menjaga keutuhan rumah tangga.
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?
	Informan	Desa juga memfasilitasi pelatihan lewat program desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dengan mengundang narasumber dari Ponorogo. Sasarannya keluarga PMI, terutama anak-anak muda yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri supaya tidak terjerumus ke hal negatif seperti pil koplo karena terlalu banyak waktu luang.
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	Kami ajak keluarga PMI untuk aktif di komunitas KOPI, meskipun kadang sulit karena mereka sibuk. Tapi kami tidak berhenti memberikan motivasi kepada mereka.
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Sejauh ini tidak ada kendala berat. Kenapa? Karena Pak Kepala Desa sendiri dulunya mantan PMI di Malaysia. Jadi beliau sangat paham dan komunikasinya enak sekali. Beda ceritanya kalau kepala desanya tidak punya pengalaman di luar negeri atau tidak pernah berorganisasi.

9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
	Informan	Masyarakat sangat mendukung. Harapannya sama, supaya keluarga tetap utuh walaupun salah satu ada di luar negeri. Kami ingin lewat *Gembok Katresnan* ini tidak ada lagi perceraian.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Iya, rata-rata mantan PMI masuk ke organisasi komunitas. Cuma memang kadang ada yang tidak aktif karena sibuk dengan urusan masing-masing, misalnya kalau ada pelatihan di Ponorogo mereka tidak bisa ikut karena ada kerjaan lain.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Kami selalu tanya, kalau orang tuanya berangkat, anaknya dititipkan ke siapa. Biasanya kalau ayah-ibunya berangkat semua, anak dititipkan ke kakek-neneknya. Kami juga sarankan anak-anak itu ikut les tambahan, karena kalau di rumah sendirian tanpa orang tua, pengawasan belajarnya pasti kurang.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Kebanyakan mantan PMI di sini basic-nya dari pondok

		pesantren, jadi budaya Indonesia dan nilai-nilai agamanya masih dipegang kuat. Budaya luar tidak gampang masuk ke Desa Bringinan. Kalau pulang ya tetap jadi orang biasa yang sopan.
13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Pengurus KOPI itu ada yang juga jadi Mbah Modin dan pengurus mushola, jadi semua dilibatkan.
14.	Peneliti	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?
	Informan	Perangkat desa seperti Pak Jemirin (Sekdes) dan Pak Kadeni (Sekretaris KOPI) sangat aktif. Setiap ada warga yang mau berangkat, mereka langsung turun tangan memberi wawasan dan motivasi supaya fokus bekerja dan tetap menjaga keluarganya di rumah. Kalau ada undangan soal PMI di Ponorogo, mereka pasti datang

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	02/W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Kadeni
Identitas	:	Sekertaris Komunitas KOPI
Tanggal Wawancara	:	02 Februari 2026
Waktu	:	09.00-10.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	**PERTANYAAN**	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Calon PMI datang ke balai desa untuk menyerahkan surat-surat seperti KTP dan KK agar datanya bener dan nggak ada yang dipalsukan. Pas data sudah beres, dilanjutkan dengan komunikasi di ruang KOPI untuk membahas rencana cari uang di luar negeri; tujuannya biar hasilnya nanti jadi modal usaha, bukan cuma habis buat pamer atau beli mobil. Nah, buat yang sudah punya pasangan, ada acara pasang gembok bersama di papan bentuk hati di ruang Pak Lurah sebagai simbol janji setia. Terakhir, pihak desa nggak lepas tangan gitu aja, tapi tetap dipantau kondisi keluarganya di rumah. Kalau ada kabar yang kurang enak atau mulai ada masalah, perangkat desa langsung turun tangan kasih nasihat biar rumah tangganya tetap utuh sampai pulang nanti.
2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?

	Informan	Targetnya ya pasangan suami-istri. Kami berikan saran-saran supaya komunikasi mereka tetap bagus meski jauh-jauhan (LDR) agar rumah tangga tetap harmonis.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	Pak Barno (Kepala Desa) sering mensosialisasikan program ini di pertemuan warga atau acara lingkungan seperti yasinan dan arisan. Intinya, kami berusaha lewat jalur formal (kantor desa) maupun sosial supaya mereka ingat komitmen awalnya
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
	Informan	Gembok itu artinya mengikat, sementara Katresnan itu rasa cinta dan kesetiaan. Jadi, dua gembok yang dikaitkan itu simbol bahwa hubungan suami-istri harus tetap nyambung dan utuh. Papan berbentuk "waru" tempat gembok itu juga melambangkan kasih sayang.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?
	Informan	Di Bringinan sebenarnya jumlah PMI tidak terlalu banyak, tapi kami ingin antisipasi karena di wilayah lain di Ponorogo angka cerainya cukup tinggi. Program ini cara kami berikhtiar. Sekarang kalau ada yang mau cerai, mereka harus lewat desa dulu untuk dimediasi dan dipanggil masing-masing pihak agar tidak langsung ke pengadilan atau pengacara
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya,

		dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?
	Informan	Dukungan dari pemerintah desa itu 100 persen. Hebatnya, Pak Lurah (Pak Barno), istrinya, saya sendiri, sampai Kamituwo itu semuanya mantan PMI. Jadi kami paham betul seluk-beluknya, mulai dari yang berangkat secara resmi sampai yang dulu pernah ilegal. Kami ingin membagikan pengalaman itu supaya adik-adik yang mau berangkat tidak salah langkah
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	Keluarga yang di rumah kami ajak untuk terus kumpul bareng di komunitas KOPI. Biarpun kadang susah nemu waktunya karena mereka sibuk urusan harian, kami tidak ada bosannya nyambangi dan memberikan semangat biar mereka tetap kuat dan rukun sampai pasangannya pulang nanti.
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Kendala utamanya adalah dana. Dari desa memang belum ada anggaran khusus untuk KOPI. Jadi kami bergerak secara sosial saja. Untuk biaya operasional, kami coba mandiri dengan bikin peternakan kambing komunitas yang sekarang jumlahnya ada 16 ekor.
9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat

		keberhasilan program?
	Informan	Terkadang ada keluarga yang kurang aktif diajak kerja sama. Bahkan saat kami bantu urus klaim BPJS kematian, ada yang malah mengira kami ini makelar, padahal kami murni membantu.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Mantan PMI sangat dilibatkan sebagai pemberi edukasi berdasarkan pengalaman mereka. Kami sering mengadakan pelatihan pemberdayaan seperti membuat kue untuk para mantan PMI dan keluarga mereka.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Sejak awal kami tanya, kalau orang tua berangkat, anak dititipkan ke siapa. Biasanya kan ke kakek-neneknya. Kami sarankan anak-anak ikut les tambahan karena kalau di rumah saja tanpa bimbingan orang tua, belajarnya pasti kurang maksimal.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Hubungan antara Kepala Desa, pengurus KOPI, dan tokoh masyarakat sangat erat. Kami selalu ingatkan soal aturan *Gembok Katresnan* ini di setiap kesempatan pertemuan warga.

13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Kami punya "Posbakum" di desa untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari urusan tanah sampai mediasi rumah tangga, supaya masalah tidak langsung dibawa ke ranah hukum yang lebih tinggi. Sejauh ini sudah ada sekitar 11 pasangan yang melakukan prosesi gembok di ruangan Pak Lurah.

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	03/ W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Darmaji
Identitas	:	Keluarga PMI
Tanggal Wawancara	:	02 Februari 2026
Waktu	:	10.30-11.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	**PERTANYAAN**	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Program *Gembok Katresnan* ini intinya adalah cara warga Desa Bringinan saling menjaga keutuhan rumah tangga saat ditinggal bekerja ke luar negeri. Alurnya dimulai dari lapor ke balai desa untuk didata, lalu calon pekerja dan pasangannya diajak ngobrol dan diberi nasihat supaya punya niat serta tanggung jawab yang sama dalam mencari nafkah. Setelah itu, ada acara pasang gembok bareng-bareng di ruang Pak Lurah sebagai tanda janji setia, dan terakhir, pihak desa akan terus memantau serta mengawasi kabar keluarga yang ditinggalkan agar tetap rukun dan tidak sampai terjadi perceraian.
2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
	Informan	Targetnya ya calon PMI dan suami atau istri yang ditinggal di desa. Tujuannya supaya kami sepakat soal cara komunikasi, urusan kiriman uang, dan yang paling penting adalah kesetiaan.

		Pak Kamituwo dan Pak Kadeni dari KOPI yang langsung kasih pengarahan supaya keluarga tidak pecah.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	Pak Lurah (Pak Barno) selalu menyampaikan kalau simbol *Gembok Katresnan* ini bukan main-main, tapi untuk memperkuat ikatan batin keluarga PMI.
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
	Informan	Bagi saya, tujuannya ya cari rejeki buat keluarga karena sudah sah jadi suami-istri. Meskipun istri jauh di sana, kami harus ingat janji seperti simbol gembok itu. Apalagi di sini hampir 70% warganya jadi PMI, semua tujuannya sama, cari nafkah.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?
	Informan	Di balai desa itu ada datanya, memang angka cerai turun dari dulu sampai sekarang. Sekarang kalau ada yang mau berangkat, desa pasti tanya pakai PT apa dan ikut siapa supaya kalau ada masalah, desa langsung tahu. Gembok ini bikin hubungan terasa lebih raket (erat), seperti digembok kencang.
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?

	Informan	Desa sangat mendukung karena sudah ada aturannya (Perdes/Perkades) tentang perlindungan PMI. Jadi program ini bukan cuma seremoni saja, tapi sudah jadi kebijakan resmi yang diawasi oleh pemerintah desa dan BPD.
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	Teman-teman dari komunitas KOPI selalu kasih motivasi ke kami. Karena pemasangan gembok dilakukan secara terbuka, tetangga jadi tahu kalau kami sedang berjuang hidup terpisah, jadi muncul rasa saling menjaga.
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Hambatan utamanya ya soal sumber daya atau dana di desa, tapi tetap diusahakan jalan terus karena sudah ada aturannya.
9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
	Informan	Tetangga-tetangga sangat mendukung. Harapannya sama, supaya keluarga tetap utuh dan tidak ada yang bercerai meskipun ditinggal ke luar negeri.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Iya, mantan PMI yang pasangannya berangkat juga ikut dalam prosesi simbolik ini sebagai bentuk usaha menjaga rumah

		tangga.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Sebelum istri saya berangkat ke Hongkong, kami berdua dipanggil dulu untuk sosialisasi oleh Pak Lurah dan pengurus KOPI supaya mental kami siap.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Sangat mendukung, karena 70% warga di sini senasib jadi PMI, jadi sudah jadi norma kalau kita harus saling setia dan tanggung jawab.
13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Kami diarahkan ikut sosialisasi, diwawancarai soal dokumen, lalu mengaitkan gembok di papan berbentuk daun waru (hati). Selain itu, kami juga diminta berjanji secara lisan di depan Pak Lurah untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami.
14.	Peneliti	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?
	Informan	Saya merasa sangat terbantu dengan adanya *Gembok Katresnan* ini. Ini bukan cuma simbol cinta, tapi sudah jadi cara desa untuk menjaga ketertiban dan ketenangan warga di Desa Bringinan.

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	04/ W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Bapak Jemirin
Identitas	:	Sekertaris Desa dan Anggota Kopi
Tanggal Wawancara	:	03 Februari 2026
Waktu	:	08.00-09.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	**PERTANYAAN**	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Program *Gembok Katresnan* ini merupakan bentuk perlindungan menyeluruh bagi warga desa kami, yang mencakup tahap sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali menjadi Purna PMI. Alur kegiatannya dimulai ketika calon PMI melapor ke balai desa untuk mengurus dokumen, di mana kami mewajibkan pasangan suami-istri hadir secara langsung untuk memberikan tanda tangan di hadapan perangkat desa sebagai bentuk restu dan kesepakatan bersama. Dalam kesempatan tersebut, kami juga melakukan sesi wawancara dan edukasi untuk memastikan legalitas perusahaan penyalur serta memberikan pemahaman mendalam mengenai isi kontrak kerja agar warga kami tidak tertipu di kemudian hari. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian proses administrasi dan pembekalan tersebut, kami melakukan pemasangan gembok sebagai simbol komitmen dan kesetiaan keluarga sebelum mereka terpisah jarak demi mencari nafkah

2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
	Informan	: Target utamanya ya warga yang sudah berkeluarga. Program ini muncul karena kami prihatin melihat banyak kasus perceraian yang terjadi gara-gara salah satu jadi PMI. Ada yang merasa rejekinya sudah banyak lalu minta cerai lewat pengacara. Kami ingin pemerintah desa hadir untuk mencegah hal-hal seperti itu.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	: Kami berusaha memberi wawasan sebisa kami. Kami beri gambaran kalau di luar negeri itu tidak selalu indah, ada suka dan dukanya. Tujuannya supaya mental mereka kuat dan tidak gampang lupa diri kalau sudah di sana.
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
	Informan	Gembok itu ibarat kunci, dan Katresnan itu cinta. Jadi maknanya "Kunci Cinta". Ini adalah simbol ikatan perkawinan supaya tidak putus di tengah jalan atau kandas. Kami ingin mengingatkan kalau tujuan utama ke luar negeri itu untuk cari nafkah buat keluarga, bukan untuk yang lain-lain.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?

	Informan	Tentu saja, kami tidak asal jalan. Program *Gembok Katresnan* ini sudah punya dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Kepala Desa (Perkades) tahun 2023.
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?
	Informan	Menurut saya ini sangat membantu warga. Dengan dipertemukannya suami-istri sebelum berangkat, mereka jadi makin paham tujuan satu sama lain. Program ini bikin mereka selalu ingat dengan keluarganya di rumah meskipun sudah bertahun-tahun di negeri orang.
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	*Gembok Katresnan* ini sudah jadi program unggulan di desa kami. Semua sudah jadi kesepakatan bersama dan masuk dalam poin penting bagi siapa saja warga yang mau berangkat jadi pekerja migran.
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Kami juga bantu mereka menyusun rencana, misalnya kalau sudah pulang nanti uangnya mau buat apa. Kami ajarkan skala prioritas. Kadang ada yang mau langsung beli mobil, tapi kami beri masukan kalau investasi emas atau tanah itu lebih untung buat masa depan. Kami juga ada program pemberdayaan seperti pelatihan usaha atau bantuan izin label halal buat yang

		buka usaha katering.
9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
	Informan	Sejauh ini, tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum di Desa Bringinan sangat tinggi karena mereka merasa program ini adalah kebutuhan bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kami tidak melihat adanya partisipasi yang kurang merata sebagai penghambat, karena sejak awal kami mewajibkan pelaporan yang terintegrasi di tingkat desa sehingga setiap calon PMI pasti terlibat. Mengenai keterlibatan mantan Pekerja Migran Indonesia (Purna PMI), mereka sangat kami libatkan dalam struktur program sebagai mentor atau pemberi edukasi bagi calon-calon baru.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Untuk memastikan kontrol sosial tetap berjalan meskipun pasangan terpisah jarak, struktur sosial Desa Bringinan mengandalkan komunikasi melalui perangkat desa dan komunitas KOPI yang selalu memantau kondisi keluarga yang ditinggalkan. Kami mengangkat nilai budaya lokal seperti guyub rukun dan kesetiaan sebagai norma. *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut melalui simbolisasi gembok agar nilai kesetiaan tersebut memiliki bentuk nyata dan diingat oleh kedua belah pihak. Mekanisme koordinasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI dilakukan secara rutin melalui pertemuan bulanan dan pengajian, di mana tokoh

		agama berperan memberikan penguatan spiritual soal tanggung jawab perkawinan, sehingga mampu mencegah terjadinya keretakan sosial di tengah masyarakat.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Selain Program *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga menciptakan pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha bersama bagi Purna PMI yang dikelola agar penghasilan dari luar negeri tidak habis hanya untuk konsumsi, melainkan menjadi modal usaha jangka panjang. Mekanisme ini bekerja menjaga ketahanan keluarga dengan cara memastikan bahwa ketika PMI kembali ke desa, mereka sudah memiliki kemandirian ekonomi sehingga tidak perlu lagi kembali ke luar negeri secara berulang-ulang, yang pada akhirnya akan menjaga keutuhan keluarga secara permanen.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Di Desa Bringinan, nilai budaya yang menjadi fondasi utama adalah Eling lan Waspada serta filosofi Rukun Agawe Santosa. Norma kesetiaan di sini bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab moral kepada keluarga. Kami menyadari bahwa godaan saat terpisah jarak sangat besar, sehingga Program *Gembok Katresnan* ini kami jadikan sebagai jembatan untuk menghidupkan kembali nilai Komitmen Saklawase.
13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai

		elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Untuk menghindari keretakan social kami menjalankan koordinasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI itu sendiri. Pemerintah desa berperan sebagai pembuat aturan yang memastikan perlindungan hukum, sementara tokoh agama berperan memberikan siraman rohani mengenai pentingnya menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga dalam setiap pertemuan warga. Komunitas PMI kami posisikan sebagai pengaman social. Mereka saling memantau dan memberikan dukungan moral jika ada salah satu keluarga PMI yang sedang mengalami masalah di desa.
14.	Peneliti	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?
	Informan	Selain *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga menciptakan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Purna PMI melalui pembinaan kelompok usaha mikro. Adapun dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses modal bagi istri atau suami yang tinggal di desa, agar uang kiriman dari luar negeri dapat dikelola secara produktif. Dengan adanya kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga, tekanan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu pertengkaran keluarga dapat diminimalisir. Kami ingin memastikan bahwa ketika PMI pulang, mereka memiliki tabungan atau usaha yang mapan sehingga tidak perlu kembali berangkat ke luar negeri.

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	05/ W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Bapak Barno
Identitas	:	Modin
Tanggal Wawancara	:	03 Februari 2026
Waktu	:	09.30 – 10.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	**PERTANYAAN**	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Terima kasih atas pertanyaannya, Pak/Bu. Jadi begini, Program *Gembok Katresnan* itu sebenarnya cara kami di desa untuk menjaga supaya hubungan antar warga, terutama suami-istri dan keluarga yang ditinggal merantau mencari nafkah diluar negeri, tetap rukun dan kuat. Katresnan itu kan artinya kasih sayang, jadi kami ingin kasih sayang itu terkunci rapat dan tidak mudah lepas.
2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
	Informan	Sasaran utama dari kegiatan *Gembok Katresnan* seperti bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, dan pembinaan agama adalah para warga Desa Bringinan yang tengah merantau sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarga atau pasangan yang mereka tinggalkan di rumah. Kelompok ini dipilih secara khusus karena mereka

		memiliki tantangan komunikasi dan jarak yang cukup berat yang sering kali memicu keretakan rumah tangga, sehingga melalui forum komunikasi jarak jauh dan pembinaan agama, kami ingin memastikan bahwa meski jauh di luar negeri demi mencari nafkah, ikatan batin dan fondasi iman mereka tetap kuat untuk menjaga kesetiaan. Dengan membekali calon pengantin migran melalui bimbingan pranikah yang matang, desa berharap mereka memiliki kesiapan mental untuk menghadapi ujian perpisahan sementara, sehingga tujuan merantau untuk menyejahterakan keluarga tidak mengorbankan keutuhan kasih sayang yang telah dikunci rapat dalam semangat Katresnan.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	Tokoh Agama dan perangkat desa berperan sebagai penjaga sekaligus penengah, di mana Tokoh Agama rutin memberikan bimbingsn mengenai pentingnya menjaga amanah dan kesetiaan sebagai ibadah bagi warga yang merantau. Sementara itu, perangkat desa hadir menyediakan ruang mediasi kekeluargaan jika terjadi kesalahpahaman jarak jauh, guna memastikan bahwa hubungan antara PMI di luar negeri dan keluarga di Desa Bringinan tetap rukun serta terlindungi secara sosial.
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
	Informan	Makna filosofis *Gembok Katresnan* terletak pada kata Gembok sebagai perlambang untuk mengunci rapat kesetiaan agar tidak

		tergoda pihak lain, dan Katresnan yang berarti kasih sayang tulus yang menjadi pengikat meski terpisah jarak. Simbol ini secara nyata bagi keluarga PMI dilakukan melalui prosesi penguncian gembok nama pasangan di desa sebelum berangkat merantau, yang berfungsi sebagai komitmen bahwa di mana pun mereka bekerja, hati mereka telah terkunci dan tertinggal di rumah demi kesejahteraan keluarga di Desa Bringinan.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?
	Informan	Tentu, mengenai data tersebut, perangkat desa memang mencatat laporan kependudukan di buku besar desa, termasuk perubahan status perkeluargaan warga yang merantau. Sejak program *Gembok Katresnan* berjalan, kami melihat adanya kecenderungan penurunan angka perselisihan dan perceraian keluarga PMI yang cukup baik, di mana sebelumnya kasus perceraian sering dipicu oleh kurangnya komunikasi jarak jauh dan masalah pengelolaan kiriman uang. Meskipun perubahan ini bertahap, kehadiran program terbukti menjadi pengingat bagi pasangan migran untuk lebih sabar dan terbuka satu sama lain, sehingga banyak masalah rumah tangga yang dulunya berakhir di pengadilan agama, kini bisa diredam dan diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa.
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?

	Informan	Desa sangat mendukung program ini. *Gembok Katresnan* ini sudah jadi program unggulan di desa kita dan masuk dalam poin penting yang harus dilalui warga yang mau jadi pekerja migran.
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	Peran solidaritas dan kontrol sosial bagi warga merantau didukung dengan peran tetangga dan komunitas PMI yang bertindak sebagai keluarga kedua yang saling menjaga serta mengingatkan jika ada perilaku keluarga yang mulai menyimpang dari komitmen *Gembok Katresnan*. Melalui komunitas ini, para istri atau suami yang ditinggal merantau tidak merasa sendirian karena ada forum rutin untuk berbagi cerita dan solusi, sementara pengawasan lingkungan yang rukun dapat mencegah terjadinya fitnah atau godaan pihak ketiga.
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Tantangan yang menurut saya sulit adalah keterbatasan dalam hal anggaran maupun tokoh yang berperan untuk melakukan pendampingan dan konsultasi hukum bagi keluarga PMI yang bermasalah. Selain itu, kami juga berbenturan dengan hambatan koordinasi jarak jauh karena perbedaan waktu yang terkadang membuat komunikasi antara perangkat desa dengan warga di luar negeri tidak bisa secepat yang diharapkan. Di sisi lain, masih ada anggapan yang menganggap urusan rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dicampuri pihak luar,

		sehingga kami bertahap meyakinkan warga bahwa program *Gembok Katresnan* bukan untuk mencampuri pribadi, melainkan bentuk perlindungan dan dukungan bersama demi keutuhan keluarga masyarakat Desa Bringinan.
9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
	Informan	Menurut pengamatan saya, tingkat partisipasi keluarga PMI di Desa Bringinan sudah cukup baik, terutama pada kegiatan masyarakat seperti doa bersama atau kegiatan pemasangan *Gembok Katresnan*. Akan tetapi, kami akui adanya partisipasi yang kurang merata karena masih ada sebagian keluarga migran yang sulit meluangkan. Jika partisipasi tidak merata keberhasilan program jadi kurang bagus karena pesan-pesan keagamaan dan penguatan mental tidak maksimal. Kami berupaya mengajak seluruh keluarga PMI untuk ikut aktif, supaya tidak ada salah paham dalam rumah tangga mereka ke depannya.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Tentu mas, mantan PMI di Desa Bringinan kami libatkan agar bisa membagikan pengalaman dan solusi cepat dalam menghadapi godaan serta kesulitan komunikasi selama merantau. Keluarga yang sedang ditinggal merantau dapat jadi lebih nyaman terbuka kepada mantan perantau yang telah terbukti berhasil menjaga keutuhan rumah tangga hingga kembali ke desa. Kehadiran mantan PMI memberikan bukti

		bahwa kesetiaan dalam program *Gembok Katresnan* bisa diwujudkan, sehingga nasihat yang diberikan jauh lebih menyentuh dan mudah diterima.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Desa Bringinan memastikan kerukunan keluarga PMI tetap terjaga dengan adanya komunitas KOPI dan pengawasan yang melibatkan pengurus RT/RW serta tokoh masyarakat sebagai orang tua asuh bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui pertemuan rutin di tingkat lingkungan dan grup komunikasi warga, tetangga sekitar menjalankan fungsi kontrol sosial secara halus, yaitu dengan saling peduli dan mengingatkan jika ada perilaku yang dirasa kurang pas atau menyimpang dari kesepakatan *Gembok Katresnan*. Cara ini memastikan bahwa upaya pembinaan keagamaan dan kesetiaan tidak berhenti meski pasangan terpisah jarak, karena seluruh warga desa ikut bertanggung jawab menjaga kehormatan setiap keluarga migran sebagai satu kesatuan masyarakat yang rukun.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Budaya Guyub Rukun dan filosofi Mangan Ora Mangan Kumpul menjadi kunci karena menempatkan keutuhan keluarga di atas segalanya, meski budaya Ewuh Pakewuh dapat menghambat warga untuk saling menegur jika ada masalah. Program *Gembok Katresnan* memanfaatkan sisi kebersamaan dengan menjadikan kesetiaan sebagai tanggung jawab bersama

		bagi warga desa, sehingga simbol gembok tersebut merupakan pengikat kehormatan keluarga besar Desa Bringinan yang harus dijaga dari perpecahan.
13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Kami sangat dilibatkan dalam urusan ini. Koordinasi antara perangkat desa, tokoh agama seperti saya (Modin), dan pengurus komunitas itu berjalan sangat baik karena tujuannya satu: menjaga keutuhan rumah tangga warga. Karena ini sudah menjadi kesepakatan dan masuk dalam program kerja desa, pelaksanaannya jadi lebih teratur. Ini cara pemerintah desa hadir untuk memastikan warganya tetap rukun dan punya pegangan moral meskipun sedang jauh dari pasangan.
14.	Peneliti	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?
	Informan	Selain *Gembok Katresnan* Desa Bringinan juga menciptakan wadah pembinaan ekonomi bagi keluarga yang ditinggal merantau dan para mantan PMI. Mekanismenya melalui pelatihan keterampilan UMKM, seperti pengolahan hasil bumi atau kerajinan tangan, sehingga uang kiriman dari luar negeri tidak habis untuk kebutuhan konsumsi, melainkan diputar menjadi modal usaha produktif di desa. Program ini memastikan keutuhan keluarga tetap terjaga karena pihak yang di rumah memiliki kesibukan positif yang menghasilkan pendapatan tambahan, sementara mantan PMI dapat langsung mandiri tanpa harus kembali merantau, sehingga keutuhan keluarga yang telah dikunci lewat *Gembok Katresnan* semakin

		kuat berkat kemandirian ekonomi.

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	06/ W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Ibu Amin
Identitas	:	Keluarga PMI
Tanggal Wawancara	:	03 Februari 2026
Waktu	:	10.30-11.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	**PERTANYAAN**	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Saya dan suami merasa sangat terbantu mengikuti program *Gembok Katresnan* di kantor desa sebelum beliau berangkat menjadi buruh migran ke Brunei Darussalam tiga bulan yang lalu. Sebelum keberangkatan, kami mengikuti wawancara bersama Pak Lurah dan pengurus KOPI untuk memastikan kelengkapan dokumen serta menerima arahan mengenai cara menjaga kerukunan rumah tangga selama terpisah jarak. Sebagai bentuk niat, kami bersama-sama memasangkan gembok pada papan simbol hati dan mengucapkan janji setia secara lisan di hadapan perangkat desa agar hubungan kami tetap kuat dan utuh hingga suami kembali pulang nanti.
2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh, pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
	Informan	Target utama dari setiap kegiatan dalam program *Gembok Katresnan* ini sebenarnya adalah kami, para calon pekerja

		migran beserta pasangan yang akan ditinggalkan, karena kami dianggap kelompok yang paling rawan mengalami masalah keretakan rumah tangga akibat jarak jauh. Selain kami, pengurus desa, komunitas KOPI dan tokoh agama juga dilibatkan untuk memberikan pembinaan agar komitmen kesetiaan dapat terjaga demi keutuhan keluarga. Tokoh tersebut dipilih agar ada kerja dalam memastikan bahwa keberangkatan suami ke luar negeri tidak hanya membawa pulang rezeki, tetapi juga tetap menjaga kerukunan rumah tangga kami di desa.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	Waktu sosialisasi, Pak Barno (Kepala Desa) menjelaskan kalau *Gembok Katresnan* ini bukan cuma pajangan. Itu simbol supaya kami berdua selalu ingat satu sama lain. Pak Lurah ingin supaya warga Desa Bringinan yang cari nafkah di luar negeri itu rumah tangganya tetap adem ayem dan nggak sampai cerai. Adapun dalam bimbinganya pak kepala desa memberikan penguatan mental buat pasangan yang mau LDR (jarak jauh). Tujuannya biar kami siap menghadapi ujian selama pisah ranjang karena pekerjaan.
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?
	Informan	Bagi saya, gembok itu ya simbol supaya hubungan kami tetap langgeng. Jadi pas suami di Brunei, dia ingat kalau ada "gembok cinta" di kantor desa yang harus dijaga. Ini semacam pengingat batin biar nggak macam-macam di sana. Program ini

		bukan sekadar adat-adatan saja, tapi memang sudah diatur resmi lewat Peraturan Kepala Desa. Jadi pemerintah desa memang serius mau melindungi keluarga para pekerja migran di sini.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?
	Informan	Mengenai data pastinya, pihak kantor desa dan pengurus KOPI memang selalu mencatat setiap kejadian di lingkungan kami, termasuk angka perceraian di kalangan keluarga pekerja migran. Setahu saya dari penjelasan Pak Lurah saat pertemuan warga, sejak program *Gembok Katresnan* ini dijalankan, angka perceraian di desa kami memang mengalami penurunan karena adanya penguatan komitmen di awal dan pendampingan rutin. Kami merasa program ini sangat bermanfaat sebagai pengingat agar janji setia yang sudah diucapkan di kantor desa tidak mudah goyah, sehingga keutuhan rumah tangga warga yang bekerja di luar negeri tetap terjaga dengan baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?
	Informan	Menurut pengamatan saya sebagai warga, keberhasilan program *Gembok Katresnan* ini sangat bergantung pada dukungan dari Bapak Lurah dan perangkat desa yang menetapkan aturan jelas serta menyediakan anggaran khusus untuk mendampingi keluarga kami. Peran lembaga komunitas

		KOPI juga penting dalam mendampingi kami, sementara tokoh agama dan masyarakat membantu kami dalam penguatan batin agar tetap setia dengan keluarga. Kerja sama yang rukun antara semua pihak di tingkat desa inilah yang menjadi pondasi kuat, sehingga program ini dapat berjalan secara nyata untuk melindungi keutuhan rumah tangga kami yang ditinggal bekerja ke luar negeri.
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	Peran solidaritas dari tetangga dan pengurus KOPI di desa kami sangatlah besar dalam menjaga komunikasi keluarga selama suami bekerja di luar negeri. Kami merasa tidak sendirian karena sesama istri pekerja migran sering berkumpul untuk saling menguatkan, berbagi cerita, dan mengingatkan agar kami tetap menjaga amanah serta kepercayaan yang sudah diberikan suami. Selain itu, adanya kontrol sosial dari lingkungan sekitar membuat kami merasa selalu diawasi, sehingga kami lebih berhati-hati dalam bertindak dan tetap fokus mengurus rumah tangga serta anak-anak di rumah
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Menurut pengamatan saya, hambatan yang paling sulit diatasi adalah merubah pandangan lama sebagian warga yang merasa urusan rumah tangga tidak perlu dicampuri oleh perangkat desa melalui program seperti *Gembok Katresnan*. Adanya keterbatasan dana desa untuk menjangkau semua keluarga pekerja migran secara rutin serta kesulitan dalam mengatur

		waktu koordinasi antara pengurus KOPI dengan kami yang sibuk mengurus anak dan sawah juga menjadi tantangan. Namun, berkat kesabaran Bapak Lurah dalam memberi pengertian bahwa ini demi perlindungan hukum dan keutuhan keluarga, lambat laun kami mulai menyadari pentingnya aturan desa ini di tengah segala keterbatasan sarana yang ada.
9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
	Informan	Sebenarnya keluarga pekerja migran di desa kami sangat antusias karena kami merasa program ini memberikan perlindungan nyata bagi keutuhan rumah tangga dan kejelasan urusan surat-menyurat. Namun, memang harus diakui bahwa partisipasi masyarakat umum masih belum merata sepenuhnya karena ada beberapa warga yang merasa kegiatan ini hanya dikhususkan bagi mereka yang hendak berangkat ke luar negeri saja. Ketidaksamaan peran serta ini terkadang menjadi penghambat karena dukungan lingkungan sekitar sangat kami butuhkan untuk menciptakan suasana desa yang saling menjaga dan mengawasi secara positif. Meski begitu, pihak pengurus KOPI dan perangkat desa terus berusaha mengajak seluruh warga agar lebih peduli, sehingga tujuan dari program *Gembok Katresnan* bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang di desa.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Para mantan Pekerja Migran Indonesia atau yang kami sebut

		purna-PMI dilibatkan dalam struktur program *Gembok Katresnan* ini, terutama melalui wadah pengurus KOPI di desa kami. Mereka adalah pendamping yang memberikan pemahaman berdasarkan pengalaman saat bekerja di luar negeri, mulai dari cara mengelola keuangan hasil kerja hingga tips menjaga komunikasi agar tetap harmonis dengan pasangan di rumah. Menurut saya, peran mereka sangat baik karena mereka lebih mengerti suka duka dan godaan yang kami hadapi.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Dengan adanya program ini, desa jadi punya cara untuk memantau warganya. Ini bukan cuma soal gembok, tapi soal kebijakan sosial desa biar nggak ada keretakan atau masalah di masyarakat gara-gara banyak warga yang jadi PMI. : Setelah pasang gembok pun, kalau ada sosialisasi atau pertemuan lagi dari desa, kami sering diundang. Jadi komunikasinya tetap nyambung terus antara warga dan pemerintah desa.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Di Desa Bringinan nilai budaya yang paling kami junjung tinggi adalah rasa *guyub rukun* dan menjaga kehormatan keluarga, di mana kesetiaan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga di depan Tuhan. Program *Gembok Katresnan* sangat pintar memanfaatkan norma tersebut dengan mengubah janji setia yang biasanya hanya urusan pribadi menjadi sebuah

		adat desa yang disaksikan oleh perangkat dan tokoh masyarakat, sehingga kami merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk tidak melanggarnya. Meskipun ada rasa sungkan karena urusan hati seolah dipantau orang banyak, namun justru nilai kepatuhan kepada pimpinan desa dan rasa malu jika melanggar janji di depan umum itulah yang menjadi penguat bagi kami.
13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Mekanisme koordinasi di desa kami berjalan sangat erat, di mana pemerintah desa berperan sebagai pemberi aturan hukum, tokoh agama sebagai penguat batin, dan pengurus KOPI sebagai pendamping kami di lapangan. Sinergi ini menciptakan hubungan yang saling mengisi, seperti saat Bapak Lurah mengurus surat izin, tokoh agama memberikan siraman rohani tentang berkah keluarga, dan teman-teman purna-PMI membagikan pengalaman nyata mereka agar kami tidak salah langkah.
14.	Peneliti	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?
	Informan	Selain program *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga telah membentuk wadah khusus bernama Komunitas Pekerja Migran Indonesia atau KOPI yang bekerja nyata dalam menjaga keluarga kami melalui pendampingan berkelanjutan. Program komunitas KOPI dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pengelolaan keuangan hasil kerja di luar negeri agar kiriman uang dari suami tidak habis begitu saja, melainkan bisa menjadi

		modal usaha atau tabungan masa depan di desa. Selain itu, pengurus KOPI yang terdiri dari purna-PMI rutin mengadakan pertemuan warga untuk berbagi informasi perlindungan hukum serta menjadi tempat mengadu jika muncul masalah komunikasi atau sengketa dalam rumah tangga. Melalui kebijakan desa yang mendukung adanya komunitas ini, kami para istri merasa memiliki sandaran yang kuat karena masalah kami tidak hanya dipikul sendiri, melainkan dibantu penyelesaiannya secara kekeluargaan agar keutuhan keluarga tetap terjaga selama suami merantau.

LAMPIRAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nomor Wawancara	:	07/W/GK-PMI//II/2026
Nama Lengkap	:	Bapak Barno
Identitas	:	Kepala Desa Bringinan
Tanggal Wawancara	:	04 Februari 2026
Waktu	:	08.00-09.30 WIB.

Transkrip Wawancara

NO.	**PERTANYAAN**	
1.	Peneliti	Apa saja bentuk kegiatan spesifik yang dilakukan dalam Program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir?
	Informan	Program *Gembok Katresnan* ini sebenarnya merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa tahun 2019 untuk melindungi warga kami yang menjadi pekerja migran. Alur kegiatannya kami mulai dari tahap pelaporan wajib bagi siapa pun yang hendak berangkat, dilanjutkan dengan pertemuan keluarga di kantor desa untuk penandatanganan berkas bersama pasangan. Dalam pertemuan tersebut, kami memberikan nasihat dari hati ke hati mengenai tujuan bekerja serta cara menjaga keutuhan rumah tangga, yang kemudian diakhiri dengan prosesi simbolis pemasangan gembok bersama di papan khusus sebagai pengikat batin. Melalui rangkaian kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang merantau memiliki landasan komitmen yang kuat dan perlindungan dokumen yang jelas sebelum meninggalkan keluarga di desa.
2.	Peneliti	Siapa saja yang menjadi target utama dari setiap kegiatan (misalnya, bimbingan pranikah, forum komunikasi jarak jauh,

		pembinaan agama) dalam program *Gembok Katresnan*, dan mengapa kelompok tersebut dipilih?
	Informan	Target utama dari setiap kegiatan dalam *Gembok Katresnan* ini tentu saja pasangan suami-istri yang salah satunya akan berangkat menjadi pekerja migran, karena mereka adalah pondasi utama keluarga yang paling rentan terkena ujian jarak jauh. Kami memilih kelompok ini agar sejak awal mereka memiliki kesiapan mental, kelengkapan dokumen yang sah, serta komitmen yang kuat melalui bimbingan agama dan arahan dari desa. Selain itu, kami juga merangkul para purna-pekerja migran dan tokoh masyarakat sebagai pendamping agar mereka bisa ikut mengawasi serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemilihan ini bertujuan supaya ada kerja sama yang rukun di lingkungan desa dalam menjaga keutuhan rumah tangga warga kami, sehingga keberangkatan ke luar negeri dapat membawa kesejahteraan tanpa merusak keharmonisan keluarga.
3.	Peneliti	Bagaimana peran konkret Tokoh Agama atau perangkat desa dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas untuk memperkuat ikatan keluarga PMI melalui program ini?
	Informan	Intinya, kami ingin menunjukkan kalau desa itu peduli. Saya dan teman-teman perangkat sering kasih motivasi. Kami ingatkan terus, sesibuk apa pun di sana, keluarga di rumah jangan sampai dilupakan. Kita jaga bareng-bareng biar stabilitas desa juga tetap tenang dan rukun.
4.	Peneliti	Apa makna filosofis atau simbolis dari penggunaan nama '*Gembok Katresnan*, dan bagaimana simbol tersebut diintegrasikan dalam upaya penguatan komitmen pernikahan bagi keluarga PMI?

	Informan	Harapan paling besar ya supaya rumah tangga warga Bringinan tetap utuh. Kami prihatin kalau dengar ada warga yang sukses di luar negeri tapi pulangnya malah bawa surat cerai. Nah, lewat program ini kami berikhtiar supaya hal-hal seperti itu nggak terjadi lagi.
5.	Peneliti	Apakah terdapat data atau catatan di desa mengenai tren angka perceraian keluarga PMI? Jika ada, apakah terdapat penurunan angka perceraian yang berhasil dicapai setelah program *Gembok Katresnan* dilaksanakan?
	Informan	Kami di pemerintah desa memang selalu mencatat data setiap perubahan status warga, termasuk laporan dari pengurus KOPI mengenai kondisi rumah tangga para pekerja migran di Desa Bringinan. Sejak Perdes tahun 2019 dan program *Gembok Katresnan* ini kami jalankan, kami melihat adanya penurunan angka perceraian yang cukup membanggakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa tercapai karena warga merasa ada beban moral dan janji suci yang sudah dikunci di kantor desa, sehingga mereka lebih sungkan untuk berpisah dan lebih giat mencari solusi jika ada masalah komunikasi. Kami merasa bersyukur karena dengan adanya catatan ini, kami bisa membuktikan bahwa pendampingan dari desa benar-benar membantu menjaga keutuhan keluarga warga kami yang sedang mengadu nasib di luar negeri.
6.	Peneliti	Apa saja Faktor-faktor struktural di tingkat desa (misalnya, dukungan kebijakan desa, ketersediaan anggaran, atau peran lembaga formal/informal) yang paling penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan program *Gembok Katresnan*?

	Informan	*Gembok Katresnan* ini sudah jadi program unggulan di Desa Bringinan. Ini bukan cuma kemauan saya sendiri, tapi sudah jadi kesepakatan warga dan masuk dalam poin penting yang harus dijalankan bagi siapa pun yang mau berangkat jadi pekerja migran.
7.	Peneliti	Bagaimana peran solidaritas dan kontrol sosial dari tetangga atau Komunitas PMI dalam menjaga perilaku dan komunikasi keluarga yang salah satu pasangannya menjadi PMI?
	Informan	Kami juga dibantu teman-teman dari KOPI (Komunitas Pekerja Migran Indonesia). Jadi semua pihak terlibat, mulai dari perangkat sampai tokoh masyarakat. Kalau keluarga-keluarga di desa ini rukun, otomatis desanya juga jadi tenang dan tenteram. Itulah tugas kami di pemerintahan desa, menjaga warga dari hal-hal yang bisa merusak kerukunan sosial.
8.	Peneliti	Bagaimana tantangan atau hambatan utama yang bersifat struktural (misalnya, resistensi norma lama, keterbatasan sumber daya desa, atau kesulitan koordinasi) yang paling sulit diatasi selama implementasi program?
	Informan	Tantangan paling berat yang kami hadapi di tingkat desa adalah merubah kebiasaan lama sebagian warga yang merasa urusan rumah tangga itu urusan pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh aturan desa atau Perdes. Selain soal cara pandang itu, kami juga sering terbentur pada keterbatasan anggaran desa untuk menyediakan sarana pendampingan yang lebih lengkap serta sulitnya mencocokkan waktu koordinasi antara pengurus KOPI yang sibuk dengan warga yang punya jadwal kerja harian. Namun, kami dari pemerintah desa terus berusaha memberi pengertian bahwa keterlibatan desa ini adalah bentuk perlindungan hukum dan batin, supaya warga tidak merasa sendirian saat menghadapi masalah di perantauan. Pelan-pelan

		hambatan koordinasi ini mulai hilang karena warga sendiri yang merasakan manfaatnya, yakni rumah tangga mereka jadi lebih tenang dan urusan administrasi keberangkatan jadi lebih tertib.
9.	Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi keluarga PMI dan masyarakat umum dalam kegiatan program? Apakah partisipasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan program?
	Informan	Sejauh ini keluarga pekerja migran sangat antusias karena merasa butuh perlindungan hukum dan penguatan batin sebelum berangkat, sehingga tingkat kehadiran dalam prosesi gembok sangatlah tinggi. Namun, kami akui partisipasi masyarakat umum memang belum merata sepenuhnya karena ada sebagian warga yang masih menganggap program ini hanya urusan pribadi para pekerja migran saja. Ketidaksamaan peran terkadang menjadi hambatan bagi kami dalam menciptakan pengawasan yang menyeluruh di tingkat RT dan RW agar semua warga ikut menjaga kerukunan tetangganya. Oleh karena itu, pemerintah desa terus berupaya mengajak seluruh masyarakat melalui pengajian atau pertemuan desa supaya mereka paham bahwa menjaga keutuhan keluarga pekerja migran adalah tanggung jawab kita bersama demi ketenteraman Desa Bringinan.
10.	Peneliti	Apakah mantan Pekerja Migran Indonesia dilibatkan dalam struktur program? Jika ya, apa fungsi spesifik mereka dalam memberikan edukasi atau dukungan, dan seberapa efektif peran mereka tersebut?
	Informan	Purna-PMI kami libatkan dalam struktur program melalui komunitas KOPI sebagai pembimbing bagi warga yang akan berangkat. Tugas utamannya adalah membagikan pengalaman

		seperti cara mengelola keuangan hasil merantau dan tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran mereka sangat efektif karena nasihatnya lebih mudah diterima dan dipercaya oleh warga dibandingkan teori dari perangkat desa. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan komitmen menjaga keutuhan keluarga.
11.	Peneliti	Bagaimana struktur sosial Desa Bringinan memastikan fungsi sosialisasi nilai dan kontrol sosial dalam keluarga PMI tetap berjalan optimal meskipun pasangan terpisah jarak?
	Informan	Menurut warga, ini sangat membantu. Dengan dipertemukan di desa sebelum berangkat, suami dan istri jadi sama-sama tahu tujuannya apa. Jadi kalau nanti di sana sudah bertahun-tahun, mereka tetap punya "pengingat" di desa supaya ingat pulang dan ingat anak-istri atau suami di rumah.
12.	Peneliti	Apa saja norma sosial atau nilai budaya lokal yang paling menonjol di Desa Bringinan yang mendukung (atau menghambat) nilai kesetiaan dan tanggung jawab perkawinan PMI, dan bagaimana *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma tersebut?
	Informan	Nilai budaya yang paling menonjol di Desa Bringinan adalah rasa *guyub rukun* dan menjaga kehormatan keluarga, di mana kesetiaan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga bersama. Program *Gembok Katresnan* memanfaatkan norma ini dengan mengubah janji pribadi menjadi prosesi yang disaksikan perangkat desa dan tokoh masyarakat, sehingga warga merasa memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk tidak melanggar janji di depan umum. Melalui cara ini, budaya saling menjaga nama baik di desa justru menjadi kekuatan utama yang mendukung ketahanan perkawinan para pekerja migran kami.

13.	Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas PMI sebagai elemen struktur sosial dapat memperkuat integrasi sosial dan menghindari disfungsi (keretakan) sosial di desa?
	Informan	Koordinasi di desa kami berjalan melalui pemerintah desa sebagai pembuat aturan, tokoh agama sebagai pembina rohani, dan komunitas KOPI sebagai pendamping. Kerja sama ini bermanfaat dalam mengatasi masalah keluarga pekerja migran supaya bisa dideteksi lebih dini dan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum terjadi keretakan yang lebih parah. Dengan melibatkan semua unsur, kami berhasil menghindari perpecahan di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga yang merantau tetap terhubung erat dengan kehidupan sosial di desa.
14.	Peneliti	Apa yang diciptakan (program/kebijakan) oleh Desa Bringinan selain program *Gembok Katresnan*, dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja menjaga ketahanan keluarga?
	Informan	Selain *Gembok Katresnan*, Desa Bringinan juga membentuk Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) yang fokus pada pelatihan pengelolaan keuangan dan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Adapun dilakukan pertemuan rutin di mana para istri pekerja migran diajarkan cara menabung dan berinvestasi dari hasil kiriman suami agar ekonomi keluarga tetap stabil. Kebijakan ini sangat membantu menjaga ketahanan keluarga karena saat kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan baik dan komunikasi terus didampingi oleh komunitas, risiko konflik rumah tangga akibat masalah keuangan pun bisa jauh berkurang.

Lampiran 3

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI DOKUMENTASI

Nomor	W/01/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 02 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi menunjukkan proses penggalian data mengenai alur Program *Gembok Katresnan* yang dimulai dari pendataan di balai desa, pemberian nasihat, hingga prosesi simbolis pemasangan gembok di ruang Kepala Desa sebagai pengikat janji setia. Informan menjelaskan bahwa program ini merupakan respons terhadap kasus-kasus keretakan rumah tangga pekerja migran di masa lalu, di mana komunitas KOPI kini berperan aktif dalam memantau kondisi keluarga yang ditinggalkan serta membantu pengurusan hak-hak PMI seperti asuransi kematian. Refleksi ini mempertegas bahwa keberhasilan program didukung oleh struktur desa yang kompak dan

	integrasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap musyawarah desa.

Nomor	W/02/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 02 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi wawancara ini menyoroti pentingnya validasi dokumen kependudukan di balai desa untuk mencegah pemalsuan identitas sebelum keberangkatan PMI. Informan memaparkan makna filosofis papan berbentuk "waru" (hati) dan gembok sebagai simbol kasih sayang serta komitmen LDR yang harus dijaga agar rumah tangga tetap harmonis. Selain itu, terdokumentasi upaya kemandirian komunitas melalui peternakan kambing sebagai solusi atas keterbatasan anggaran operasional, serta peran Posbakum desa dalam memediasi konflik rumah tangga sebelum berlanjut ke ranah hukum.

Nomor	W/03/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 02 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi ini merefleksikan perspektif penerima manfaat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan perlindungan PMI berbasis Peraturan Desa (Perdes). Informan menjelaskan bahwa prosesi pemasangan gembok yang dilakukan secara terbuka menciptakan rasa tanggung jawab moral karena disaksikan oleh perangkat desa dan tetangga, sehingga menumbuhkan solidaritas sosial untuk saling menjaga. Refleksi ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil mengubah janji pribadi menjadi komitmen komunal yang memperkuat ikatan batin pasangan meskipun terpisah jarak.

Nomor	W/04/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 03 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi wawancara ini mengungkap dimensi perlindungan menyeluruh yang diberikan desa, mencakup edukasi legalitas perusahaan penyalur hingga manajemen keuangan keluarga. Desa Bringinan secara struktural mewajibkan kehadiran pasangan untuk tanda tangan bersama sebagai bentuk restu resmi, yang kemudian dikuatkan dengan dasar hukum Perkades tahun 2023. Refleksi ini juga mencatat adanya program pemberdayaan ekonomi purna-PMI melalui kelompok usaha bersama agar kiriman uang dari luar negeri dapat dikelola secara produktif untuk ketahanan keluarga jangka panjang.

Nomor	W/05/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 03 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi ini menyoroti peran tokoh agama (Modin) dalam memberikan bimbingan spiritual dan bimbingan pranikah bagi calon migran untuk memperkuat fondasi iman. Informan merefleksikan bahwa meskipun terdapat tantangan berupa anggapan urusan rumah tangga sebagai hal tabu, program ini perlahan diterima sebagai bentuk perlindungan sosial desa. Sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan komunitas KOPI dalam pertemuan rutin terbukti efektif meredam perselisihan keluarga yang dipicu oleh masalah komunikasi maupun pengelolaan remitansi.

Nomor	W/06/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 03 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi ini memberikan gambaran tentang pengalaman emosional keluarga PMI yang mengikuti prosesi wawancara dan pengucapan janji setia di hadapan Kepala Desa sebelum pasangan berangkat ke luar negeri. Informan merasakan bahwa keberadaan "gembok cinta" di kantor desa berfungsi sebagai pengingat batin yang kuat untuk menjaga amanah dan menghindari godaan pihak ketiga. Refleksi ini juga menekankan peran penting purna-PMI dalam komunitas KOPI yang memberikan pendampingan praktis dan tempat berbagi cerita bagi para istri yang ditinggal merantau.

Nomor	W/07/DOK.INFMN/GK-PMI//II/2026
Jenis Dokumen	Foto
Nama Dokumen	Dokumentasi Wawancara
Dokumen ditemukan Hari/Tanggal	Senin 04 Februari 2026
Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi wawancara ini menegaskan posisi Program *Gembok Katresnan* sebagai kebijakan unggulan yang berlandaskan Peraturan Desa tahun 2019. Kepala Desa menekankan bahwa program ini bertujuan menciptakan stabilitas sosial dengan menekan angka perceraian melalui penguatan beban moral dan tertib administrasi. Refleksi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya lokal seperti *guyub rukun* dan *eling lan waspada* ke dalam struktur formal pemerintahan desa menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan keluarga pekerja migran di Desa Bringinan.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

LOKASI PENELITIAN

Rumah DATAKU
RUMAH DATAKU
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
KAMPUNG KB
Desa Bringinan Kec. Jambon
Kab. Ponorogo
POS BANTUAN HUKUM
08123425482
Jalan Mulyo lapangan, Bringinan

GEMBOK KATRESNAN

BIOGRAFI PENULIS

Nurul Fadilah, lahir di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 02 Februari 2001. Anak tersayang satu-satunya dari, pasangan Bapak Satiman dan Ibu Warti.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Conto 1 lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulukerto lulus pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak lulus pada tahun 2019. Mulai tahun 2019 mengikuti program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan lulus pada tahun 2022, dengan mengambil program Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah. Selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga aktif dalam bidang organisasi. Pada jenjang Perguruan Tinggi, penulis aktif di UKM Bela Diri sejak 2020 sampai dengan 2022, selanjutnya penulis juga merupakan anggota Persaudaraan Setia Hati Hati Terate Komisariat IAIN Ponorogo. Untuk menunjang daya kritis sebagai seorang mahasiswa penulis juga aktif sebagai anggota Komunitas Peradilan Semu (KOPERMU) sebuah komunitas resmi dibawah naungan Fakultas Syariah. Kemudian pada organisasi ekstra kampus penulis juga aktif sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari jenjang kaderisasi Rayon pada tingkatan Fakultas, Hingga Komisariat pada tingkatan Institut. Diluar kegiatan kampus penulis menghibahkan dirinya pada organisasi ANSOR dan BANSER, yang merupakan badan otonom dibawah naungan NU di wilayah Kecamantan Bulukerto. Selanjutnya penulis melanjutkan program Pascasarjana tahun 2024 pada program studi Magister Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan lulus pada tahun 2026.